



2024 LKPK & LSKP - TW Audited

Candi Prambanan,

Kuil Hindu abad ke-9 yang menyimpan 240 candi sebagai simbol kosmis Trimurti, warisan dunia UNESCO kedua terbesar di Asia Tenggara.

**Kanwil DJPb
Provinsi Jawa Tengah**

 024-3540815

 <https://djp.b.kemenkeu.go.id/kanwil/jateng/id/>

 Gedung Keuangan Negara Semarang I, Jl. Pemuda Nomor 2, Semarang, Jawa Tengah



DAFTAR



LKPK & LSKP – TW Audited 2024
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Depan	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iv
Daftar Grafik	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Ringkasan Eksekutif	
Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian	1
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian Tahun 2024 <i>Audited</i>	2
Laporan Operasional Pemerintah Konsolidasian Tahun 2024 <i>Audited</i>	6
Neraca Pemerintah Konsolidasian per 31 Desember Tahun 2024 <i>Audited</i>	9
Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tingkat Wilayah	10
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian – Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah	
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Jawa Tengah	12
Laporan Operasional Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Jawa Tengah	13
Neraca Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Jawa Tengah	14
Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Jawa Tengah	15
Laporan Arus Kas Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Jawa Tengah	16
Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Jawa Tengah	17
Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Jawa Tengah	18
Laporan Arus Ekonomi Lainnya Statistik Keuangan Pemerintah Umum	19
Laporan Sumber Penggunaan Kas Statistik Keuangan Pemerintah Umum	20
Metadata	21
Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian	
A. Penjelasan Umum	26
A.1 Dasar Hukum	26

A.2	Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	27
A.3	Kebijakan Akuntansi dan Eliminasi Timbal Balik	35
A.4	Kebijakan Fiskal/Keuangan dan Ekonomi Makro Tingkat Wilayah Tahun 2024	38
B.	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian Tahun 2024 <i>(Audited)</i>	48
B.1	Ikhtisar Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian	48
B.2	Penjelasan Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian	48
C.	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional Pemerintah Konsolidasian Tahun 2024 <i>(Audited)</i>	57
C.1	Ikhtisar Laporan Operasional	57
C.2	Penjelasan Per Pos Laporan Operasional	57
D.	Penjelasan atas Pos-pos Neraca Pemerintah Konsolidasian per 31 Desember 2024 <i>(Audited)</i>	60
D.1	Posisi Keuangan Secara Umum	60
D.2	Penjelasan Per Pos Neraca Pemerintah Konsolidasian	61
E	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Konsolidasian Tahun 2024 <i>(Audited)</i>	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat
Lampiran 2	Laporan Operasional Pemerintah Pusat
Lampiran 3	Neraca Pemerintah Pusat
Lampiran 4	Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Pusat
Lampiran 5	Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat
Lampiran 6	Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Pusat
Lampiran 7	Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Pusat
Lampiran 8	Laporan Arus Ekonomi Lainnya Statistik Keuangan Pemerintah Pusat
Lampiran 9	Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Statistik Keuangan Pemerintah Pusat
Lampiran 10	Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Konsolidasian
Lampiran 11	Laporan Operasional Pemerintah Daerah Konsolidasian
Lampiran 12	Neraca Pemerintah Daerah Konsolidasian
Lampiran 13	Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah Konsolidasian
Lampiran 14	Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah Konsolidasian
Lampiran 15	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah Konsolidasian
Lampiran 16	Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian
Lampiran 17	Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian
Lampiran 18	Laporan Arus Ekonomi Lainnya Statistik Keuangan Pemerintah Daerah
Lampiran 19	Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian
Lampiran 20	Kebijakan Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah
Lampiran 21	Kebijakan Penyusunan Laporan Operasional Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah
Lampiran 22	Kebijakan Penyusunan Neraca Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah
Lampiran 23	Kebijakan Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah
Lampiran 24	Neraca Saldo Buku Besar Akrual Eliminasi Tahun 2024 Audited
Lampiran 25	Neraca Saldo Buku Besar Kas Eliminasi Tahun 2024 Audited

DAFTAR GRAFIK

	Hal	
Grafik 1	Komposisi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2024 <i>Audited</i>	2
Grafik 2	Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Tahun 2024 (<i>Audited</i>) dan Tahun 2023 (<i>Audited</i>)	3
Grafik 3	Komposisi Belanja Konsolidasian Tahun 2024 (<i>Audited</i>) Berdasarkan Jenis Belanja	4
Grafik 4	Komposisi Belanja Konsolidasian Tahun 2024 (<i>Audited</i>) Berdasarkan Fungsi	5
Grafik 5	Perbandingan Pendapatan Operasional Konsolidasian Tahun 2024 (<i>Audited</i>) dan 2023 (<i>Audited</i>)	6
Grafik 6	Komposisi Pendapatan Operasional Konsolidasian Tahun 2024 (<i>Audited</i>)	7
Grafik 7	Perbandingan Beban Operasional Konsolidasian Tahun 2024 (<i>Audited</i>) dan Tahun 2023 (<i>Audited</i>)	7
Grafik 8	Komposisi Beban Operasional Konsolidasian Tahun 2024 (<i>Audited</i>)	8
Grafik 9	Komposisi Aset Konsolidasian Tahun 2024 (<i>Audited</i>)	9
Grafik 10	Perbandingan Aset Konsolidasian Tahun 2024 (<i>Audited</i>) dan Tahun 2023 (<i>Audited</i>)	9
Grafik 11	Perbandingan Kewajiban Konsolidasian Tahun 2024 (<i>Audited</i>) dan Tahun 2023 (<i>Audited</i>)	10
Grafik 12	Pertumbuhan Perekonomian Jawa Tengah tahun 2024 (yoy)	39
Grafik 13	Kontribusi Ekonomi Regional di Jawa Triwulan I Tahun 2024 (q to q)	40
Grafik 14	Inflasi Year on Year Jawa Tengah Tahun 2024	41
Grafik 15	Tingkat Kemiskinan Jawa Tengah per September 2024	42
Grafik 16	Tingkat Gini Ratio Perkotaan dan Pedesaan Jawa Tengah 2020 - 2024	43
Grafik 17	Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Tengah Agustus 2019 – Agustus 2024	43
Grafik 18	IPM Jawa Tengah 2020 - 2024	44
Grafik 19	Sebaran IPM Kab/Kota di Jawa Tengah 2024	45
Grafik 20	Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga Jawa Tengah Tahun 2024	46
Grafik 21	Komposisi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2024 <i>Audited</i>	49
Grafik 22	Komposisi Pendapatan Pajak Konsolidasian Tahun 2024 <i>Audited</i>	50
Grafik 23	Komposisi PNPB Konsolidasian Tahun 2024 <i>Audited</i>	51

Grafik 24	Perbandingan Belanja Pemerintah Konsolidasian Tahun 2024 <i>Audited</i> dan 2023 <i>Audited</i>	52
Grafik 25	Komposisi Belanja Pemerintah Konsolidasian Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2024 <i>Audited</i>	53
Grafik 26	Perbandingan Belanja Pemerintah Konsolidasian Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2024 <i>Audited</i> dan Tahun 2023 <i>Audited</i>	54
Grafik 27	Komposisi Pendapatan Operasional Tahun 2024 <i>Audited</i>	58
Grafik 28	Posisi Keuangan Konsolidasian tahun 2024 <i>Audited</i> dan Tahun 2023 <i>Audited</i>	60
Grafik 29	Struktur Aset Konsolidasian per 31 Desember 2024 <i>Audited</i>	61
Grafik 30	Struktur Aset Lancar Konsolidasian per 31 Desember 2024 <i>Audited</i>	62
Grafik 31	Struktur Kewajiban Konsolidasian Per 31 Desember 2024 (Audited)	68

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1	Perbandingan Belanja Konsolidasian berdasarkan fungsi tahun 2024 (<i>Audited</i>) dan tahun 2023 (<i>Audited</i>)	5
Tabel 2	Inflasi Komposit 9 Kabupaten Kota Jawa Tengah 2024	41
Tabel 3	Kinerja APBN Regional Jawa Tengah 2023-2024	45
Tabel 4	Kinerja APBD Regional Jawa Tengah Tahun 2024	47
Tabel 5	Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2024 dan 2023	48
Tabel 6	Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Tahun 2024 dan Tahun 2023	49
Tabel 7	Perbandingan Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian Tahun 2024 (<i>Audited</i>) dan Tahun 2023 (<i>Audited</i>)	51
Tabel 8	Belanja Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2024 (<i>Audited</i>) dan Tahun 2023 (<i>Audited</i>)	54
Tabel 9	Rincian Belanja Transfer Tahun 2024 (<i>Audited</i>)	55
Tabel 10	Pembiayaan Tahun 2024 (<i>Audited</i>) dan Tahun 2023 (<i>Audited</i>)	56
Tabel 11	LO Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2024 (<i>Audited</i>) dan 2023 (<i>Audited</i>)	57
Tabel 12	Pendapatan Operasional Tingkat Wilayah Tahun 2024 (<i>Audited</i>) dan 2023 (<i>Audited</i>)	59
Tabel 13	Beban Operasional Tingkat Wilayah Tahun 2024 (<i>Audited</i>) dan 2023 (<i>Audited</i>)	59
Tabel 14	Perbandingan Aset Konsolidasian per 31 Desember 2024 (<i>Audited</i>) dan 31 Desember 2023 (<i>Audited</i>)	61
Tabel 15	Rincian Aset Tetap Tahun 2024 <i>Audited</i> dan 2023 <i>Audited</i>	63
Tabel 16	Properti Investasi pada LKPD Tahun 2024 (<i>Audited</i>)	65
Tabel 17	<i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF) pada LKPD Tahun 2024 (<i>Audited</i>)	67
Tabel 18	Perbandingan Kewajiban Jangka Pendek Konsolidasian Tahun 2024 (<i>Audited</i>) dan Tahun 2023 (<i>Audited</i>)	68

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1	39



RINGKASAN EKSEKUTIF



**LKPK & LSKP – TW Audited 2024
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah**

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Kebutuhan untuk melakukan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilakukan dalam rangka penerapan Statistik Keuangan Pemerintah (*Government Finance Statistics-GFS*) untuk memenuhi kebutuhan analisis kebijakan fiskal, analisis kegiatan pemerintahan dan perbandingan antara negara (*Cross Country Studies*) sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Dalam rangka mewujudkan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah secara nasional tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pasal 6 ayat (2) mengatur mengenai perlu diterbitkannya Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan sebagai acuan bagi Sistem akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah.

Selain itu, laporan hasil reviu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan transparansi fiskal tahun 2012 mengungkapkan adanya kebutuhan untuk melakukan konsolidasi LKPP dan LKPD dalam rangka kejelasan peran dan tanggung jawab Pemerintah serta ketersediaan informasi bagi publik. Konsolidasi LKPP dan LKPD Tingkat Wilayah tidak dimaksudkan untuk tujuan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, tetapi lebih pada tujuan transparansi fiskal. Tanggung jawab atas nilai dari masing-masing unsur laporan keuangan yang dikonsolidasikan tetap berada pada masing-masing entitas pelaporan.

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) Tingkat Wilayah disusun berdasarkan kerangka konsolidasi akuntansi sebagaimana diatur dalam PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan/atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik (*Reciprocal Accounts*). Entitas pelaporan yang dicakup dalam laporan keuangan konsolidasian ini adalah Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pemerintah Daerah. Laporan keuangan konsolidasian yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasian, Neraca Konsolidasian, Laporan Arus Kas (LAK) Konsolidasian dan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, melalui tiga tahap proses konsolidasi, yaitu (1) Konsolidasi LKPP, (2) Konsolidasi LKPD dan (3) Konsolidasi LKPP dengan LKPD Konsolidasian.

Di wilayah provinsi Jawa Tengah, proses konsolidasi LKPD tahun 2024 (*Audited*) dilakukan terhadap 36 LKPD yang terbagi dalam 1 (satu) pemerintah provinsi, 29 pemerintah kabupaten dan 6 (enam) pemerintah kota.

Dengan berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat

Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, kebijakan eliminasi akun timbal balik pada laporan keuangan konsolidasian, meliputi (1) Eliminasi akun timbal balik yang jumlahnya sama, (2) Eliminasi akun timbal balik yang tidak sama jumlahnya, (3) Eliminasi akun timbal balik yang tidak habis terkonsolidasi pada konsolidasi tingkat sebelumnya.

2. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian Tahun 2024 (Audited)

LRA Pemerintah Konsolidasian mencakup konsolidasi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan baik untuk LRA Pemerintah Pusat maupun untuk LRA Pemerintah Daerah. LRA Konsolidasian ini tidak mencakup konsolidasi terhadap angka Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun angka Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan dan Hibah Konsolidasian pada tahun 2024 (Audited) mencapai Rp152.427.964.504.527,- Sedangkan tahun 2023 (Audited) Pendapatan dan Hibah Konsolidasian tercatat sebesar Rp140.225.651.903.950,-. Terdapat kenaikan pendapatan dan hibah sebesar Rp12.202.312.600.577,- atau 8,7 persen.

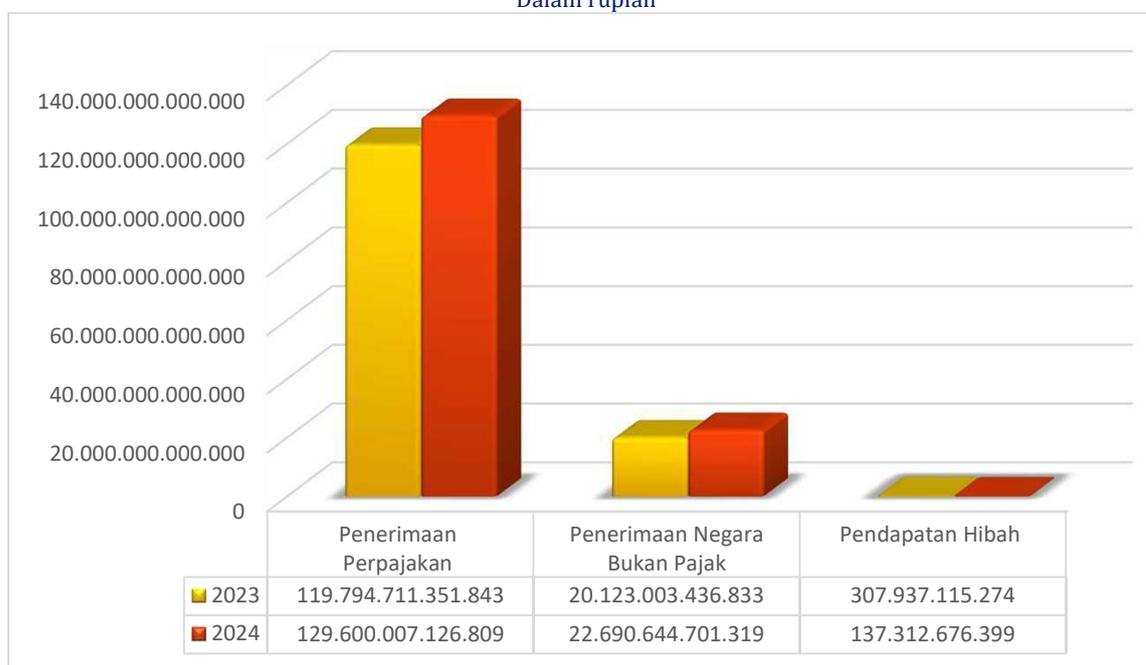
Pendapatan dan Hibah Konsolidasian diatas telah dilakukan eliminasi. Proses eliminasi ini berpedoman pada Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan nomor PER-34/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat wilayah Dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dalam ketentuan dimaksud disebutkan bahwa jumlah maksimum yang dieliminasi adalah sebesar Pendapatan Transfer dan Pendapatan lainnya pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian (LKPKD) Tingkat Wilayah.

Grafik 1. Komposisi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2024 (Audited)
 Dalam rupiah



Pendapatan Dan Hibah Konsolidasian tahun 2024 (*Audited*), terdiri dari Pendapatan Perpajakan Konsolidasian sebesar Rp129.600.007.126.809,- Pendapatan Negara Bukan Pajak Konsolidasian sebesar Rp22.690.644.701.319,- dan Pendapatan Hibah sebesar Rp137.312.676.399,-. Sedangkan pada tahun 2023 (*Audited*), Pendapatan Dan Hibah Konsolidasian yang terdiri dari Pendapatan Perpajakan Konsolidasian sebesar Rp119.794.711.351.843,-, Pendapatan Negara Bukan Pajak Konsolidasian sebesar Rp20.123.003.436.833,- dan Pendapatan Hibah sebesar Rp307.937.115.274,-. Terjadi kenaikan pada Pendapatan Perpajakan Konsolidasian dan Pendapatan Negara Bukan Pajak Konsolidasian, namun Pendapatan Hibah mengalami penurunan. Berikut perbandingan Pendapatan Konsolidasian Tahun 2024 (*Audited*) dengan Tahun 2023 (*Audited*).

Grafik 2. Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Tahun 2024 (*Audited*) dan Tahun 2023 (*Audited*)
 Dalam rupiah



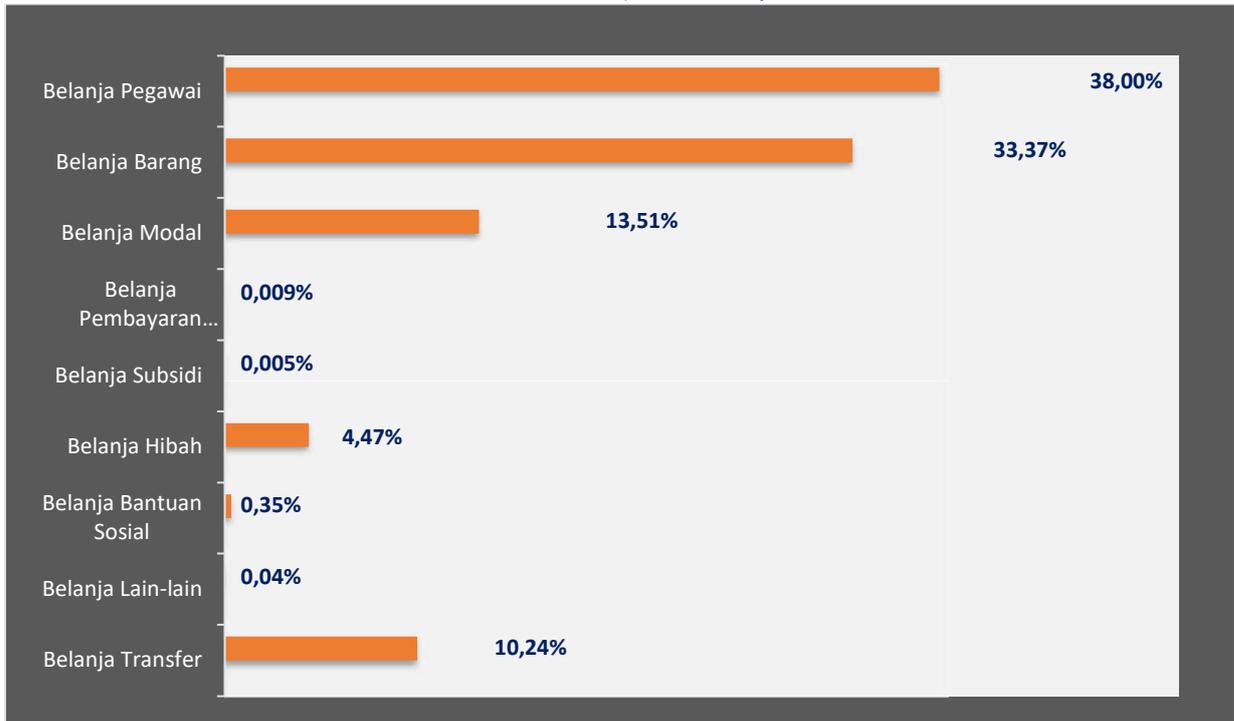
Belanja dan Transfer Konsolidasian tahun 2024 (*Audited*), sebesar Rp157.631.273.972.459,- dan Belanja dan Transfer Konsolidasian tahun 2023 (*Audited*) tercatat sebesar Rp147.343.255.233.676,-. Belanja dan Transfer Konsolidasian ini terbagi menjadi dua yaitu Belanja Pemerintah Konsolidasian dan Belanja Transfer Konsolidasian.

Belanja Pemerintah Konsolidasian tahun 2024 (*Audited*), terdiri dari Belanja Pegawai Konsolidasian sebesar Rp59.895.095.410.626,- Belanja Barang Konsolidasian sebesar Rp52.606.462.400.624,- Belanja Modal Konsolidasian sebesar Rp21.302.829.432.761,- Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Konsolidasian sebesar Rp14.788.929.517,- Belanja Subsidi Konsolidasian sebesar Rp8.472.385.961,- Belanja Hibah Konsolidasian sebesar Rp7.041.433.789.940,- Belanja Bantuan Sosial Konsolidasian sebesar Rp551.872.621.526,- dan Belanja Lain-lain konsolidasian sebesar Rp67.917.486.409,-.

Belanja Transfer Konsolidasian tahun 2024 (*Audited*) sebesar [Rp16.142.401.515.095,-](#) Belanja Transfer ini berasal dari Belanja Transfer Pemerintah Pusat yang tidak seluruhnya dapat dieliminasi sesuai dengan kebijakan eliminasi akun resiprokal Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Eliminasi akun resiprokal dan skala resiprokal LRA Konsolidasian ditunjukkan pada Neraca Saldo Buku Besar Kas Eliminasi (lampiran 25)

Grafik 3. Komposisi Belanja dan Transfer Konsolidasian Tahun 2024 (*Audited*) Berdasarkan Jenis Belanja



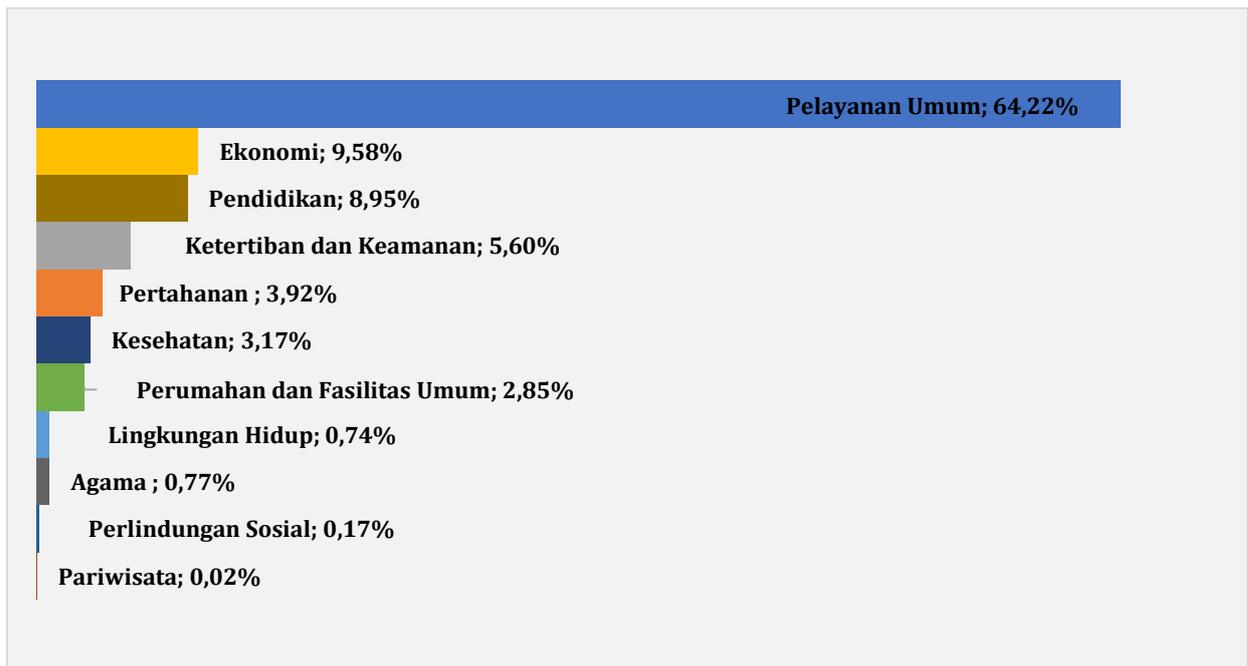
Pada tahun 2024 (*Audited*), terjadi defisit konsolidasian sebesar [Rp5.203.309.467.932,-](#) yang merupakan implikasi dari lebih rendahnya Pendapatan Pemerintah Konsolidasian dibandingkan Belanja dan dan Transfer ke Daerah Konsolidasian. Belanja konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan dengan mengkonsolidasikan data belanja per wilayah yang dihasilkan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) untuk Pemerintah Pusat dan data Belanja Pemerintah Daerah berdasarkan data LKPD yang diperoleh Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah.

Pembiayaan konsolidasian tahun 2024 (*Audited*) sebesar [Rp6.535.427.584.576,-](#) sedangkan tahun 2023 (*Audited*) sebesar [Rp7.636.145.133.350,-](#). Pembiayaan ini seluruhnya berasal dari Pemerintah Daerah. Sumber penerimaan pembiayaan tahun 2024 (*Audited*) sebesar [Rp7.147.570.030.969,-](#) didominasi oleh penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebesar [Rp6.191.741.200.744,-](#). Disisi pengeluaran terdapat pengeluaran pembiayaan sebesar [Rp612.142.446.393,-](#) berupa pengeluaran pembiayaan Dalam Negeri sebesar [Rp404.393.027.919,-](#) dan penyertaan modal negara sebesar [Rp207.749.418.474,-](#). Dengan pembiayaan ini maka pada

tahun 2024 (*Audited*) tercatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp1.332.118.116.644,- meningkat dibandingkan SiLPA tahun 2023 (*Audited*) yang tercatat sebesar Rp518.541.803.624,-.

Belanja Pemerintah dikelompokkan dalam 11 Fungsi yang menggambarkan aspek penyelenggaraan Pemerintah yakni (1) Fungsi Pelayanan Umum, (2) Fungsi Pertahanan, (3) Fungsi Ketertiban dan Keamanan, (4) Fungsi Ekonomi, (5) Fungsi Lingkungan Hidup, (6) Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum, (7) Fungsi Kesehatan, (8) Fungsi Pariwisata dan Budaya, (9) Fungsi Agama (10) Fungsi Pendidikan dan (11) Fungsi Perlindungan Sosial.

Grafik 4. Komposisi Belanja Konsolidasian Tahun 2024 (*Audited*) Berdasarkan Fungsi



Pada periode tahun 2024 (*Audited*), fungsi Pelayanan Umum menempati porsi terbesar belanja konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu mencapai 64,22 persen dari total Belanja Konsolidasian. Dibandingkan tahun 2023 (*Audited*) mengalami peningkatan sebesar Rp7.397.784.723.406,- yang terjadi di hampir seluruh fungsi kecuali fungsi ekonomi yang mengalami penurunan.

Perbandingan Belanja Konsolidasian berdasarkan fungsi tahun 2024 (*Audited*) dan tahun 2023 (*Audited*) tersaji pada tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Belanja Konsolidasian berdasarkan fungsi tahun 2024 (*Audited*) dan tahun 2023 (*Audited*)

Belanja menurut Fungsi	2024	2023	Dalam Rupiah
			Kenaikan (penurunan)
Pelayanan Umum	76.041.331.558.920	70.140.662.550.422	5.900.669.008.498
Pertahanan	4.635.464.864.915	4.205.930.332.523	429.534.532.392
Ketertiban dan Keamanan	6.632.229.754.940	6.052.874.214.897	579.355.540.043

Ekonomi	11.345.638.227.504	12.981.551.644.615	(1.635.913.417.111)
Lingkungan Hidup	881.302.803.627	905.718.481.911	(24.415.678.284)
Perumahan dan Fasilitas Umum	3.370.749.806.408	2.480.490.045.405	890.259.761.003
Kesehatan	3.756.011.712.055	3.545.529.143.730	210.482.568.325
Pariwisata	26.989.326.673	36.120.922.872	(9.131.596.199)
Agama	912.014.629.779	798.697.108.937	113.317.520.842
Pendidikan	10.600.647.415.531	9.662.295.907.022	938.351.508.509
Perlindungan Sosial	196.356.980.448	191.082.005.060	5.274.975.388
Total	118.398.737.080.800	111.000.952.357.394	7.397.784.723.406

3. Laporan Operasional Pemerintah Konsolidasian Tahun 2024 (Audited)

Laporan Operasional (LO) Konsolidasian mencakup konsolidasi Pendapatan LO, Beban, Surplus/Defisit Dari Operasi, Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Surplus/Defisit LO pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2024 (Audited), LO Konsolidasian mencapai surplus sebesar Rp7.710.186.175.196,- sedangkan pada tahun 2023 (Audited), surplus LO Konsolidasian mencapai Rp73.780.826.983.773,-. Penurunan sangat signifikan ini terjadi karena perubahan kebijakan penyesuaian pendapatan lainnya yaitu Pendapatan Penyesuaian Droning Dana Transfer tahun 2023 (Audited) sebesar Rp66.577.367.930.209,- yang pada tahun 2024 ini ditiadakan. Pendapatan Penyesuaian Droning Dana Transfer dimaksudkan sebagai penyeimbang belanja transfer yang tercatat di Laporan Keuangan tingkat kanwil.

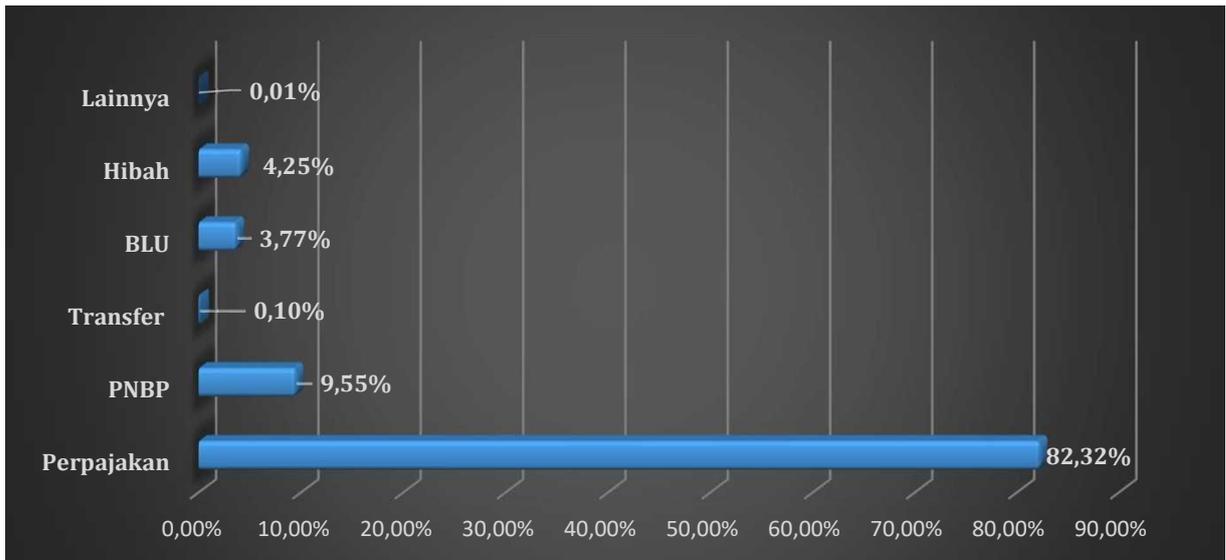
Kegiatan Operasional mencatatkan Pendapatan Operasional per 31 Desember 2024 (Audited) sebesar Rp168.889.978.442.942,- menurun 23 persen dibandingkan Pendapatan LO per 31 Desember 2023 (Audited) yang sebesar Rp220.911.219.917.237,-. Beban Operasional Konsolidasian per 31 Desember 2024 (Audited) sebesar Rp157.712.648.328.977,- Sedangkan Beban Operasional Konsolidasian per 31 Desember 2023 (Audited) sebesar Rp144.753.039.550.065,-.

Grafik 5. Perbandingan Pendapatan Operasional Konsolidasian Tahun 2024 (Audited) dan 2023 (Audited) (Dalam rupiah)



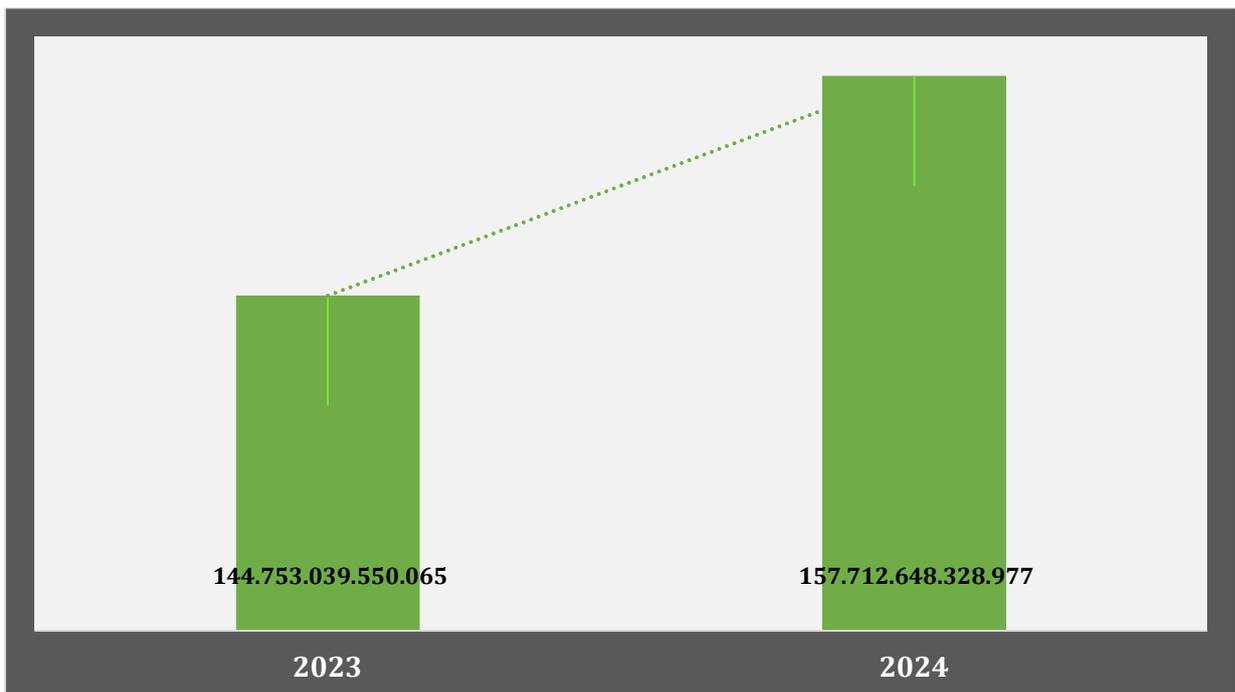
Pendapatan Operasional Konsolidasian per 31 Desember 2024 (*Audited*) ini terdiri dari Pendapatan Perpajakan Konsolidasian sebesar Rp139.021.923.845.433,- Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Konsolidasian sebesar Rp16.133.421.265.015,- Pendapatan BLU sebesar Rp6.366.662.288.948,- Pendapatan Hibah sebesar Rp7.174.889.725.658,- dan Pendapatan Lainnya sebesar Rp18.052.883.878,-. Selain itu juga masih terdapat Pendapatan Transfer sebesar Rp175.028.434.010,- sebagai akibat dari Belanja Transfer Pemerintah Pusat yang tidak tereliminasi seluruhnya dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah.

Grafik 6. Komposisi Pendapatan Operasional Konsolidasian Tahun 2024 (Audited)



Grafik 7. Perbandingan Beban Operasional Konsolidasian Tahun 2024 (Audited) dan Tahun 2023 (Audited)

(Dalam rupiah)



Beban Operasional Konsolidasian per 31 Desember 2024 (*Audited*) terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp61.607.616.718.067,- Beban Persediaan sebesar Rp2.469.553.752.471,- Beban Barang dan Jasa sebesar Rp48.309.177.710.878,- Beban Bantuan Sosial sebesar Rp670.070.745.583,- Beban bunga sebesar Rp19.362.539.598,- Beban Subsidi sebesar Rp8.733.546.326,- Beban Hibah sebesar Rp8.636.508.671.099,- Beban Tidak Terduga sebesar Rp19.486.691.343,- Beban akrual lainnya sebesar Rp20.054.771.065.737,- serta Beban Transfer sebesar Rp15.917.366.887.875,-.

Grafik 8. Komposisi Beban Operasional Konsolidasian Tahun 2024 (*Audited*)
 Dalam miliar rupiah



Kegiatan Non Operasional Konsolidasian sampai dengan 31 Desember 2024 (*Audited*) tercatat defisit sebesar Rp3.437.573.595.645,-. Kegiatan Non Operasional tahun 2024 meliputi surplus atas selisih kurs yang belum terealisasi pada pemerintah pusat, defisit atas pelepasan aset non lancar baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, surplus atas penyelesaian kewajiban jangka panjang pemerintah daerah. Kegiatan non operasional lainnya pada pemerintah pusat tercatat surplus namun tidak demikian pada kegiatan non operasional lainnya pemerintah daerah yang tercatat defisit.

Pos Luar Biasa tahun 2024 (*Audited*) terdapat beban luar biasa pada pemerintah daerah sebesar Rp29.570.343.124,- menurun 36,51 persen dibandingkan beban luar biasa tahun 2023 sebesar Rp46.574.444.260,-. Transaksi atau kejadian dapat diakui sebagai beban pada pos luar biasa jika kejadian tersebut tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas pemerintah seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.

Surplus Laporan Operasional sampai dengan 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp7.710.186.175.196,-. Laporan Operasional sampai dengan 31 Desember 2023 (*Audited*) juga mengalami surplus sebesar Rp73.780.826.983.773,-. Dengan pendapatan operasional sebesar 168,89 triliun rupiah mampu membiayai kegiatan operasional sebesar 157,71 triliun rupiah dan

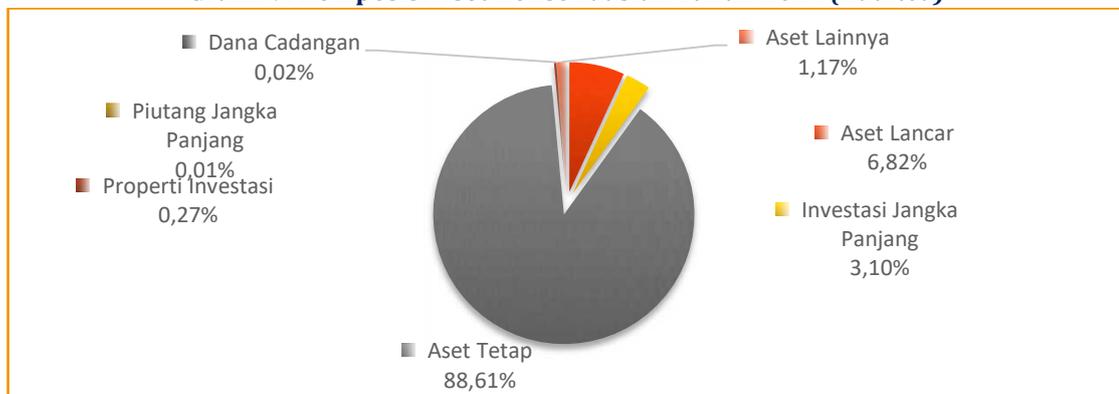
setelah memperhitungkan defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa, Laporan Operasional Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah masih tercatat surplus.

4. Neraca Pemerintah Konsolidasian per 31 Desember 2024 (Audited)

Neraca Pemerintah Konsolidasian per 31 Desember 2024 (Audited) meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dengan uraian sebagai berikut :

Total Aset Konsolidasian per 31 Desember 2024 (Audited) sebesar Rp612.592.793.072.450,- terdiri dari Aset Lancar Konsolidasian sebesar Rp41.800.491.395.824,- Investasi Jangka Panjang sebesar Rp18.960.830.425.674,- Aset Tetap Konsolidasian sebesar Rp542.845.362.836.841,- Properti Investasi sebesar Rp1.678.653.839.878,- Dana Cadangan sebesar Rp127.477.022.428,- Piutang Jangka Panjang Konsolidasian sebesar Rp41.527.632.253,- dan Aset Lainnya Konsolidasian sebesar Rp7.138.449.919.552,-. Aset Konsolidasian per 31 Desember 2024 (Audited) didominasi oleh Aset Tetap, yaitu sebesar 88,61 persen dari total Aset Konsolidasian.

Grafik 9. Komposisi Aset Konsolidasian Tahun 2024 (Audited)



Terjadi kenaikan total Aset Konsolidasian per 31 Desember 2024 (Audited) sebesar Rp13.471.301.875.753,- atau 2,25 persen dibandingkan total Aset Konsolidasian per 31 Desember 2023 (Audited) sebesar Rp599.121.491.196.697,-. Kenaikan ini terjadi di hampir seluruh komponen Aset Konsolidasian.

Grafik 10. Perbandingan Aset Konsolidasian Tahun 2024 (Audited) dan Tahun 2023 (Audited) Dalam rupiah



Kewajiban Konsolidasian per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp3.846.001.454.305,- terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek Konsolidasian sebesar Rp3.786.131.055.016,- dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp59.870.399.289,-. Kewajiban Konsolidasian per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp3.370.399.575.502,- terjadi kenaikan Kewajiban sebesar Rp475.601.878.803,- atau 14,11 persen.

Grafik 11. Perbandingan Kewajiban Konsolidasian Tahun 2024 (*Audited*) dan Tahun 2023 (*Audited*)



Ekuitas Konsolidasian per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp608.746.791.618.145,- sedangkan Ekuitas Konsolidasian per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp595.751.091.621.195,-. Terjadi kenaikan Rp12.995.699.996.950,- atau 2,13 persen.

Eliminasi dilakukan terhadap akun yang bersifat resiprokal pada Neraca Pemerintah Pusat dengan Neraca Pemerintah Daerah. Selain akun resiprokal, eliminasi dengan jumlah yang sama juga dilakukan terhadap akun pasangan dari akun yang dieliminasi karena sistem akuntansi yang diterapkan menganut sistem akun berpasangan. Eliminasi pada Neraca dan Laporan Operasional Konsolidasian Tahun 2024 (*Audited*) ini ditunjukkan pada Neraca Saldo Buku Besar Akrual Eliminasi (lampiran 24).

5. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tingkat Wilayah

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah disusun berdasarkan Kerangka Statistik Keuangan Pemerintah melalui estimasi analisis, penyesuaian, dan reklasifikasi akun laporan keuangan konsolidasian (high level mapping) dengan Bagan Akun Standar (BAS) Statistik Keuangan Pemerintah. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah terdiri dari Laporan Operasional yang di-mapping menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian dan Neraca Statistik Keuangan Pemerintah yang disusun dari Neraca Pemerintah Konsolidasian berdasarkan *high level mapping*.

Laporan Operasional Statistik Laporan yang menyajikan ringkasan transaksi pada periode tertentu yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan. Transaksi tersebut diklasifikasikan ke dalam pendapatan, beban, perolehan aset non-keuangan neto, perolehan aset keuangan neto, dan keterjadian kewajiban neto. Dengan kata lain, laporan operasional menyajikan perubahan aset, kewajiban dan kekayaan neto yang berasal dari transaksi.

Tahun 2024 (*Audited*) Laporan Operasional Statistik Pemerintah di wilayah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa transaksi-transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan diantaranya pendapatan sebesar Rp152.285.795.214.239,- Beban sebesar Rp130.717.163.115.042,-, sehingga terbentuk saldo Operasi Bruto/Neto (*Gross/Net Operating Balance*) sebesar Rp21.568.632.099.197,-. Selanjutnya pada tahun 2024 terdapat transaksi untuk investasi aset nonfinansial berupa aset tetap, persediaan dan aset non produksi sebesar Rp26.771.941.567.129,-. Dengan demikian pada tahun 2024 (*Audited*) tercatat saldo Pinjaman neto (*net borrowing*) sebesar Rp5.203.309.467.932,-. Pinjaman neto di wilayah Jawa Tengah menunjukkan angka yang negatif bermakna Pemerintah Umum di wilayah Jawa Tengah mengalami kekurangan sumber daya keuangan sehingga Pemerintah memerlukan sumber daya keuangan dari sektor lain. Melalui indikator ini, dapat diketahui sejauh mana pemerintah di Jawa Tengah dapat memanfaatkan sumber daya keuangan yang dimiliki.

Neraca Statistik adalah Laporan yang menyajikan posisi aset keuangan dan aset non-keuangan, kewajiban, dan kekayaan neto. Kekayaan neto sama dengan total aset dikurangi dengan kewajiban. Neraca Statistik Pemerintah per 31 Desember Tahun 2024 (*Audited*) di wilayah Provinsi Jawa Tengah tercatat kekayaan bersih sebesar Rp608.746.791.618.145,- yang terdiri dari Aset Non Keuangan sebesar Rp562.942.185.583.781,- Aset Keuangan sebesar Rp49.650.607.488.669,- dan Kewajiban sebesar Rp3.846.001.454.305,-. Seluruh Aset Keuangan dan Kewajiban merupakan Aset Keuangan dan Kewajiban Domestik. *Mapping* data kewajiban Pemerintah Umum ke dalam Klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah (dalam negeri/domestik dan luar negeri) dilakukan berdasarkan jenis mata uang kewajiban tersebut (rupiah atau mata uang asing) dan belum dilakukan berdasarkan residensi pihak debitur/kreditur.

Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Statistik merupakan Laporan yang menyajikan sumber dan penggunaan kas dengan menggunakan klasifikasi yang sama dengan laporan operasional. Dari laporan ini dapat diketahui bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat arus kas masuk dari aktifitas operasi sebesar Rp119.546.133.283.216,- dan arus kas keluar neto berupa investasi pada aset non keuangan sebesar Rp20.395.290.760.405,- sehingga terjadi surplus kas sebesar Rp99.150.842.522.811,-. Selain itu juga terdapat arus kas yang berasal dari akuisisi aset finansial selain kas dan pembiayaan berupa pinjaman dengan total arus kas neto sebesar Rp530.272.617.770,-.



LRA LKPK – TW



LKPK & LSKP – TW Audited 2024
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 (AUDITED) DAN 2023 (AUDITED)

URAIAN	Indek	TAHUN 2024	TAHUN 2023
A. Pendapatan dan Hibah	B.2.1	152.427.964.504.527	140.225.651.903.950
I. Pendapatan Perpajakan	B.2.1.1	129.600.007.126.809	119.794.711.351.843
1. Pajak Dalam Negeri		126.851.208.447.736	117.578.950.612.372
2. Pajak Perdagangan Internasional		2.748.798.679.073	2.215.760.739.471
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1.2	22.690.644.701.319	20.123.003.436.833
1. Pendapatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan		1.646.758.281.959	1.502.509.857.053
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya		14.042.192.896.899	5.037.720.359.069
3. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		343.314.116.266	
4. Pendapatan Transfer PemPus Lainnya		369.268.510.756	37.013.687.486
5. Pendapatan Transfer Pemda Lainnya		653.471.000	-
6. Pendapatan BLU		6.288.457.424.439	13.545.759.533.225
III. Pendapatan Hibah	B.2.1.3	137.312.676.399	307.937.115.274
B. Belanja dan Transfer	B.2.2	157.631.273.972.459	147.343.255.233.676
I. Belanja Pemerintah	B.2.2.1	141.488.872.457.364	131.359.471.419.157
1. Belanja Pegawai		59.895.095.410.626	53.614.450.105.018
2. Belanja Barang dan Jasa		52.606.462.400.624	47.514.616.646.206
3. Belanja Modal		21.302.829.432.761	22.989.859.195.505
4. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang		14.788.929.517	27.474.958.228
5. Belanja Subsidi		8.472.385.961	13.284.963.148
6. Belanja Hibah		7.041.433.789.940	6.499.256.517.563
7. Belanja Bantuan Sosial		551.872.621.526	619.597.354.466
8. Belanja Lain-lain		67.917.486.409	80.931.679.023
II. Transfer	B.2.2.2	16.142.401.515.095	15.983.783.814.519
II.1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan		540.248.534.240	477.717.356.751
1. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		476.369.176.193	406.089.620.720
2. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		63.879.358.047	71.627.736.031
II.2. Transfer Bantuan Keuangan		15.102.827.332.592	15.116.357.554.234
1. Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		316.479.028.000	1.761.543.149.292
2. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		14.786.348.304.592	13.354.814.404.942
3. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya			
II.3. Transfer Pemerintah Pusat Ke Daerah Dan Dana Desa		499.325.648.263	389.708.903.534
1. Dana Bagi Hasil		0	108.137.020.519
2. Dana Alokasi Umum		21.667.915.938	0
3. Dana Alokasi Khusus Fisik		108.892.188.325	258.569.862.015
4. Dana Otsus, Dana Keistimewaan DIY dan DID			23.002.021.000
5. Dana Alokasi Khusus Non Fisik		0	0
6. Hibah ke Daerah		0	0
7. Dana Desa		368.765.544.000	0
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A-B)	B.2.3	(5.203.309.467.932)	(7.117.603.329.726)
D. Pembiayaan	B.2.4	6.535.427.584.576	7.636.145.133.350
I. Penerimaan Pembiayaan		7.147.570.030.969	8.573.443.679.594
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri		7.147.570.030.969	8.573.443.679.594
II. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		612.142.446.393	937.298.546.244
1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri		404.393.027.919	634.005.353.320
2. Penyertaan Modal Negara		207.749.418.474	303.293.192.924
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (D+C)	B.2.5	1.332.118.116.644	518.541.803.624



LO LKPK – TW



LKPK & LSKP – TW Audited 2024
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah

LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 (AUDITED) DAN 2023 (AUDITED)

URAIAN	Indek	TAHUN 2024	TAHUN 2023
KEGIATAN OPERASIONAL	C.2.1	(4.740.036.773.910)	60.045.207.929.260
PENDAPATAN OPERASIONAL	C.2.1.1	168.889.978.442.942	220.911.219.917.237
Pendapatan Perpajakan		139.021.923.845.433	129.202.472.815.996
Pendapatan Pajak Dalam Negeri		136.265.227.194.386	126.951.030.822.239
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional		2.756.696.651.047	2.251.441.993.757
Pendapatan Bukan Pajak		16.133.421.265.015	7.797.964.902.494
Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan		2.038.586.247.379	2.188.238.497.250
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya		14.094.835.017.636	5.609.726.405.244
Pendapatan Transfer		175.028.434.010	68.838.919.261
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		175.010.612.406	68.835.263.637
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		2.966.756	-
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Bantuan Keuangan Daerah		14.854.848	3.655.624
Pendapatan BLU		6.366.662.288.948	13.340.111.686.291
Pendapatan Jasa BLU		6.097.248.329.227	13.096.440.866.004
Pendapatan Hibah BLU		27.248.127.566	35.889.081.949
Pendapatan Lainnya BLU		242.165.832.155	207.781.738.338
Pendapatan Hibah		7.174.889.725.658	3.848.139.019.174
Pendapatan Hibah dalam negeri dan luar negeri		7.174.889.725.658	3.848.139.019.174
Pendapatan Lainnya		18.052.883.878	66.653.692.574.021
Pendapatan Lainnya Pemda			
Pendapatan Penyesuaian Akrual		18.052.883.878	76.324.643.812
Pendapatan Penyesuaian Droning Dana Transfer		-	66.577.367.930.209
BEBAN OPERASIONAL DAN TRANSFER	C.2.1.2	157.712.648.328.977	144.753.039.550.065
A. Beban Operasional			
Beban Pegawai		61.607.616.718.067	55.089.672.789.719
Beban Persediaan		2.469.553.752.471	2.557.263.459.080
Beban Barang dan Jasa		48.309.177.710.878	43.448.812.713.208
Beban Bunga		19.362.539.598	26.910.993.282
Beban Hibah		8.636.508.671.099	7.034.176.325.885
Beban Bantuan Sosial		670.070.745.583	656.980.872.898
Beban Subsidi		8.733.546.326	14.973.092.968
Beban Lain-Lain/Beban Tidak Terduga		19.486.691.343	35.887.025.104
Beban Akrual Lainnya		20.054.771.065.737	19.775.389.840.009
Jumlah Beban Operasional		141.795.281.441.102	128.640.067.112.153
B. Beban Transfer			
Transfer Pempus Ke Daerah Dan Dana Desa		8.385.955.036.640	8.556.924.634.078
Beban Transfer Pemda		7.531.411.851.235	7.556.047.803.834
Jumlah Beban Transfer		15.917.366.887.875	16.112.972.437.912
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional		11.177.330.113.965	76.158.180.367.172
KEGIATAN NON OPERASIONAL	C.2.2	(3.437.573.595.645)	(2.330.778.939.139)
Surplus (Defisit) Pempus Selisih Kurs Belum Terealisasi		3.921.850.203	1.567.013.342
Surplus (Defisit) Pempus Pelepasan Aset Non Lancar		(3.128.695.189.429)	(2.153.084.262.651)
Surplus (Defisit) Pempus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		23.616.299.667	375.838.978.537
Surplus (Defisit) Pemda Penjualan Aset Non Lancar		(184.464.548.019)	(416.166.651.935)
Surplus (Defisit) Pemda Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		11.227.070.000	(1.014.096.933)
Surplus (Defisit) Pemda Kegiatan Non Operasional Lainnya		(163.179.078.067)	(137.919.919.499)
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		7.739.756.518.320	73.827.401.428.033
Pos Luar Biasa		(29.570.343.124)	(46.574.444.260)
Pendapatan Luar Biasa			
Beban Luar Biasa		(29.570.343.124)	(46.574.444.260)
SURPLUS (DEFISIT) LO	C.2.3	7.710.186.175.196	73.780.826.983.773



NERACA LKPK – TW



LKPK & LSKP – TW Audited 2024
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah

NERACA PEMERINTAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 (AUDITED) DAN 2023 (AUDITED)

URAIAN	Indeks	TAHUN 2024	TAHUN 2023
ASET	D.2.1	612.592.793.072.450	599.121.491.196.697
Aset Lancar	D.2.1.1	41.800.491.395.824	39.938.469.295.854
Kas dan Setara Kas		10.541.154.747.248	11.137.277.850.080
Investasi Jangka Pendek		811.361.520.000	789.079.134.000
Belanja dibayar di muka dan uang muka belanja		143.413.460.620	79.795.967.610
Piutang		18.171.798.777.482	17.167.712.813.906
Piutang Pajak		13.807.829.763.706	13.231.421.158.027
Piutang Bukan Pajak		8.192.154.126.275	7.235.307.465.091
Bagian Lancar Tagihan TPA		14.082.615.176	
Piutang Lain Lain		424.648.876.371	357.030.679.266
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		(4.266.916.604.045)	(3.656.046.488.478)
Persediaan		12.132.762.890.474	10.764.603.530.258
Investasi Jangka Panjang	D.2.1.2	18.960.830.425.674	18.447.756.140.767
Investasi Non Permanen		22.058.443.930	181.562.769.784
Investasi Permanen		18.938.771.981.744	18.266.193.370.983
Aset Tetap	D.2.1.3	542.845.362.836.841	528.809.534.127.909
Tanah		335.229.498.440.742	330.261.486.325.695
Peralatan dan Mesin		80.152.663.742.705	73.952.749.653.379
Gedung dan Bangunan		100.647.167.121.578	93.765.624.035.367
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		194.880.953.129.217	181.912.525.400.595
Aset Tetap Lainnya		6.351.891.250.459	6.346.434.072.668
Konstruksi Dalam Pengerjaan		11.338.497.702.504	11.682.268.973.893
Konsensi Jasa		6.558.370.337.438	6.563.507.595.227
Akumulasi Penyusutan		(192.313.678.887.803)	(175.675.061.928.915)
Properti Investasi	D.2.1.4	1.678.653.839.878	1.529.618.469.011
Dana Cadangan	D.2.1.5	127.477.022.428	1.003.137.899.090
Piutang Jangka Panjang	D.2.1.6	41.527.632.253	43.840.349.897
Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi		41.535.765.570	43.846.233.214
Piutang Jangka Panjang Lainnya		88.310.677	92.810.677
Penyisihan Piutang Jangka Panjang		(96.443.994)	(98.693.994)
Aset Lainnya	D.2.1.7	7.138.449.919.552	9.349.134.914.169
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		293.808.330.163	763.113.574.996
Aset Tak Berwujud		1.502.749.376.268	1.283.592.242.857
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya		564.608.907.801	468.566.012.668
Aset Lain-lain		6.939.970.754.192	8.882.937.327.952
Akumulasi Amortasi – Aset Lainnya		(2.162.687.448.872)	(2.049.074.244.304)
KEWAJIBAN	D.2.2	3.846.001.454.305	3.370.399.575.502
Kewajiban Jangka Pendek	D.2.2.1	3.786.131.055.016	3.088.827.911.134
Utang Perhitungan Pihak Ketiga		1.212.806.960	2.682.814.176
Utang Kepada Pihak Ketiga		2.729.414.131.507	2.158.835.577.859
Utang Bunga		550.196.863	1.127.429.767
Utang Transfer		126.244.768.421	9.550.945.975
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		73.290.015.820	112.929.070.900
Utang Yang Belum Ditagihkan		3.216.475.000	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan		392.942.941.875	-
Pendapatan Diterima Dimuka		134.305.849.830	-
Uang Muka dari KPPN		771.837.450	115.969.974
Utang Jangka Pendek Lainnya		324.182.031.290	457.261.890.423
Utang Lainnya		-	346.324.212.060
Kewajiban Jangka Panjang	D.2.2.2	59.870.399.289	281.571.664.368
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri		59.870.399.289	281.571.664.368
EKUITAS	D.2.3	608.746.791.618.145	595.751.091.621.195
Ekuitas		608.746.791.618.145	595.751.091.621.195
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		612.592.793.072.450	599.121.491.196.697



LPE LKPK – TW



LKPK & LSKP – TW Audited 2024
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PEMERINTAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 (AUDITED) DAN 2023 (AUDITED)

URAIAN	INDEK	TAHUN 2024	TAHUN 2023
EKUITAS AWAL	E.1	596.518.186.575.945	587.049.970.639.293
Ekuitas Awal pemerintah Pusat		373.642.929.637.575	368.981.148.004.431
Ekuitas Awal Pemerintah Daerah		222.875.256.938.370	218.068.822.634.862
PENYESUAIAN EKUITAS AWAL			
Penyesuaian Ekuitas		-	-
EKUITAS AWAL SETELAH PENYESUAIAN		596.518.186.575.945	587.049.970.639.293
SURPLUS/DEFISIT LO		7.710.186.175.196	73.780.826.983.773
KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.2	3.448.308.721.292	1.447.421.991.638
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan		-	-
Kesalahan Mendasar		-	-
Penyesuaian Nilai Aset		-	-
Koreksi Nilai Persediaan		-	30.282.200.727
Selisih Revaluasi Aset Tetap		86.495.555.761	(1.525.787.049)
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		2.649.338.039.019	816.257.656.388
Koreksi atas Reklasifikasi Aset		126.660.745.874	8.989.642.876
Koreksi Lain-lain		585.814.380.638	1.447.421.991.638
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.3	1.070.110.145.731	(66.583.835.331.137)
REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE EKUITAS			
Uang Muka dari KPPN		-	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		12.228.605.042.219	8.644.413.644.274
EKUITAS AKHIR	E.4	608.746.791.618.164	595.694.384.283.567



LAK LKPK – TW



LKPK & LSKP – TW Audited 2024
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah

**LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 (AUDITED) DAN 2023 (AUDITED)**

Saat ini SIKRI-MP belum dapat menyajikan Laporan Arus Kas LKPK



LO LSKP – TW



LKPK & LSKP – TW Audited 2024
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah

LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH
 TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 (AUDITED) DAN 2023 (AUDITED)

KODE	AKUN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH	TAHUN 2024	TAHUN 2023
TRANSAKSI YANG MEMPENGARUHI KEKAYAAN BERSIH :			
A1	Pendapatan	152.285.795.214.239	251.016.082.598.069
A11	Pajak	129.234.444.145.337	119.789.891.497.162
A12	Kontribusi Sosial	0	0
A13	Hibah	796.157.030.602	302.107.238.992
A14	Pendapatan Lainnya	22.255.194.038.300	130.924.083.861.915
A2	Beban	130.717.163.115.042	124.353.396.038.171
A21	Kompensasi Pegawai	58.638.639.016.551	54.918.665.001.305
A22	Penggunaan Barang dan Jasa	46.675.445.988.296	40.701.122.301.880
A23	Konsumsi Aset Tetap	0	0
A24	Bunga	16.188.928.617	27.474.958.228
A25	Subsidi	7.072.386.861	13.284.963.148
A26	Hibah	18.150.109.617.614	18.916.703.226.038
A27	Manfaat Sosial	551.872.621.526	619.597.354.466
A28	Beban Lainnya	6.677.834.555.577	9.156.548.233.106
GOB	Saldo Operasi Bruto (1-2+23+NOBz)	21.568.632.099.197	126.662.686.559.898
NOB	Saldo Operasi Neto (1-2+NOBz)	21.568.632.099.197	126.662.686.559.898
TRANSAKSI ASET NON KEUANGAN			
A31	Akuisisi Aset Non Keuangan Neto	26.771.941.567.129	22.901.677.852.634
A311	Aset Tetap	21.062.149.802.128	22.270.657.248.033
A312	Perubahan Persediaan	5.534.911.627.901	-
A313	Barang Berharga	-	-
A314	Aset Non Produksi	174.880.137.100	631.020.604.601
NLB	Saldo Pinjaman / Pinjaman Neto	(5.203.309.467.932)	103.839.744.736.187
TRANSAKSI ASET KEUANGAN DAN KEWAJIBAN (PEMBIAYAAN)			
A32	Akuisisi Aset Keuangan Neto	(5.527.745.506.248)	103.701.903.351.283
A321	Akuisisi Aset Keuangan Dalam Negeri Neto	(5.527.745.506.248)	103.701.903.351.283
A322	Akuisisi Aset Keuangan Luar Negeri Neto	-	-
A33	Keterjadian Kewajiban Neto	(324.436.038.316)	(137.841.384.904)
A331	Keterjadian Kewajiban Dalam Negeri Neto	(324.436.038.316)	(137.841.384.904)
A332	Keterjadian Kewajiban Luar Negeri Neto	-	-
Pemeriksaan Vertikal : Perbedaan antara Saldo Neto Peminjaman/ Pinjaman dengan Pembiayaan (1-2-31=32-33-NLB=0)			



NERACA LSKP – TW



LKPK & LSKP – TW Audited 2024
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah

**NERACA KONSOLIDASIAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH**
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 (AUDITED) DAN 2023 (AUDITED)

KODE	AKUN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH	TAHUN 2024	TAHUN 2023
A6	KEKAYAAN BERSIH	608.746.791.618.145	599.407.236.803.667
A61	Aset Non Keuangan	562.942.185.583.781	549.226.584.788.683
A611	Aset Tetap	215.352.668.553.598	207.953.013.314.426
A6111	Gedung dan Bangunan	186.152.343.442.400	175.815.308.779.900
A6112	Peralatan dan Mesin	18.158.587.228.495	17.762.755.578.525
A6113	Aset Tetap Lainnya	11.041.737.882.703	14.183.784.214.171
A6114	Sistem Persenjataan	-	191.164.741.830
A612	Persediaan	12.132.762.890.474	10.764.603.530.258
A613	Barang Berharga	-	-
A614	Aset Non Produksi	335.456.754.139.708	330.508.967.943.999
A6141	Tanah	335.229.498.440.742	330.261.486.325.695
A6144	Aset Non Produksi Tidak berwujud	227.255.698.966	247.481.618.304
A62	Aset Keuangan	49.650.607.488.669	53.551.051.590.486
A6202	Uang dan Deposito	12.044.590.677.477	12.608.981.761.838
A6203	Surat Berharga Selain Saham	22.069.963.930	970.641.903.784
A6204	Pinjaman	88.310.677	-
A6205	Ekuitas dan Saham Dana Investasi	18.938.771.981.744	18.266.193.370.983
A6208	Piutang Lainnya	18.645.086.554.841	21.705.234.553.881
A621	Aset Keuangan Dalam Negeri	49.650.607.488.669	53.551.051.590.486
A6212	Uang dan Deposito	12.044.590.677.477	12.608.981.761.838
A6213	Surat Berharga Selain Saham	22.069.963.930	970.641.903.784
A6214	Pinjaman	88.310.677	-
A6215	Ekuitas dan Saham Dana Investasi	18.938.771.981.744	18.266.193.370.983
A6218	Piutang Lainnya	18.645.086.554.841	21.705.234.553.881
A622	Aset Keuangan Luar Negeri	-	-
A63	Kewajiban	3.846.001.454.305	3.370.399.575.502
A6303	Surat Berharga Utang	-	471.888.929
A6304	Pinjaman	133.160.415.109	394.028.846.339
A6308	Utang Lainnya	3.712.841.039.196	2.975.898.840.234
A631	Kewajiban Dalam Negeri	3.846.001.454.305	3.370.399.575.502
A6313	Surat Berharga Utang	-	471.888.929
A6314	Pinjaman Dalam Negeri	133.160.415.109	394.028.846.339
A6318	Utang Lainnya Dalam Negeri	3.712.841.039.196	2.975.898.840.234
A632	Kewajiban Luar Negeri	-	-



LAPORAN ARUS EKONOMI LAINNYA



LKPK & LSKP – TW Audited 2024
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah

LKPK DAN LSKP TINGKAT WILAYAH 2024 (AUDITED)
LAPORAN ARUS EKONOMI LAINNYA STATISTIK KEUANGAN
PEMERINTAH UMUM
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 (AUDITED) DAN 2023 (AUDITED)

Saat ini SIKRI-MP belum dapat menyajikan Laporan Arus Ekonomi Lainnya Statistik Keuangan Pemerintah Umum



LAPORAN SUMBER DAN PENGUNAAN KAS



LKPK & LSKP – TW Audited 2024
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN KAS STATISTIK KEUANGAN
PEMERINTAH UMUM

TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 (AUDITED) DAN 2023 (AUDITED)

KODE	AKUN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH	TAHUN 2024	TAHUN 2023
C1	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	225.774.478.003.455	237.146.054.468.049
C11	Pajak	84.696.589.662.483	150.129.305.868.604
C12	Kontribusi Sosial	-	-
C13	Hibah	796.157.030.602	302.107.238.992
C14	Penerimaan Lainnya	140.281.731.310.370	86.714.641.360.453
C2	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	106.228.344.720.239	54.703.384.420.364
C21	Kompensasi Pegawai	61.294.819.159.511	54.918.665.001.305
C22	Pembelian Barang dan Jasa	46.604.255.875.332	-
C23	Konsumsi Aset Tetap	-	-
C24	Bunga	16.188.928.617	27.474.958.228
C25	Subsidi	7.072.386.861	13.284.963.148
C26	Hibah	(10.384.573.124.074)	(10.032.186.089.889)
C27	Manfaat Sosial	551.872.621.526	619.597.354.466
C28	Pembayaran Lainnya	8.138.708.872.466	9.156.548.233.106
CIO	Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi (C1 - C2)	119.546.133.283.216	182.442.670.047.685
C31.1	Pembelian Aset Non Keuangan	20.460.829.221.438	25.373.463.863.510
C311.1	Aset Tetap	20.284.864.321.018	24.742.443.258.909
C312.1	Persediaan untuk Tujuan Strategis	-	-
C313.1	Barang Berharga	-	-
C314.1	Aset Non Produksi	175.964.900.420	631.020.604.601
C31.2	Penjualan Aset Non Keuangan	65.538.461.033	88.181.342.871
C311.2	Aset Tetap	65.538.461.033	88.181.342.871
C312.2	Persediaan untuk Tujuan Strategis	-	-
C313.2	Barang Berharga	-	-
C314.2	Aset Non Produksi	-	-
C31	Arus Kas Keluar Neto : Investasi pada Aset Non Keuangan (C31.1 - C31.2)	20.395.290.760.405	25.285.282.520.639
CSD	Surplus / Defisit Kas (C1 - C2 - C31)	99.150.842.522.811	207.727.952.568.324
C32x	Akuisisi Aset Keuangan Neto selain Kas	205.836.579.454	265.409.096.911
C321x	Domestik	205.836.579.454	265.409.096.911
C322x	Luar Negeri	-	-
C33	Keterjadian Kewajiban Neto	(324.436.038.316)	(137.841.384.904)
C331	Domestik	(324.436.038.316)	(137.841.384.904)
C332	Luar Negeri	-	-
NFB	Arus Kas Neto dari Aktivitas Pembiayaan (-C32x+C33)	530.272.617.770	(403.250.481.815)
NCB	Perubahan Kas Neto (CSD-C32+C33)	112.568.543.607.113	127.567.712.007
Vertical check: Difference between cash surplus/deficit and total net cash inflow from financial activities		(12.887.428.466.532)	207.600.384.856.317



METADATA LSKP - TW



LKPK & LSKP – TW Audited 2024
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah

METADATA

Informasi Dasar

1. Nama Data : Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Tingkat Wilayah (LSKP-TW) Tahun 2024 (*Audited*)
2. Penyelenggara : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Direktorat Statistik Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI
3. Alamat : Gedung Keuangan Negara I Jalan Pemuda Nomor 2 Semarang
4. Nomor Telepon : 024-3540815
5. Nomor Faksimili : 024-3545877
6. Email : asplkjateng@gmail.com

Definisi Data

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah merupakan laporan statistik keuangan yang secara komprehensif menyajikan data aktivitas ekonomi dan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah selama satu periode berdasarkan klasifikasi statistik keuangan pemerintah yang sejalan dengan standar internasional yang digunakan dalam menyusun laporan ekonomi dan statistik seperti Sistem Neraca Nasional (*System of National Accounting-SNA*), Manual Neraca Pembayaran (*The Balance of Payments manual*), Manual Statistik Moneter dan Keuangan (*The Monetary and Financial Statistics Manual*).

LSKP-TW Tahun 2024 (*Audited*) ini merupakan konsolidasi dari kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LSKPP-TW) dan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LSKPDK-TW). Entitas pelaporan yang dicakup dalam laporan ini adalah entitas Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan seluruh Pemerintah Daerah.

LSKP-TW yang disusun terdiri dari:

1. Neraca Statistik Keuangan Pemerintahan;
2. Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintahan;
3. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintahan;
4. Metadata.

Cakupan Data

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah meliputi:

1. Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah yang merupakan hasil konsolidasi Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.

2. Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah yang merupakan hasil konsolidasi Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.
3. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Tingkat Wilayah yang merupakan hasil konsolidasian Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah dengan Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.

Periodisasi Publikasi

Tahunan

Waktu Publikasi

Data Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah periode Tahun 2024 (*Audited*) diterbitkan tanggal 31 Agustus tahun berikutnya.

Status Data

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah tahun 2024 ini seluruhnya telah disusun menggunakan data laporan keuangan yang telah diaudit.

Sumber Data

1. Kertas kerja LSKPP-TW dan kertas kerja LSKPDK-TW.
2. Kertas kerja LKPP-TW dan kertas kerja LKPDK-TW.
3. Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Kementerian Negara/Lembaga.
4. Laporan Keuangan Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKKBUN) Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
5. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Metodologi

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah disusun dengan mengkonsolidasikan kertas kerja LSKPP-TW dan kertas kerja LSKPDK-TW. Untuk LSKPP-TW dan LSKPDK-TW disusun dengan melakukan *mapping* BAS detail kertas kerja LKPP-TW dan kertas kerja LKPDK-TW ke dalam *GFS classification assistant* melalui SPAN SIKRI Modul Pelaporan yang menyediakan kerangka *mapping* masing-masing akun BAS detail ke dalam BAS Statistik Keuangan Pemerintah.

LSKP-TW disusun melalui tiga tahapan, yaitu:

1. Penyusunan kertas kerja LSKPP-TW melalui *mapping* BAS detail data LKPP-TW;
2. Penyusunan kertas kerja LSKPDK-TW melalui *mapping* BAS detail data LKPDK-TW;

3. Konsolidasi kertas kerja LSKPP-TW dengan kertas kerja LSKPDK-TW menjadi LSKP-TW.

Integritas Data

1. Data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat menggunakan data per 31 Desember 2024 (*Audited*) yang berasal 1.169 UAKPA yang menjadi mitra kerja seluruh KPPN pada lingkup kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah serta data Laporan Keuangan Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKKBUN) Kantor Wilayah. Data keuangan Pemerintah Pusat dilakukan *split* oleh Kantor Pusat DJPb sehingga secara otomatis telah tersedia pada aplikasi SPAN SIKRI MP.
2. Data Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2024 dilakukan proses konsolidasi terhadap 36 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Jawa Tengah. Proses ini dilakukan melalui input data keuangan dilanjutkan dengan proses unggah WebADI ke dalam aplikasi SPAN SIKRI Modul Pelaporan. Pada periode ini seluruh data keuangan 36 LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Tengah dapat diperoleh dan telah dilakukan proses konsolidasi dengan kondisi sebagai berikut:
 - a) Data keuangan yang digunakan adalah data keuangan yang menjadi satu bagian dengan LHP LKPD BPK tahun 2024.
 - b) Face laporan untuk Neraca, LO, dan LRA pada LHP LKPD Audited 2024 dari BPK menyajikan sampai dengan level 3, sehingga untuk mendapatkan detail rincian akun sampai dengan level 5 dilakukan penelusuran melalui CaLK untuk mendapatkan informasi akun yang lebih detail sesuai kebutuhan kertas kerja.
 - c) Atas konsolidasi kertas kerja yang datanya bersumber dari LHP LKPD Audited 2024 ditemui beberapa kondisi antara lain:
 - 1) Ketidaksesuaian antara jumlah pada face dengan jumlah rincian per akun;
 - 2) CaLK hanya menyajikan rincian per OPD tanpa adanya rincian per akun;
 - 3) CaLK kurang menyajikan informasi rincian akun secara detail sampai dengan level 5.Atas kondisi tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Konfirmasi dan meminta rincian laporan keuangan (s.d. level 5) kepada pemda terkait;
 - b. Melakukan pengecekan dan perbandingan dengan LHP LKPD 2024 Audited dari BPK;
 - c. Memastikan data keuangan yang direkam pada kertas kerja merupakan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Data keuangan untuk konsolidasi LRA per fungsi/urusan tidak disajikan dalam LHP LKPD 2024 Audited, oleh karena itu Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah menyampaikan permintaan kebutuhan data dimaksud kepada seluruh pemerintah daerah di wilayah Jawa Tengah.

4. Proses konsolidasi data keuangan pemda menggunakan kertas kerja excell versi 25.0 yang terdiri dari:
 - Kertas kerja LRA LKPKD
 - Kertas kerja Neraca,LO,LPE LKPKD
 - Kertas kerja eliminasi LKPK
5. Dalam proses sebagaimana dimaksud pada butir 4, perlu dilakukan beberapa penyesuaian dikarenakan kertas kerja versi 25.0 ini belum sepenuhnya mengakomodir pemutakhiran BAS Permendagri, diantaranya;
 - a) Belum tersedianya akun Properti Investasi (PI) pada kertas kerja Neraca, sehingga PI disajikan melalui penggabungan ke dalam akun aset tetap sesuai masing-masing jenis PI.
 - b) Belum tersedianya akun akumulasi penyusutan PI pada kertas kerja Neraca, sehingga akumulasi penyusutan PI disajikan dengan menggabungkan kedalam akun akumulasi penyusutan aset tetap sesuai masing-masing jenis PI.
 - c) Belum tersedianya akun Treasury Deposit Facility (TDF) pada kertas kerja Neraca, sehingga TDF disajikan dengan menggabungkan akun aset lain-lain.
 - d) Pengelompokan akun pada LKPD tidak sama dengan kelompok akun pada LRA
 - e) Akun rambu-rambu pada LKPD masuk kedalam Gedung dan bangunan namun pada LRA disajikan kedalam peralatan dan mesin.
6. Eliminasi transaksi akun resiprokal yang dilakukan pada kertas kerja audited 2024 antara lain:
 - a) Pada Kertas Kerja LRA :
 - Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi dieliminasi dengan pendapatan bagi hasil Pajak Kab/Kota.
 - Bantuan Keuangan ke Kab/Kota lainnya dieliminasi dengan bantuan keuangan dari pemprov lainnya.
 - b) Pada kertas kerja Neraca :
 - Utang transfer pemerintah daerah lainnya dilakukan eliminasi dengan piutang transfer pemerintah daerah lainnya
 - c) Pada kertas kerja LO :
 - Beban transfer bagi hasil pajak daerah Provinsi dieliminasi dengan pendapatan bagi hasil pajak kab/kota
 - Beban transfer bantuan keuangan ke kab/kota dieliminasi dengan bantuan keuangan dari pemda provinsi lainnya
 - Beban hibah kepada pemda lainnya dieliminasi dengan pendapatan hibah dari pemda lainnya
7. Pemuktahiran data dilakukan pada publikasi berikutnya apabila ditemukan kekeliruan data.

Akses Data

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah dapat diperoleh pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Gedung Keuangan Negara I Lantai 3, Jalan Pemuda

Nomor 2, Semarang. Sedangkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Tingkat Nasional dapat diperoleh pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2, Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta Pusat.

Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik
Bayu Andy Prasetya



CALK LKPK – TW



LKPK & LSKP – TW Audited 2024
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Daerah yang mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 275/PMK.05/2014 tentang Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia.
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.05/2018 tentang Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.05/2018 tentang Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum
15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
16. Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor ND-664/PB.6/2025 tanggal 15 Agustus 2025 Hal Penyampaian LKPK-TW dan LSKP-TW Periode Audited 2024.

A. 2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian (Lampiran II PP 71 tahun 2010) menyatakan laporan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu laporan tunggal. Pernyataan ini selanjutnya akan menjadi dasar proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi.

Sesuai dengan PSAP Nomor 11, konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan yang dicakup dalam laporan keuangan konsolidasian ini adalah kementerian negara/lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pemerintah Daerah.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LP SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Ruang lingkup laporan konsolidasi ini meliputi LRA Konsolidasian, LO Konsolidasian, LPE Konsolidasian, Neraca Konsolidasian, LAK Konsolidasian dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian meliputi tiga tahap, yaitu:

1) **Konsolidasi Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat Kantor Wilayah (UAKKBUN-Kanwil)**

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tingkat Wilayah Tahun 2024 (*Audited*) mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Pusat di wilayah Jawa Tengah, yang terdiri dari Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga, beserta jenjang struktural di bawahnya seperti satuan kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya termasuk satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dan satuan kerja pengguna dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. LKPP Tingkat Wilayah tidak mencakup entitas Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). LKPP Tingkat Wilayah mencakup transaksi-transaksi keuangan di tingkat wilayah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk dana APBN yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yaitu dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan.

LKPP Tingkat Wilayah disusun untuk tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK TW), serta Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (LSKP TW). LKPP Tingkat Wilayah tidak disusun untuk tujuan pertanggungjawaban.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 217/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, LKPP dihasilkan melalui SAPP, yang terdiri dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (SABUN) dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI).

SAI diselenggarakan oleh kementerian negara/lembaga secara berjenjang mulai dari tingkat Satker (Kuasa Pengguna Anggaran) sampai tingkat kementerian negara/lembaga (Pengguna Anggaran), untuk menghasilkan Laporan Keuangan. SAI meliputi a) akuntansi dan pelaporan keuangan dan b) akuntansi dan pelaporan BMN. SAI memproses data transaksi keuangan dan transaksi barang dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi untuk menghasilkan Laporan Keuangan dan laporan barang pada Kementerian Negara/Lembaga.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara untuk menghasilkan Laporan Keuangan BUN (SA-BUN). SA-BUN terdiri dari beberapa sub sistem, yaitu Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah (SAUP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (SIKUBAH), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penerusan Pinjaman (SAPPP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah (SATD), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (SABS), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-lain (SABL), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya (SAPBL) dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (SATK).

SAPP dirancang untuk menghasilkan LKPP, namun saat ini belum mengakomodasikan LKPP Tingkat Wilayah. LKPP Tingkat Wilayah disusun untuk tujuan penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah, serta Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah. LKPP Tingkat Wilayah tidak disusun untuk tujuan pertanggungjawaban. LKPP tingkat wilayah disusun melalui konsolidasi Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN Tingkat Kanwil dengan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

LKPP tingkat wilayah terdiri dari :

1. **Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah**
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat tingkat wilayah disusun berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tingkat UAKPA. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja tingkat wilayah terdiri dari:

- a. Angka realisasi Pendapatan dan Hibah tingkat wilayah yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja tingkat wilayah berdasarkan data penerimaan kas yang dilaporkan oleh UAKPA atas seluruh penerimaan uang yang riil masuk ke Kas Negara di wilayah. Data realisasi Pendapatan dan Hibah yang dilaporkan UAKPA direkonsiliasi dengan data Kuasa BUN.
- b. Angka realisasi Belanja Negara yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja tingkat wilayah berdasarkan kompilasi realisasi belanja yang dilaporkan oleh UAKPA, di mana kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab penuh atas seluruh pengeluaran yang dibelanjakannya. Apabila proses rekonsiliasi antara KPPN dengan satker selaku UAKPA dilaksanakan dengan baik, angka yang dilaporkan oleh UAKPA akan sama dengan angka yang dilaporkan oleh Kanwil sebagai Kuasa BUN.
Apabila masih terdapat angka suspen, yaitu selisih antara angka UAKPA dan Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara, maka angka realisasi belanja wilayah dapat menggunakan data realisasi pengeluaran yang dikelola oleh Kuasa BUN (data SiAP). Angka tersebut berfungsi sebagai penguji (kontrol) data belanja UAKPA. Hal ini dimungkinkan karena LKPP wilayah disusun dalam rangka penyusunan laporan statistik keuangan pemerintah, bukan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban. Pemilihan penggunaan data SiAP untuk belanja dilakukan dengan pertimbangan angka suspen yang terkecil.
- c. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja tingkat wilayah tidak menyajikan angka realisasi Pembiayaan karena transaksi pembiayaan tidak dilakukan di wilayah, melainkan hanya dilakukan oleh BUN Pusat.

2. Laporan Operasional

Laporan Operasional Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah disusun berdasarkan hasil konsolidasi Laporan Operasional Anggaran Tingkat UAKPA di wilayah. Khusus data beban transfer yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Insentif Daerah, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Otonomi Khusus disusun dengan menggunakan data Bagian Anggaran 999.05.

3. Neraca Pemerintah Pusat tingkat Wilayah

Neraca Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah disusun berdasarkan konsolidasi Neraca tingkat UAKPA dan Neraca tingkat Kuasa BUN. Perlakuan konsolidasi atas Neraca tingkat UAKPA dan Neraca Tingkat Kuasa BUN adalah sebagai berikut:

- a. Kas dan Bank meliputi Kas di KPPN, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya dan Setara Kas dan Kas pada BLU;
- b. Angka Kas di KPPN diambil dari Neraca Tingkat Kuasa BUN. Angka Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya dan Setara Kas, dan Kas pada BLU diambil dari Neraca Tingkat UAKPA. Rekening Kas di KPPN, Kas di Bendaharan Pengeluaran,

- Kas dan Kas Lainnya berupa hibah langsung yang telah disahkan ke KPPN dan Kas pada BLU yang telah disahkan ke KPPN disajikan dengan akun pasangan berupa Ekuitas;
- c. Utang Perhitungan Pihak Ketiga, diambil dari Neraca Tingkat Kuasa BUN, disajikan dengan akun pasangan berupa Ekuitas;
 - d. Utang kepada Pihak Ketiga, diambil dari Neraca UAKPA, disajikan dengan akun pasangan Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek;
 - e. Kas pada Bendahara Penerimaan disajikan dengan akun pasangan Pendapatan yang Ditangguhkan;
 - f. Kas dan Kas Lainnya berupa hibah langsung berbentuk kas yang belum disahkan ke KPPN disajikan dengan akun pasangan Pendapatan yang Ditangguhkan;
 - g. Kas pada BLU yang belum disahkan ke KPPN disajikan dengan akun pasangan Ekuitas;
 - h. Piutang, Investasi Jangka Pendek, Persediaan, Aset Tetap dan Aset Lainnya, serta akun pasangan masing-masing sebagaimana yang diatur dalam jurnal standar, didasarkan pada Neraca UAPPA-W.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah menyajikan informasi yang berkaitan dengan saldo awal ekuitas, kenaikan/penurunan ekuitas dan saldo akhir ekuitas pada tahun berjalan yang nantinya akan disajikan di neraca. Saldo awal ekuitas berasal dari saldo akhir ekuitas pada Neraca LKPP-TW tahun sebelumnya. Kenaikan/penurunan ekuitas disajikan berdasarkan hasil konsolidasi data UAKPA di wilayah.

5. Laporan Arus Kas Tingkat Wilayah

Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN tingkat wilayah. Laporan Arus Kas mencakup data penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening Kas Negara KPPN, termasuk transaksi pendapatan dan belanja operasional pada BLU. Laporan Arus Kas disusun dengan menggunakan SiAP.

6. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang analisis makro ekonomi, pendekatan penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LKPP Tingkat Wilayah, serta informasi penting lainnya dalam rangka pengungkapan yang memadai.

2) Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

LKPD merupakan laporan keuangan yang dihasilkan dari entitas-entitas pelaporan yang independen satu terhadap yang lainnya. Lingkup penyajian laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah ini mencakup LRA Konsolidasian, LP SAL Konsolidasian, Neraca Konsolidasian, LO Konsolidasian, LPE Konsolidasian, LAK Konsolidasian, dan Catatan atas LKPD Konsolidasian.

Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2024 (*Audited*), proses konsolidasi dilakukan terhadap 36 LKPD.

Dengan penyajian dimaksud, laporan konsolidasi menunjukkan aliran dana yang masuk ke sektor pemerintahan baik yang berasal dari transfer pemerintah pusat maupun yang dihasilkan sendiri oleh pemerintah daerah di wilayah yang bersangkutan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Laporan konsolidasi juga menunjukkan dana yang dibelanjakan oleh masing-masing pemda.

Dalam rangka penyajian dini, laporan konsolidasi akan dimulai dengan status sementara. Artinya LKPD yang digunakan sebagai sumber data belum seluruhnya diaudit. Laporan konsolidasi bersifat permanen jika seluruh komponen laporan keuangan berstatus *audited*.

Proses konsolidasi dilakukan dengan kebijakan sebagai berikut:

a. Penggabungan (Aggregasi)

Konsolidasi dilakukan dengan menjumlahkan akun yang sama pada LKPD Provinsi dengan LKPD seluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi.

b. Eliminasi Akun Resiprokal

Eliminasi akun resiprokal antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota atau antar Pemerintah Kabupaten/Kota. Akun resiprokal adalah akun yang terjadi akibat transaksi antar entitas pelaporan. Eliminasi resiprokal dilakukan menggunakan angka yang sama pada entitas yang dikonsolidasi.

c. Kebijakan Eliminasi Akun Resiprokal yang Tidak Sama Jumlahnya

Perbedaan kebijakan akuntansi, perbedaan waktu pencatatan atau karena kesalahan pencatatan dapat menyebabkan akun resiprokal dengan jumlah yang tidak sama antar entitas yang dikonsolidasi. Dalam hal terdapat perbedaan angka antara akun resiprokal eliminasi dilakukan menggunakan satu angka yang sama pada entitas yang dikonsolidasi. Kebijakan eliminasi dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Mengeliminasi akun timbal balik berdasarkan angka pada LKPD Provinsi
- 2) Jika akun tandingan yang ada pada LKPD Kabupaten/Kota lebih kecil daripada angka yang ada pada LKPD Provinsi maka dilakukan penyesuaian jumlah dengan mengurangi akun yang paling dekat dalam skala resiprokal.
- 3) Dalam hal jumlah akun skala resiprokal dan akun resiprokal pada LKPD Kabupaten/Kota tidak mencukupi maka jumlah yang dieliminasi adalah maksimal sebesar jumlah akun skala resiprokal dan resiprokal Pemerintah Kabupaten/Kota.

3) Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tingkat Wilayah dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Penyusunan Laporan keuangan konsolidasi antara LKPP Tingkat Wilayah dengan LKPD merupakan inisiasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Tujuan utama dalam penyajian Laporan Keuangan

Konsolidasian adalah dalam rangka memenuhi kewajiban transparansi fiskal oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional yang dilaksanakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah. Sesuai lingkup yang disebutkan di atas, maka melalui Laporan Keuangan Konsolidasian ini dapat dilihat peran pemerintah pusat dan daerah terhadap perekonomian wilayah yang bersangkutan. Guna mencapai tujuan tersebut, pendekatan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian ini dibuat dengan menyajikan pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas per wilayah yang merupakan komponen utama yang mencerminkan kondisi fiskal daerah dari sektor pemerintahan.

LKPK Tingkat Wilayah merupakan laporan keuangan yang dihasilkan dari entitas-entitas pelaporan yang independen satu terhadap yang lainnya. Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah tidak dimaksudkan untuk tujuan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, tetapi lebih pada tujuan transparansi fiskal. Tanggung jawab atas nilai dari masing-masing unsur laporan keuangan yang dikonsolidasikan tetap berada pada masing-masing entitas pelaporan. Sesuai dengan PSAP nomor 11, konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik (*reciprocal accounts*).

Kebijakan proses konsolidasi dalam penyusunan LKPK Tingkat Wilayah meliputi:

a. Penggabungan (Aggregasi)

Konsolidasi dilakukan dengan menjumlahkan akun yang sama pada LKPP Tingkat Wilayah dengan LKPDK Tingkat Wilayah.

b. Eliminasi Akun Resiprokal

Eliminasi akun resiprokal antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Eliminasi resiprokal dilakukan menggunakan angka yang sama pada entitas yang dikonsolidasi baik pada LKPP Tingkat Wilayah maupun LKPDK Tingkat Wilayah.

c. Kebijakan Eliminasi Akun Resiprokal yang Tidak Sama

Dalam hal terdapat perbedaan angka antara akun resiprokal eliminasi dilakukan menggunakan satu angka yang sama yaitu menggunakan angka yang ada pada Pemerintah Pusat. Jika angka tandingan pada LKPDK lebih besar/lebih kecil maka dapat dilakukan penyesuaian dengan menambah atau mengurangi pos-pos yang memiliki keterkaitan paling dekat dalam skala resiprokal. Dalam hal jumlah akun skala resiprokal dan resiprokal pada LKPDK tidak mencukupi maka jumlah yang dieliminasi maksimal sebesar jumlah akun skala resiprokal dan resiprokal pada LKPDK.

Laporan Keuangan Konsolidasian tahun 2023 (*Audited*) mencakup :

a. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah

LRA Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah disusun berdasarkan hasil konsolidasi antara LRA kertas kerja LKPK-TW dengan LRA kertas kerja LKPKD-TW. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun LRA Pemerintah Konsolidasian adalah sebagai berikut :

1) Melakukan identifikasi transaksi dan akun yang sejenis untuk dijumlahkan

Akun pendapatan dan akun belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan transaksi sejenis dikonsolidasikan dengan cara menjumlahkan angka pada kertas kerja LKPP-TW dengan angka pada kertas kerja LKPKD-TW. Jika terdapat perbedaan dalam klasifikasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka atas perbedaan tersebut diselesaikan dengan melakukan konversi dan *mapping* antara akun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. *Mapping* penyusunan LRA LKPK-TW dan perlakuan terhadap akun-akun tersebut dapat dilihat pada Lampiran 20.

2) Melakukan identifikasi akun resiprokal untuk dieliminasi

Eliminasi dilakukan terhadap akun resiprokal pada kertas kerja LKPP-TW dengan kertas kerja LKPKD-TW, yaitu akun yang terjadi akibat transaksi resiprokal antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Eliminasi akun resiprokal menggunakan angka yang sama pada entitas yang dikonsolidasi. Jika angka akun resiprokal antara kertas kerja LKPP-TW dan kertas kerja LKPKD-TW tidak sama, maka eliminasi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) Mengeliminasi akun resiprokal menggunakan angka kertas kerja LKPP-TW;
- b) Jika akun tandinggannya yang ada pada kertas kerja LKPKD-TW kurang dari angka yang ada pada kertas kerja LKPP-TW maka dilakukan penyesuaian jumlahnya dengan mengurangi akun yang paling dekat dalam skala resiprokal.
- c) Dalam hal jumlah akun resiprokal dan akun skala resiprokal pada LKPKD-TW tidak mencukupi, maka jumlah yang dieliminasi maksimal sebesar jumlah akun resiprokal dan skala resiprokal pada LKPKD-TW.

b. LO Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah

LO Pemerintah Konsolidasian disusun berdasarkan hasil konsolidasi antara LO LKPK-TW dengan LO LKPKD-TW. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun LRA Pemerintah Konsolidasian adalah sebagai berikut :

1) Melakukan identifikasi transaksi dan akun yang sejenis untuk dijumlahkan

Pendapatan LO dan Beban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan akun sejenis dapat dijumlahkan. Walaupun masih terdapat perbedaan BAS Pendapatan LO dan Beban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perbedaan tersebut diatasi melalui konversi dan *mapping*. *Mapping* penyusunan LO LKPK-TW dan perlakuan terhadap akun-akun tersebut dapat dilihat pada Lampiran 21.

2) Melakukan identifikasi akun resiprokal untuk dieliminasi

Eliminasi dilakukan terhadap akun resiprokal pada LO LKPK-TW yang merupakan akun yang terjadi akibat transaksi antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendekatan eliminasi yang diambil pada penyusunan Laporan Operasional Konsolidasi Pemerintah Tingkat Wilayah menggunakan pendekatan yang sama dengan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasi Pemerintah Tingkat Wilayah.

c. Neraca Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah

Neraca Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah disusun berdasarkan konsolidasi terhadap 1262 UAKPA Kementerian/Lembaga dan 36 Neraca Pemerintah Daerah yang ada di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. Proses penyusunan dilakukan berdasarkan konsolidasi antara Neraca kertas kerja LKPP-TW dengan Neraca kertas kerja LKPKD-TW.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan Neraca Konsolidasian adalah sebagai berikut:

1) Melakukan identifikasi transaksi dan akun yang sejenis untuk dijumlahkan

Secara umum, aset dan kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan transaksi yang sejenis sehingga akun aset Pemerintah Pusat dapat dijumlahkan dengan akun aset Pemerintah Daerah, dan akun kewajiban Pemerintah Pusat dapat dijumlahkan dengan akun kewajiban Pemerintah Daerah. *Mapping* penyusunan Neraca Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan perlakuan terhadap akun-akun tersebut dapat dilihat pada Lampiran 22.

2) Melakukan identifikasi resiprokal untuk dieliminasi

Eliminasi dilakukan terhadap akun timbal balik pada Neraca LKPK-TW, yang berupa akun aset dan kewajiban yang terjadi karena transaksi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antara lain seperti akun utang dan piutang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Eliminasi akun timbal balik menggunakan angka yang sama pada entitas yang dikonsolidasi.

d. LPE Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah

LPE Pemerintah Konsolidasian menyajikan konsolidasi saldo awal ekuitas, kenaikan/penurunan ekuitas dan saldo akhir ekuitas pada tahun berjalan yang berasal dari data Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. LPE Pemerintah Konsolidasian disusun berdasarkan hasil konsolidasi antara LPE kertas kerja LKPP-TW dengan LPE kertas kerja LKPKD-TW.

Secara umum pos-pos yang disajikan pada LPE Pemerintah Pusat dan LPE Pemerintah Daerah adalah sejenis sehingga proses konsolidasi dilakukan dengan menjumlahkan (agregasi) akun pada LPE Pemerintah Pusat dan LPE Pemerintah Daerah yang meliputi Ekuitas awal, Surplus/Defisit LO, Koreksi yang Menambah/Mengurangi, Transaksi antar Ekuitas, Keuntungan/Kerugian yang Belum Terealisasi, koreksi karena *double* Pencatatan, Reklasifikasi Kewajiban Ke Ekuitas, dan Ekuitas Akhir. Saldo akhir ekuitas pada LPE akan disajikan sebagai nilai ekuitas pada Neraca Konsolidasian. Kebijakan Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dapat dilihat pada Lampiran 23.

e. LAK Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah

Angka yang dikonsolidasikan dalam LAK Konsolidasian ini adalah angka arus kas baik untuk LAK Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah maupun untuk LAK Pemerintah Daerah. Kebijakan Penyusunan Laporan Arus Kas Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah diatur dalam Perdirjen Nomor 34 Tahun 2018.

f. Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan penjelasan atas penyajian angka pada lembar muka LKPK_TW dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan menyediakan pemahaman yang lebih baik terhadap LKPK-TW. Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO, LPE dan LAK.

Dalam rangka pengungkapan yang memadai, Catatan Atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penjelasan umum tentang LKPK-TW yang meliputi:
 - a) Dasar Hukum Penyusunan LKPK-TW
 - b) Pendekatan Penyusunan LKPK-TW
 - c) Sumber, cakupan dan status data
- 2) Penjelasan tentang kebijakan akuntansi dan eliminasi akun resiprokal, antara lain transaksi Transfer dan Pendapatan Transfer, Hibah, serta Utang dan Piutang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
- 3) Penjelasan rinci mengenai LRA LKPK-TW yang meliputi:
 - a) Pendapatan Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan jenis pendapatan dan lokasi kabupaten/kota disertai ilustrasi tabel dan grafik
 - b) Belanja Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan jenis belanja, lokasi kabupaten/kota, dan fungsi disertai dengan ilustrasi tabel dan grafik
- 4) Penjelasan rinci mengenai LRA Pemerintah Konsolidasian, Neraca Pemerintah Konsolidasian, Laporan Operasional Pemerintah Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Konsolidasian dan Laporan Arus Kas Pemerintah Konsolidasian.
- 5) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan

A.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN ELIMINASI TIMBAL BALIK

LRA Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara/Daerah (KUN/D) atau dikeluarkan dari (KUN/D). LO Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah disusun dengan menggunakan basis akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat terjadinya transaksi walaupun kas atau setara kas belum

diterima pada KUN/D atau dikeluarkan dari KUN/D. Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN/D.

Penyusunan dan penyajian LKPP Tingkat Wilayah Tahun 2023 *Audited* telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (lampiran I). Penyusunan dan penyajian LKPD Konsolidasian Tahun 2023 *Audited* mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (lampiran I) melalui Buletin Teknis Nomor 3 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai dengan SAP dengan Konversi.

Dengan demikian, dalam penyusunan LKPP Tingkat Wilayah dan LKPD telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPP dan LKPD adalah:

a. Pendapatan LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan KUN/D yang menambah ekuitas dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat/daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat/daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN/D. Akuntansi pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

b. Pendapatan LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan diakui pada saat pemerintah mempunyai hak melakukan penagihan walaupun kas atau setara kas belum diterima pada KUN/D. Akuntansi pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

c. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN/D yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat/daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN/D. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pada pemerintah pusat, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja disajikan pada tampilan muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja sedangkan pada CaLK, belanja disajikan menurut fungsi.

d. Beban

Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diakui pada saat kewajiban timbul walaupun kas atau setara kas belum dikeluarkan dari KUN/D. Beban disajikan pada tampilan muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

e. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

f. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

g. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

h. Bagan Akun Standar

Diperlukan adanya suatu klasifikasi dalam sistem yang dijabarkan dalam Bagan Akun Standar (Chart of Accounts). BAS antara lain mencakup kode perkiraan buku besar akuntansi. Kode perkiraan tersebut terdiri dari kumpulan akun nominal dan akun riil secara lengkap. Kumpulan akun tersebut digunakan di dalam pembuatan jurnal, buku besar, neraca lajur, neraca percobaan, dan laporan keuangan. BAS merupakan tools untuk mensinkronkan proses perencanaan dan penganggaran dengan proses akuntansi dan pelaporan. Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, dibedakan

antara BAS untuk pemerintah pusat, BAS untuk pemerintah daerah, dan BAS Nasional untuk tujuan konsolidasi akuntansi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Panduan penyusunan BAS pada PMK ini untuk pemerintah pusat maupun untuk pemerintah daerah dicantumkan sampai dengan level 3, sedangkan untuk pengembangan lebih detilnya, BAS untuk pemerintah pusat ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan untuk pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Kebijakan eliminasi akun timbal balik/resiprokal yang diterapkan dalam laporan keuangan konsolidasian ini adalah:

a. **Eliminasi Akun Timbal Balik /resiprokal**

Akun timbal balik adalah akun yang terjadi akibat transaksi antar entitas pelaporan, dalam hal ini antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Eliminasi akun timbal balik dilakukan menggunakan angka yang sama pada entitas yang dikonsolidasi baik pada kertas kerja LKPP-TW maupun kertas kerja LKPKD-TW.

b. **Eliminasi Akun Timbal Balik Yang Tidak Sama**

Dalam hal terdapat perbedaan angka antara akun resiprokal eliminasi dilakukan menggunakan satu angka yang sama yaitu menggunakan angka yang ada pada Pemerintah Pusat. Jika angka tandingan pada LKPKD lebih besar/lebih kecil maka dapat dilakukan penyesuaian dengan menambah atau mengurangi pos-pos yang memiliki keterkaitan paling dekat dalam skala resiprokal. Dalam hal jumlah akun skala resiprokal dan resiprokal pada LKPKD tidak mencukupi maka jumlah yang dieliminasi maksimal sebesar jumlah akun skala resiprokal dan resiprokal pada LKPKD.

A.4 KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO TINGKAT WILAYAH TAHUN 2024

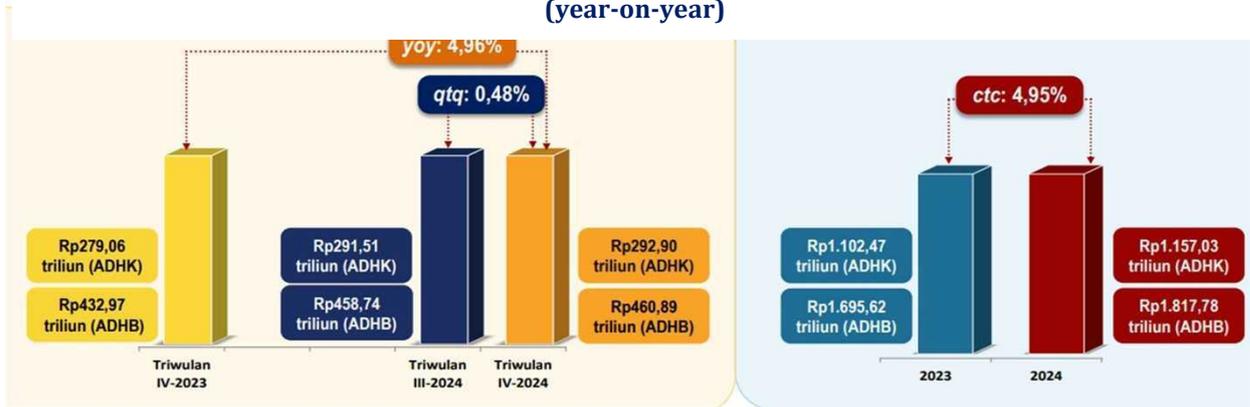
Perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2024 tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 4,95%, sedikit melambat dibandingkan capaian pada tahun 2023 yang tumbuh 4,97%. Periode Triwulan IV-2024 tumbuh sebesar 4,96% (*year-on-year*). Sementara itu, dibandingkan dengan Triwulan III-2024 (*quarter-to-quarter*), perekonomian Jawa Tengah pada Triwulan IV-2024 tumbuh sebesar 0,48%.

Berdasarkan data ALCo Regional Jawa Tengah bulan Desember 2024, pertumbuhan ekonomi yang sedikit menurun, diiringi beberapa indikator ekonomi makro, diantaranya tingkat kemiskinan September 2024 sebesar 9,84% turun dibanding Maret 2024 sebesar 10,57%, rasio Gini per September 2024 sebesar 0,364 turun dibandingkan Maret 2024 sebesar 0,367, serta tingkat pengangguran Jawa Tengah per Agustus 2024 sebesar 4,78%.

Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah pada tahun 2024 sejumlah Rp1.817,7 triliun, dengan sektor dengan kontribusi pertumbuhan ekonomi tertinggi diantaranya lapangan usaha Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2024 dengan

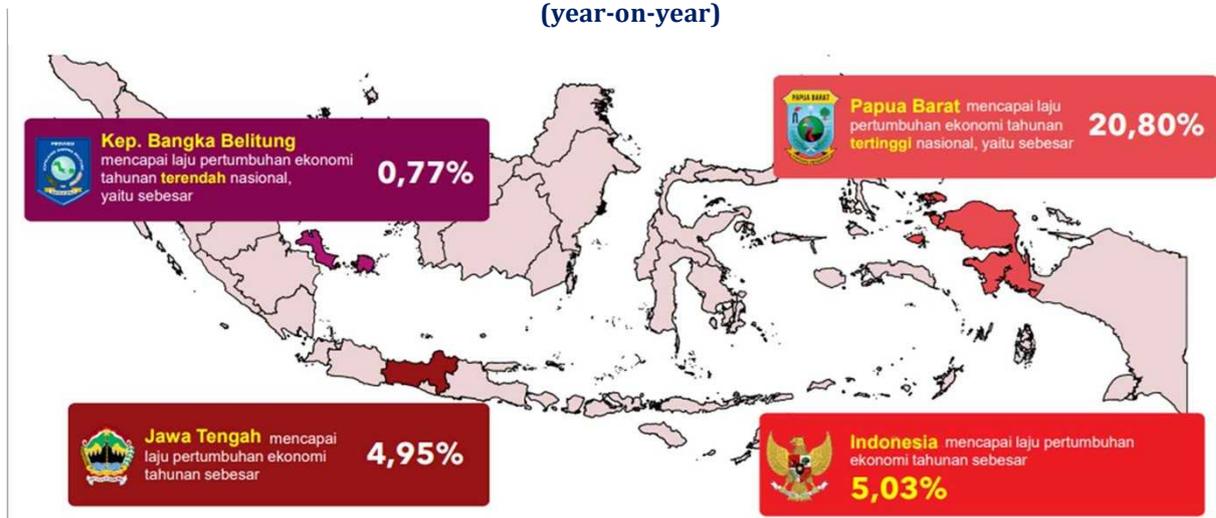
kontribusi sebesar 33,84%, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 61,29%. Sedangkan sektor yang kontribusinya paling rendah berasal dari Transportasi dan Pergudangan sebesar 3,20%, Pengadaan Air sebesar 1,64% dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh minus 8,52%.

Grafik 12. Pertumbuhan Perekonomian Jawa Tengah Tahun 2024 (year-on-year)



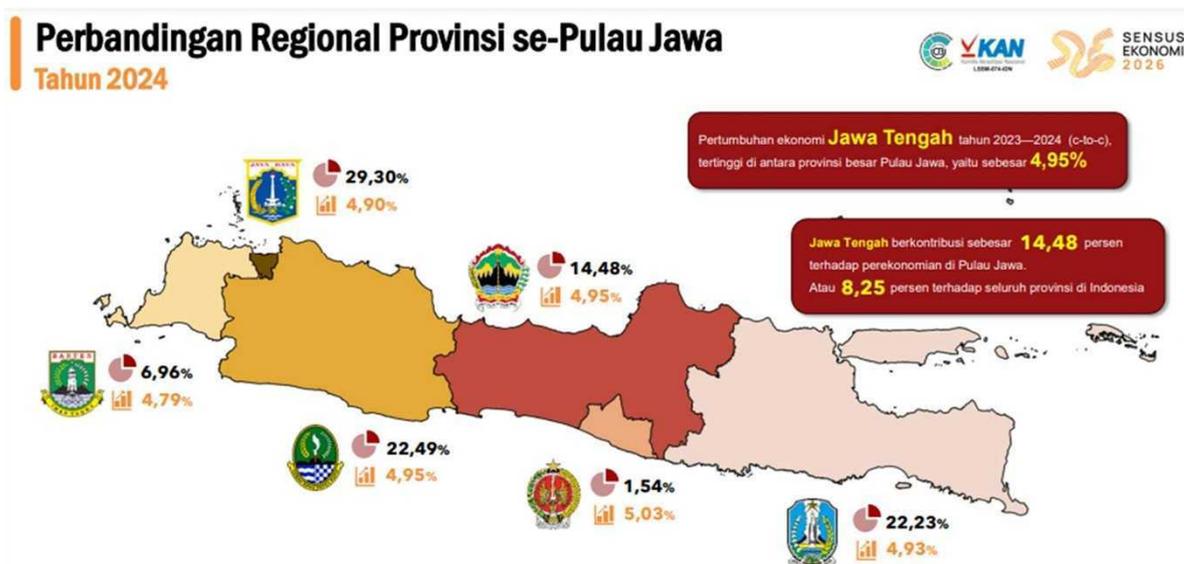
Mengutip data dari BPS (bps.go.id), kinerja peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah pada tahun 2024 sebesar 4,95% sedikit lebih rendah dari pertumbuhan nasional sebesar 5,03%. Dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Provinsi Papua Barat sebesar 20,8% dan terendah dicapai oleh Provinsi Bangka Belitung, yaitu sebesar 0,77%.

Gambar 1. Pertumbuhan Perekonomian Indonesia Tahun 2024 (year-on-year)



Apabila dibandingkan regional di Jawa, Jawa Tengah menduduki peringkat ke-4 dengan kontribusi 14,48%, sebagaimana tahun 2023 juga menduduki peringkat yang sama, dibandingkan Provinsi DKI Jakarta (29,3%), Provinsi Jawa Barat (22,49%), dan Provinsi Jawa Timur (22,23%). Jawa Tengah hanya lebih baik dibandingkan Provinsi Banten (6,96%) dan Provinsi DIY (1,54%).

Grafik 13. Kontribusi Ekonomi Regional di Jawa Triwulan I Tahun 2024
q-to-q

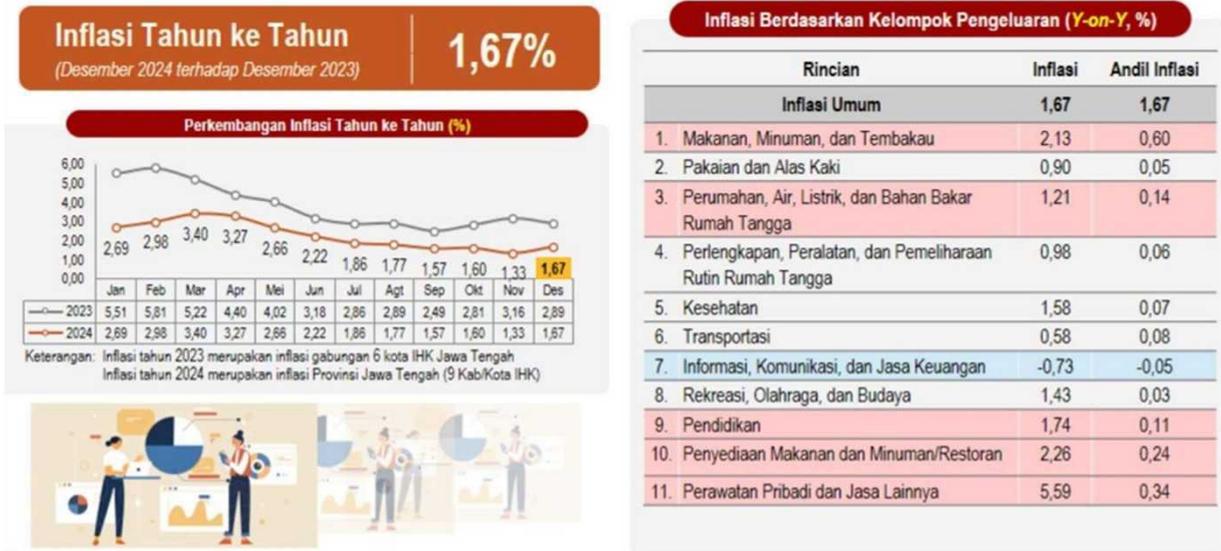


Secara struktur PDRB, perekonomian Jawa Tengah ditopang utamanya dari Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan meliputi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,03%; Informasi dan Komunikasi sebesar 9,56% dan Jasa Perusahaan sebesar 9,15%. Kemudian, keempat lapangan usaha yang memiliki peran dominan juga mencatatkan pertumbuhan positif diantaranya Industri Pengolahan tumbuh sebesar 3,52%; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor tumbuh sebesar 4,16%; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 1,41% dan Konstruksi tumbuh sebesar 7,97%. Lapangan usaha lainnya yang juga tumbuh positif di antaranya Jasa Pendidikan sebesar 8,53%, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,37%; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,28%.

Struktur PDRB Jawa Tengah menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku secara kumulatif sampai dengan Triwulan IV-2024 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Jawa Tengah masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 33,84%; diikuti oleh Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,49%; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,03%; dan Konstruksi sebesar 11,39%. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Jawa Tengah mencapai 71,75%.

Dari sisi inflasi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, pada Desember 2024, inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,67% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,07. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Tegal sebesar 2,19% dengan IHK sebesar 107,57 dan terendah terjadi di Kota Surakarta sebesar 1,50% dengan IHK sebesar 107,07. Tingkat inflasi (*month-to-month*) Jawa Tengah bulan Desember 2024 sebesar 0,57% dan tingkat inflasi (*year on year*) sebesar 1,67%.

Grafik 14. Inflasi Year On Year Jawa Tengah 2024



Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks sepuluh kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,13%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,90%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,21%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,98%; kelompok kesehatan sebesar 1,58%; kelompok transportasi sebesar 0,58%; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,43%; kelompok pendidikan sebesar 1,74%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,26%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,59%. Sedangkan satu kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,73%.

Untuk komoditas yang dominan dalam memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada Desember 2024, antara lain: telur ayam ras, cabai merah, mobil, cabai rawit, minyak goreng, terong, bawang merah, kacang panjang, bawang putih, dan sawi hijau. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m, antara lain: angkutan udara dan daging ayam ras.

Tabel 2. Inflasi Komposit 9 Kabupaten Kota Jawa Tengah 2024

Kabupaten/Kota	IHK	Inflasi Y-on-Y (%)	Inflasi M-to-M (%)	Inflasi Y-to-D (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Cilacap	106,78	1,82	0,52	1,82
Purwokerto	106,16	1,51	0,59	1,51
Kabupaten Wonosobo	109,00	1,52	0,72	1,52
Kabupaten Wonogiri	107,90	1,77	0,75	1,77
Kabupaten Rembang	110,43	1,54	0,56	1,54
Kudus	107,08	1,71	0,59	1,71
Kota Surakarta	107,07	1,50	0,53	1,50
Kota Semarang	106,09	1,69	0,50	1,69
Kota Tegal	107,57	2,19	0,48	2,19
JAWA TENGAH	107,07	1,67	0,57	1,67

Sedangkan inflasi antar wilayah di Jawa Tengah, dari 9 Kota Gabungan di Jawa Tengah, inflasi komposit 1,67% disumbang tertinggi dari Kota Tegal 2,19%, Kabupaten Cilacap 1,82%, Kabupaten Wonogiri 1,77%, Kota Semarang 1,69% dan terendah Kota Surakarta 1,5%.

Trend inflasi di Jawa Tengah semakin membaik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, inflasi Jawa Tengah mencapai 5,63%, tahun 2023 sebesar 2,89%, dan tahun 2024 turun menjadi 1,67%. Penurunan inflasi tahun 2024 diiringi dengan perbaikan kinerja ekonomi makro, diantaranya Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2024 sebesar 4,74% atau lebih rendah dibandingkan tahun 2023 (5,24%) dan Nilai Tukar Petani (NTP) Meningkat NTP tahun 2024 sebesar 112,98, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 107,52.

Dari sisi tingkat kemiskinan, per bulan September 2024, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah turun 307,99 ribu orang menjadi 3,4 juta orang. Secara persentase, kemiskinan turun menjadi 9,58%, atau berkurang 0,89% dibanding Maret 2024 yang mencapai 10,47%. Penurunan di Jawa Tengah tersebut menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa. Dari enam provinsi di Pulau Jawa, Daerah Khusus Jakarta persentase kemiskinan turun 0,16%, Jabar turun 0,38%, DI Yogyakarta turun 0,43%, Jawa Timur turun 0,23 %, dan Banten turun 0,14%. Fenomena sosial yang berimbas pada penurunan kemiskinan di Jawa Tengah, diantaranya kenaikan upah buruh yang tercatat pada Agustus 2024 menjadi Rp2.405.447, dibandingkan Februari 2024 yang tercatat Rp2.252.660 per bulan.

Grafik 15. Tingkat Kemiskinan Jawa Tengah per September 2024



Dari sisi sebaran tingkat kemiskinan, disparitas kemiskinan perkotaan dan perdesaan masih relatif tinggi, sedangkan tingkat kemiskinan di perkotaan maupun perdesaan mengalami penurunan, namun penurunan di perkotaan relatif kecil. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 9,71%, turun menjadi 8,83% pada September 2024. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2024 sebesar 11,34%, turun menjadi 10,45% pada September 2024. Jumlah penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2024 sebanyak 1,87 juta orang, turun sebanyak 156,23 ribu orang menjadi 1,71 juta orang pada September 2024. Sementara itu, penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2024 sebanyak 1,84 juta orang menjadi 1,68 juta orang pada September 2024.

Dari sisi Garis Kemiskinan, pada September 2024 tercatat sebesar Rp521.093/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp392.697/kapita/bulan (75,36%) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp128.396/kapita/ bulan (24,64%).

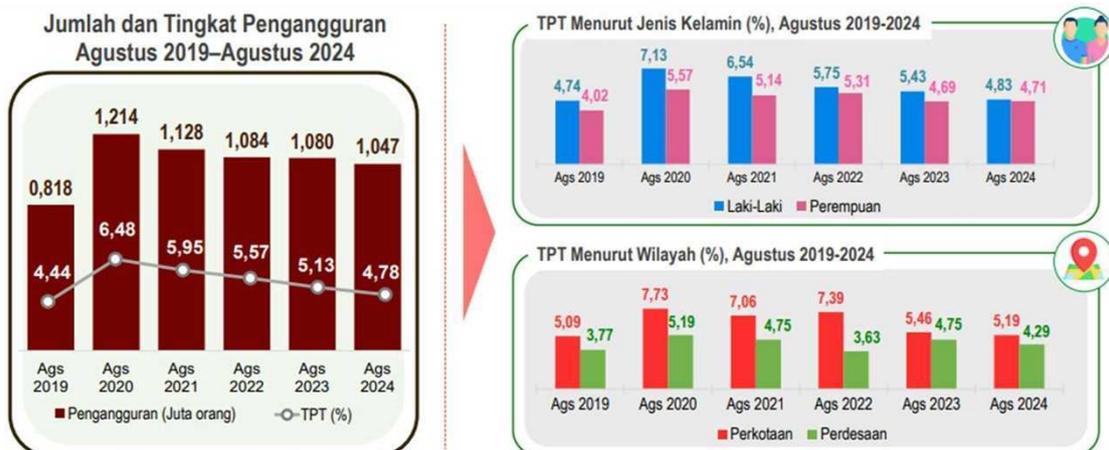
Kondisi kemiskinan ini juga dinilai dari tingkat ketimpangan ekonomi (*Gini Ratio*), yang ditunjukkan kondisi ketimpangan ekonomi yang lebih tinggi di perkotaan Jawa Tengah dibanding di wilayah perdesaan Jawa Tengah. Pada September 2024, Gini Ratio tercatat sebesar 0,364, turun dibandingkan Maret 2024 sebesar 0,367. Ketimpangan wilayah perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan perdesaan, yaitu 0,392 dibandingkan 0,317.

Grafik 16. Tingkat Gini Ratio Perkotaan dan Pedesaan Jawa Tengah 2020 - 2024



Dari sisi pengangguran, pengangguran merupakan suatu kondisi penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan; mempersiapkan usaha baru; sudah diterima bekerja/sudah siap berusaha tetapi belum mulai bekerja/berusaha; atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) digunakan sebagai indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Tengah per Agustus 2024 sebesar 4,78%, menurun 0,35% dibandingkan dengan Agustus tahun 2023. Sejak tahun 2020-2024 (y-on-y), tingkat pengangguran di Jawa Tengah berkisar antara 4-5%, dengan tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 6,48%. Secara grafik, dapat ditunjukkan sebagai berikut :

Grafik 17. Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Tengah Agustus 2019 - Agustus 2024



Tingkat pengangguran ini secara konsisten terus menurun sejak 2020 walaupun masih dalam situasi pandemi Covid-19, dari semula 1,214 juta orang (6,48%), menurun menjadi 1,12 juta orang (5,96%) pada 2021 dan terus menurun menjadi 1,047 juta orang (4,78%) pada Agustus 2024. Dari sisi Jenis Kelamin, tingkat pengangguran perempuan sedikit meningkat dari 4,69% menjadi 4,71%, sedangkan dari sisi wilayah, baik perkotaan maupun perdesaan, mengalami penurunan tingkat pengangguran.

Grafik 18. IPM Jawa Tengah 2020 - 2024



Selanjutnya dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pada tahun 2024, IPM Jawa Tengah mencapai 73,87 atau meningkat 0,48% dibanding tahun 2023 yang mencapai 73,39. Capaian tahun 2023 juga meningkat 0,81 % dibandingkan tahun 2022. Pertumbuhan IPM ini melebihi rata-rata pertumbuhan IPM selama 2020- 2023. Apabila dihitung secara rata-rata, selama 2020-2023, IPM Jawa Tengah mencatat rata-rata pertumbuhan IPM per tahun sebesar 0,69%.

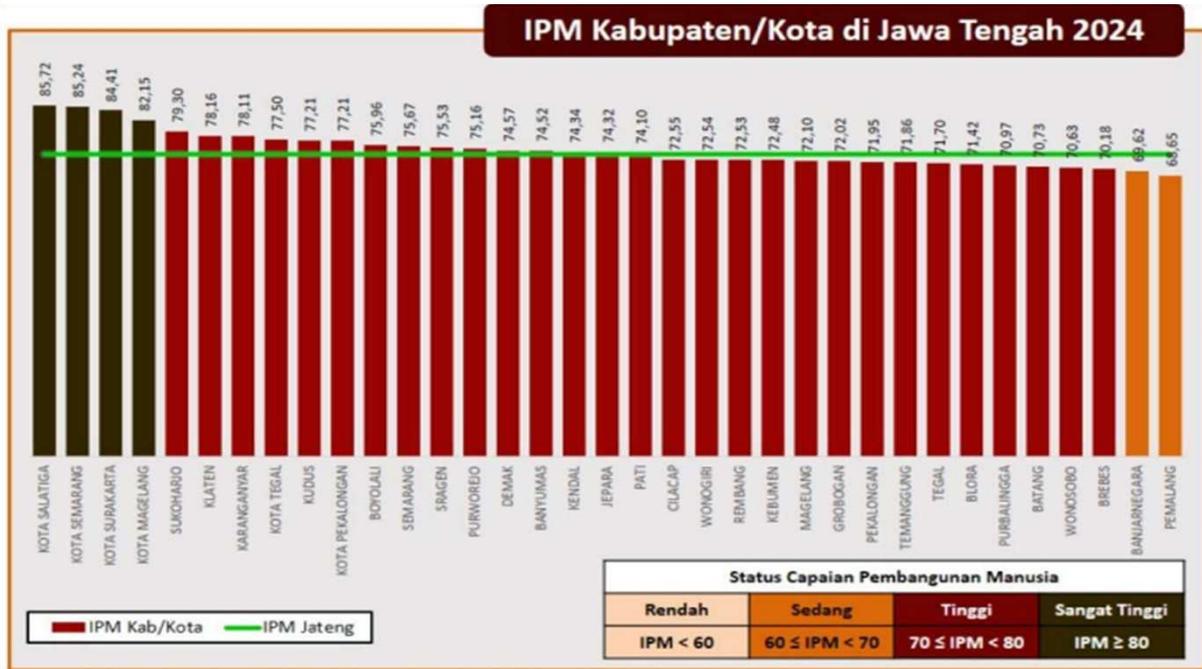
Capaian IPM Jawa Tengah tahun 2024 sebesar 73,87 dapat diartikan umur harapan hidup 74,91 tahun, rata-rata lama sekolah 8,02 tahun, dan pengeluaran per kapita Rp12,28 juta. Namun demikian, capaian IPM ini masih di bawah IPM Nasional sebesar 75,02 dan IPM DKI Jakarta 84,15.

Dari sebaran Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, terdapat 4 wilayah yang mampu mencapai IPM sangat tinggi (di atas 80), yaitu Kota Salatiga (85,72), Kota Semarang (85,26), Kota Surakarta (84,41), dan Kota Magelang (82,15).

Seiring dengan meningkatnya IPM provinsi, IPM seluruh kabupaten/kota juga mengalami peningkatan. Dari sisi perbandingan antar kabupaten/kota, tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam kategori capaian dan peringkat dibanding tahun lalu. Urutan IPM terendah ditempati oleh Kabupaten Pemalang (68,65), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Salatiga (85,72). Jumlah kabupaten/kota dengan status capaian pembangunan manusia yang “tinggi” (70 ≤ IPM < 80) pada tahun 2024 bertambah menjadi 29 dari tahun sebelumnya sebanyak 28 Kabupaten/ Kota yaitu; Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Tegal, Brebes, Kota Pekalongan dan Kota Tegal. Sedangkan kabupaten/kota dengan status capaian “sedang” (60

≤ IPM < 70) ada 2, yaitu Banjarnegara dan Pemalang. Sementara itu, wilayah di Jawa Tengah dengan dengan status pembangunan manusia “rendah” (IPM < 60) tidak ada.

Grafik 19. Sebaran IPM Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun 2024



Selanjutnya dari sisi Fiskal Pemerintah, berdasarkan Laporan ALCo Regional Jawa Tengah per Desember 2024, Kinerja Pelaksanaan APBN di Jawa Tengah tahun 2024 secara umum menunjukkan kinerja positif, yang ditunjukkan dengan capaian surplus Rp7,71 triliun. Kinerja pendapatan APBN Regional sebesar Rp122,2 triliun, mencakup Penerimaan perpajakan mencapai Rp114,99 triliun (100,43% dari pagu), secara nominal tumbuh 9,63% (yoy), sedangkan realisasi PNPB mencapai sebesar Rp7,21 triliun (134,17% dari target), secara nominal tumbuh 0,84%.

Tabel 3. Kinerja APBN Regional Jawa Tengah 2023 - 2024
KINERJA APBN DI JATENG S.D. 31 DESEMBER 2023 - 2024

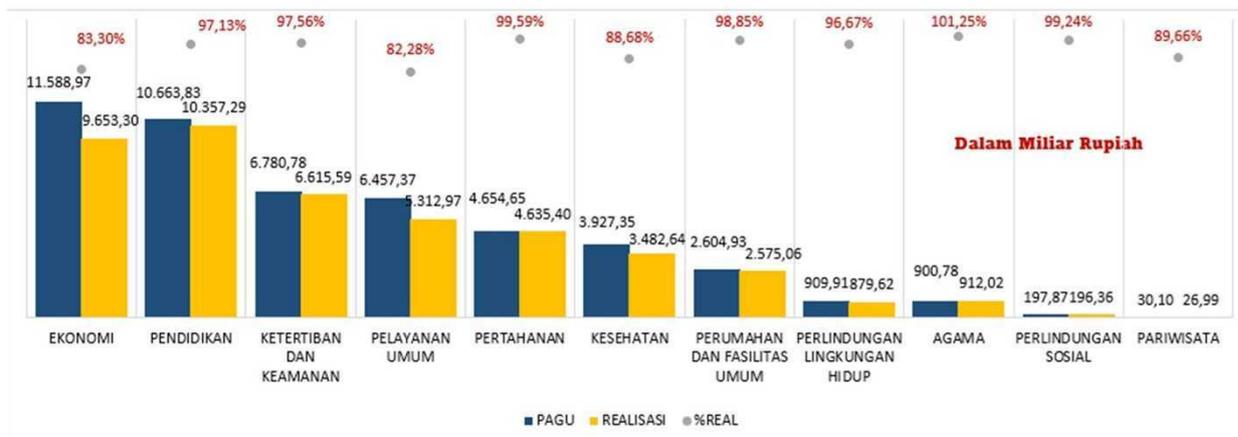
Dalam Miliar Rupiah

Uraian	2023			2024			Pertumbuhan			
	Pagu	Real	% Real	Pagu	Real	% Real	% Real TA 24 - 23	Nominal	% Nominal	
A. Pendapatan	103.527,50	112.044,79	108,23%	119.875,66	122.204,52	101,94%	-5,81%	10.159,73	9,07%	
I. Penerimaan Dalam Negeri	103.527,50	112.044,79	108,23%	119.875,66	122.204,52	101,94%	-5,81%	10.159,73	9,07%	
1. Penerimaan Perpajakan	98.793,45	104.892,09	106,17%	114.999,67	114.991,68	100,43%	-5,41%	10.099,59	9,63%	
a. Pajak Dalam Negeri	96.777,45	102.676,33	106,10%	111.782,07	112.242,98	100,41%	-5,36%	9.566,65	9,32%	
i. Pajak Penghasilan	21.576,69	21.456,26	99,44%	23.949,99	24.524,93	102,40%	2,98%	3.068,66	14,30%	
ii. Pajak Pertambahan Nilai	23.043,45	27.667,30	120,07%	30.656,24	30.142,53	98,32%	-18,11%	2.475,23	8,95%	
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	204,11	101,92	49,93%	172,45	191,71	111,17%	122,63%	89,79	88,09%	
iv. Cukai	51.247,00	52.845,75	103,12%	56.480,80	56.831,05	100,62%	-2,42%	3.985,31	7,54%	
vii. Pajak Lainnya	706,21	605,09	85,68%	522,59	552,76	105,77%	23,45%	52,33	-8,65%	
b. Pajak Perdagangan Internasional	2.016,00	2.215,76	109,91%	2.717,60	2.748,70	101,14%	-7,97%	532,94	24,05%	
i. Bea Masuk	1.980,00	2.156,38	108,91%	2.652,20	2.679,50	101,03%	-7,23%	523,12	24,26%	
ii. Bea Keluar/Pungutan Ekspor	36,00	59,38	164,95%	65,40	69,20	105,81%	-35,85%	9,82	16,53%	
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	4.734,04	7.152,70	151,09%	5.375,99	7.212,84	134,17%	-11,20%	60,15	0,84%	
a. PNPB Lainnya	1.435,13	3.111,63	216,82%	1.383,21	2.936,79	212,32%	-2,08%	-174,84	-5,62%	
b. Pendapatan Badan Layanan Umum	3.298,91	4.041,07	122,50%	3.992,78	4.276,06	107,09%	-12,57%	234,99	5,82%	
B. Belanja Negara	111.206,18	109.022,16	98,04%	119.171,12	114.460,15	96,05%	-2,03%	5.437,99	4,99%	
I. Belanja Kementerian Lembaga (K/L)	44.125,99	42.348,17	95,97%	48.734,54	44.634,97	91,59%	-4,57%	2.286,80	5,40%	
1. Belanja Pegawai	15.373,50	15.225,98	99,04%	16.965,83	17.013,33	100,28%	1,25%	1.787,35	11,74%	
2. Belanja Barang	18.552,36	17.921,44	96,60%	21.848,94	19.762,44	90,45%	-6,37%	1.841,00	10,27%	
3. Belanja Modal	10.091,51	9.092,72	90,10%	9.791,93	7.731,99	78,96%	-12,36%	-1.360,73	-14,97%	
4. Bantuan Sosial	108,61	108,03	99,46%	127,84	127,21	99,51%	0,05%	19,19	17,76%	
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	67.080,19	66.673,99	99,39%	70.436,58	69.825,18	99,13%	-0,26%	3.151,19	4,73%	
1. Transfer ke Daerah	59.019,59	58.618,44	99,32%	62.268,74	61.660,74	99,02%	-0,30%	3.042,30	5,19%	
a. Dana Bagi Hasil	3.361,45	3.361,45	100,00%	2.736,20	2.736,20	100,00%	0,00%	-625,25	-18,60%	
b. Dana Alokasi Umum	36.667,15	36.649,52	99,95%	39.553,06	39.459,46	99,76%	-0,19%	2.809,94	7,67%	
c. Dana Alokasi Khusus Fiskal	3.433,09	3.162,39	92,12%	3.897,34	3.656,01	93,81%	1,84%	493,62	15,61%	
d. Dana Alokasi Khusus NonFiskal	14.865,65	14.758,71	99,28%	15.385,45	15.161,15	98,54%	-0,74%	402,44	2,73%	
e. Dana Insentif Fiskal	692,26	686,37	99,15%	696,70	647,92	93,00%	-6,20%	-38,45	-5,60%	
2. Dana Desa	8.060,60	8.055,55	99,94%	8.167,83	8.164,44	99,96%	0,02%	108,89	1,35%	
C. Surplus/Defisit Anggaran	-	7.678,68	3.022,62	-39,36%	704,54	7.744,37	1099,21%	-2892,44%	4.721,74	156,21%

Untuk Belanja Negara terealisasi 144,46 triliun, dengan realisasi belanja K/L mencapai Rp44,63 triliun (91,59% dari pagu), secara nominal tumbuh 5,40% (yoy). Seluruh jenis belanja secara nominal tumbuh, kecuali belanja modal turun 14,97% (yoy) akibat kendala pembebasan lahan, revisi SBSN, masalah hukum, dan teknis lainnya. Sedangkan Realisasi TKD mencapai Rp69,83 triliun (99,13% dari pagu), secara nominal tumbuh sebesar 4,73% (yoy). Seluruh jenis TKD mengalami pertumbuhan, kecuali DBH turun 18,60% (yoy) dan Dana Insentif Fiskal turun 5,6% (yoy) akibat tidak terpenuhinya syarat salur tepat waktu oleh Pemda.

Dari realisasi belanja K/L yang mencapai Rp44,63 triliun (91,59% dari pagu), Realisasi belanja tertinggi fungsi Agama (101,25% dari pagu), sedangkan realisasi terendah fungsi Ekonomi (54,66%). Realisasi pada Fungsi Agama melebihi 100% disebabkan masih terdapat pagu minus pada belanja pegawai, sedangkan Fungsi Ekonomi memiliki proporsi pagu terbesar Rp11,59 triliun (83,30%), namun realisasi masih rendah karena sebagian besar merupakan pekerjaan infrastruktur yang masih terdapat permasalahan/kendala diantaranya adanya permasalahan pembebasan lahan, belum selesainya revisi luncuran SBSN, belum terbitnya izin impor barang, adanya permasalahan hukum yang belum ada penyelesaiannya, cuaca dan permasalahan teknis lainnya.

Grafik 20. Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga Jawa Tengah Tahun 2024



Untuk APBD regional, realisasi Pendapatan Daerah per Desember 2024 cukup baik mencapai Rp109,85 triliun atau 94,81% dari target Rp115,86 triliun. Realisasi Belanja Daerah masih rendah, baru mencapai Rp106,44 triliun atau 88,81% dari target Rp119,86 triliun, sehingga terdapat SILPA yang cukup besar Rp6,93 triliun atau naik 5,41% (yoy).

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp33,82 triliun (89,93% dari target), turun 2,26% (yoy). Realisasi Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai Rp69,83 triliun (99,13% dari alokasi pagu), tumbuh 4,73% (yoy). TKD menyumbang 64,15% terhadap Pendapatan Daerah sehingga ketergantungan kabupaten/kota relatif tinggi terhadap TKD.

Tabel 4. Kinerja APBD Regional Jawa Tengah 2023 - 2024

Dalam Miliar Rupiah

Uraian	2023			2024			Kenaikan/ Penurunan
	Pagu	Realisasi	% Realisasi	Pagu	Realisasi	% Realisasi	
Pendapatan Daerah	109.713,68	108.605,74	98,99%	115.859,34	109.851,90	94,81%	1,15%
Pendapatan Asli Daerah	35.290,35	34.599,34	98,04%	37.600,94	33.816,24	89,93%	-2,26%
Pajak Daerah	23.030,41	21.743,64	94,41%	23.814,99	21.710,45	91,16%	-0,15%
Retribusi Daerah	1.174,19	1.040,22	88,59%	8.768,06	8.524,42	97,22%	719,48%
Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.472,36	1.502,51	102,05%	1.617,15	1.547,90	95,72%	3,02%
Lain-lain PAD yang Sah	9.613,39	10.312,97	107,28%	3.400,74	2.033,47	59,79%	-80,28%
Pendapatan Transfer	74.000,61	73.591,17	99,45%	78.152,58	75.888,35	97,10%	3,12%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	67.080,19	66.673,99	99,39%	70.436,58	69.825,03	99,13%	4,73%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	6.920,42	6.917,18	99,95%	7.716,00	6.063,32	78,58%	-12,34%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	422,72	415,23	98,23%	105,82	147,31	139,21%	-64,52%
Belanja Daerah	113.684,29	109.666,10	96,47%	119.862,44	106.444,64	88,81%	-2,94%
Belanja Operasi	77.423,32	74.609,46	96,37%	83.688,35	73.525,61	87,86%	-1,45%
Belanja Pegawai	41.692,47	38.388,47	92,08%	44.240,90	40.938,70	92,54%	6,64%
Belanja Barang dan Jasa	29.168,34	29.169,41	100,00%	32.020,90	26.494,13	82,74%	-9,17%
Belanja Bunga	30,95	27,47	88,76%	16,71	13,72	82,11%	-50,05%
Belanja Subsidi	9,52	13,28	139,50%	13,24	8,59	64,88%	-35,32%
Belanja Hibah	5.991,86	6.499,26	108,47%	6.959,50	5.650,04	81,18%	-13,07%
Belanja Bantuan Sosial	530,18	511,57	96,49%	437,10	420,43	96,19%	-17,82%
Belanja Modal	12.925,14	12.464,46	96,44%	12.077,16	9.719,26	80,48%	-22,02%
Belanja Tidak Terduga	411,98	80,93	19,64%	297,34	64,57	21,72%	-20,22%
Belanja Transfer	22.923,85	22.511,25	98,20%	23.799,57	23.135,20	97,21%	2,77%
Belanja Bagi Hasil	7.301,52	6.741,76	92,33%	7.706,81	7.081,85	91,89%	5,04%
Belanja Bantuan Keuangan	15.622,33	15.769,49	100,94%	16.092,76	16.053,35	99,76%	1,80%
Surplus/Defisit	-3.970,61	-1.060,36	26,71%	-4.003,10	3.407,26	-85,12%	-421,33%
Pembiayaan Daerah	5.874,84	7.636,15	129,98%	5.956,83	3.524,28	59,16%	-53,85%
Penerimaan Pembiayaan Daerah	7.321,15	8.573,44	117,11%	6.675,33	4.111,71	61,60%	-52,04%
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.446,31	937,29	64,81%	718,50	587,44	81,76%	-37,33%
SILPA/SIKPA	1.904,23	6.575,79	345,33%	1.953,73	6.931,54	354,79%	5,41%

Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp73,53 triliun (87,86%), Belanja Modal sebesar Rp9,72 triliun (80,48%), Belanja tak Terduga sebesar Rp64,57 miliar (21,72%), dan Belanja Transfer sebesar Rp23,14 triliun (97,21%). Realisasi belanja modal relatif menurun dibandingkan tahun sebelumnya (-22,02%) sehingga diharapkan dapat ditingkatkan pada periode mendatang.

Sebagai *policy response*, dapat diberikan rekomendasi antara lain memperkuat sinergi dengan Pemda untuk mempercepat akselerasi sekaligus meningkatkan kualitas Belanja Daerah, mendorong Pemda untuk menyampaikan data realisasi per bulan kepada Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan secara tepat waktu untuk mendukung analisis dan rekomendasi kebijakan tahun berjalan, mendorong optimalisasi potensi PAD guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, dan optimalisasi penggunaan SILPA agar dapat segera dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan realisasi pajak daerah ditengarai merupakan dampak positif program perpanjangan implementasi insentif fiskal berupa pembebasan PPnBM untuk kendaraan bermotor yang masih berlangsung pada tahun 2024 dengan beberapa penyesuaian. Kebijakan tersebut dapat mendorong peningkatan penjualan kendaraan bermotor sehingga berpotensi meningkatkan pajak daerah. Selain itu, penguatan beberapa kebijakan dan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diantaranya pembebasan denda administrasi dan pembebasan bea balik nama kendaraan

bermotor, penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP), serta sosialisasi dan perbaikan pelayanan masyarakat di bidang perpajakan diperkirakan turut mendorong peningkatan realisasi PAD.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TAHUN 2024 (AUDITED)

B.1. IKHTISAR LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasian merupakan gabungan dari LRA pemerintah pusat dan LRA pemerintah daerah lingkup Jawa Tengah. LRA Konsolidasian mencakup konsolidasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan dan sisa lebih (kurang) pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) antara pemerintah pusat dengan laporan keuangan pemerintah daerah selama satu periode tertentu.

Pendapatan dan hibah sampai dengan 31 Desember 2024 (*Audited*) konsolidasian mencapai **Rp152.427.964.504.527,-** sedangkan belanja konsolidasian sampai dengan 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar **Rp140.225.651.903.950,-**. Gambaran LRA konsolidasian tahun 2024 dibandingkan dengan LRA konsolidasian tahun 2023 tergambar pada tabel berikut:

Tabel 5. Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2024 dan 2023
(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Tahun 2024				Tahun 2023
	Pusat	Daerah	Eliminasi	Konsolidasi	Konsolidasi
Pendapatan Negara	114.590	107.164	-69.326	152.428	140.226
Pendapatan Perpajakan	107.155	22.445		129.600	119.795
Pendapatan PNB	7.435	84.582	-69.326	22.691	20.123
Pendapatan Hibah		137		137	308
Belanja Negara	118.302	108.655	-69.326	157.631	147.343
Belanja Pemerintah	48.477	93.012		141.489	131.359
Transfer	69.825	15.643	-69,326	16.142	15.984
Surplus/(Defisit)	-3.712	-1.491		-5.203	-7.118
Pembiayaan		6.535		6.535	7.636
Penerimaan Pembiayaan Daerah		7.148		7.148	8.573
Pengeluaran Pembiayaan Daerah		612		612	937
SILPA/SIKPA	-3.712	5.044		1.332	519

B.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

B.2.1 PENDAPATAN DAN HIBAH KONSOLIDASIAN

Pada tahun 2024 (*Audited*), pendapatan dan hibah konsolidasian tingkat wilayah mencapai **Rp152.427.964.504.527,-** yang merupakan konsolidasi pendapatan dan hibah pemerintah pusat tingkat wilayah sebesar **Rp114.589.805.695.880,-** dan pemerintah daerah sebesar

Rp107.163.865.497.590,- Atas pendapatan transfer pemerintah daerah oleh pemerintah pusat dilakukan eliminasi akun resiprokal dan skala resiprokal sebesar Rp69.325.706.688.943,-

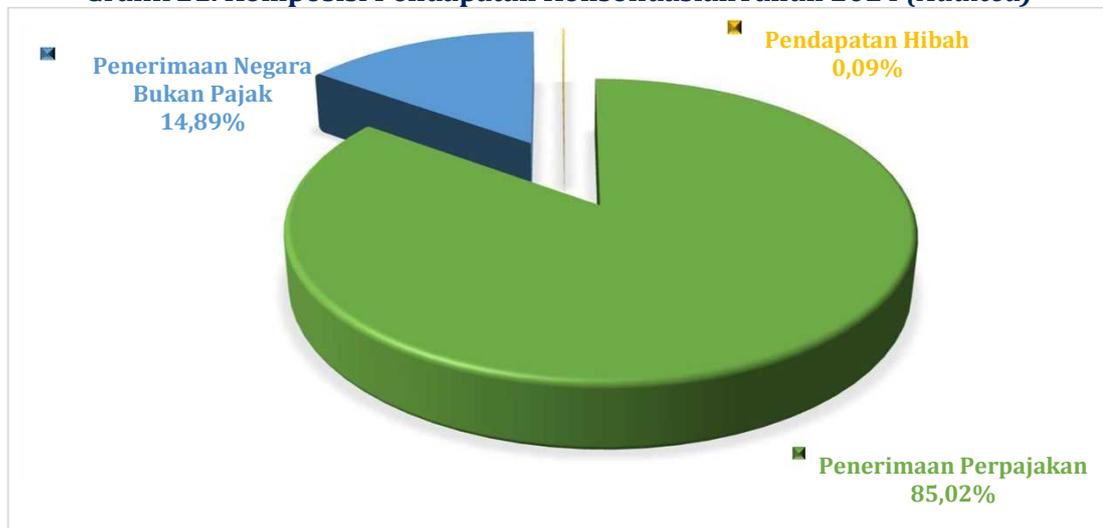
Dibandingkan dengan pendapatan dan hibah konsolidasian tahun 2023 *Audited*, pendapatan dan hibah konsolidasian tahun 2024 (*Audited*) yaitu pendapatan perpajakan dan pendapatan penerimaan negara bukan pajak mengalami peningkatan. Sedangkan pendapatan hibah mengalami penurunan seperti ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 6. Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Tahun 2024 dan Tahun 2023
(dalam miliar Rupiah)

URAIAN	Konsolidasi			
	2024 (<i>Audited</i>)	%	2023 (<i>Audited</i>)	%
I. Pendapatan Perpajakan	129.600	85,02%	119.795	85,43%
1. Pajak Dalam Negeri	126.851		117.579	
2. Pajak Perdagangan Internasional	2.749		2.216	
II. Pendapatan Bukan Pajak	22.691	14,89%	20.123	14,35%
1. Pendapatan Sumber Daya Alam				
2. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan	1.647		1.503	
3. Pendapatan Bukan Pajak Lainnya	14.042		5,038	
4. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	343			
5. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	369		37	
6. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	1			
7. Bantuan Keuangan				
8. Pendapat BLU	6.288		13,546	
III. Pendapatan Hibah	137	0,09%	308	0,22%
Pendapatan, Hibah dan Transfer	152.428	100%	140.226	100%

Pendapatan dan hibah konsolidasian tahun 2024 (*Audited*), didominasi oleh pendapatan perpajakan konsolidasian sebesar 85,02 persen, yang diikuti dengan pendapatan bukan pajak konsolidasian sebesar 14,89 persen, dan pendapatan hibah konsolidasian sebesar 0.09 persen, seperti ditunjukkan pada grafik berikut:

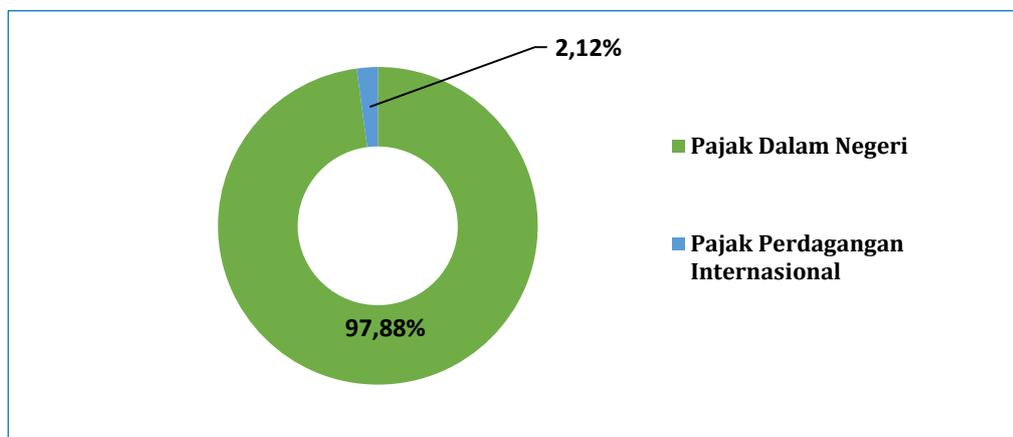
Grafik 21. Komposisi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2024 (*Audited*)



B.2.1.1 Pendapatan Perpajakan

Pajak merupakan pendapatan yang dominan dalam struktur pendapatan dan hibah. Hal ini didorong oleh berbagai kebijakan dan langkah-langkah reformasi di bidang perpajakan terkait dengan perubahan paket perundang-undangan dan tata kelola institusi perpajakan. Pemerintah terus melakukan upaya guna mendorong peningkatan PNBPN mengingat potensi yang besar dari PNBPN sebagai sumber pendapatan. Pemerintah juga terus menjaga kesinambungan pendapatan perpajakan dalam struktur pendapatan negara. Adapun pendapatan perpajakan konsolidasian tahun 2024 (*Audited*) sebesar Rp129.600.007.126.809,- terdiri dari konsolidasi pendapatan pajak dalam negeri sebesar Rp126.851.208.447.736,- dan konsolidasi pajak perdagangan internasional sebesar Rp2.748.798.679.073,- dengan komposisi sebagaimana grafik berikut:

Grafik 22. Komposisi Pendapatan Pajak Konsolidasian Tahun 2024 (*Audited*)



Pajak Dalam Negeri Konsolidasian tahun 2024 (*Audited*) terdiri dari pajak dalam negeri pemerintah pusat sebesar Rp107.154.970.260.382,- dan dari pemerintah daerah sebesar Rp22.445.036.866.427,-. Pajak Dalam Negeri Konsolidasian tahun 2024 (*Audited*) mengalami peningkatan sebesar Rp9.272.257.835.364,- atau 7,89 persen dibandingkan dengan Pajak Dalam Negeri Konsolidasian tahun 2023 (*Audited*) yang tercatat sebesar Rp117.578.950.612.372,-.

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Konsolidasian sebesar Rp2.748.798.679.073,- seluruhnya berasal dari pendapatan pemerintah pusat. Jumlah ini meningkat sebesar Rp533.037.939.602,- atau sebesar 24,06 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 (*Audited*) yang tercatat sebesar Rp2.215.760.739.471,-.

B.2.1.2 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian tahun 2024 (*Audited*) sebesar Rp22.690.644.701.319,- terdiri dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan sebesar Rp1.646.758.281.959,-, Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp14.042.192.896.899,-, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp343.314.116.266,-, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp369.268.510.756,-, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp653.471.000,- dan Pendapatan BLU sebesar Rp6.288.457.424.439,-.

Rincian Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 (*Audited*) dan 31 Desember Tahun 2023 (*Audited*) dapat dilihat pada tabel berikut:

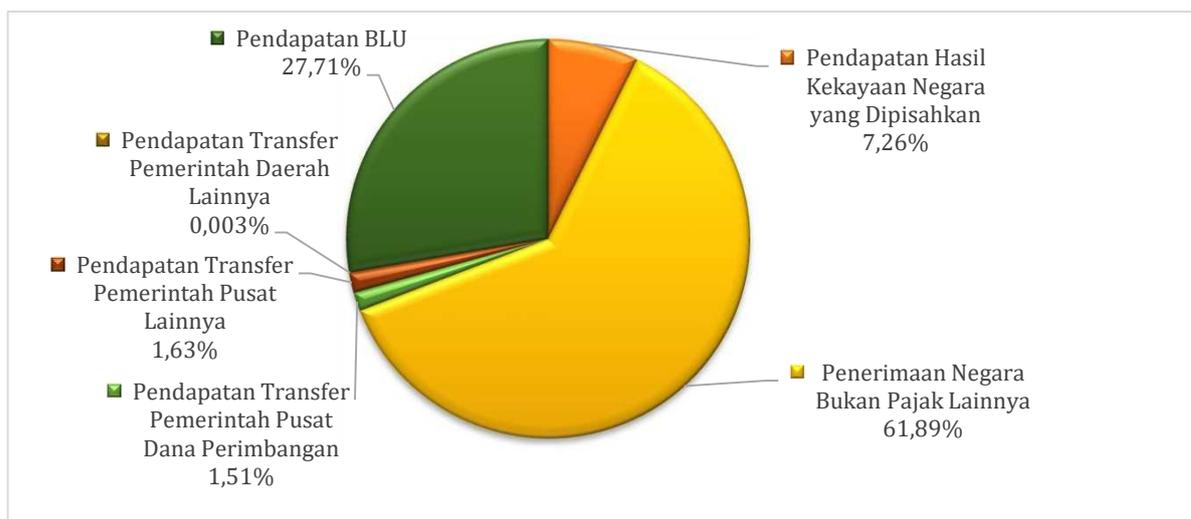
Tabel 7. Perbandingan Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian Tahun 2024 (*Audited*) dan Tahun 2023 (*Audited*)
(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan (penurunan)
Pendapatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan	1.646.758.281.959	1.502.509.857.053	144,248,424,906
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	14.042.192.896.899	5.037.720.359.069	9.004.472.537.830
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	343.314.116.266	-	343.314.116.266
Pendapatan Transfer PemPus Lainnya	369.268.510.756	37.013.687.486	332.254.823.270
Pendapatan Transfer Pemda Lainnya.	653.471.000	-	653.471.000
Pendapatan BLU	6.288.457.424.439	13.545.759.533.225	(7.257.302.108.786)

Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian tahun 2024 (*Audited*) mengalami **kenaikan** sebesar **Rp2.223.673.677.220,-** atau **11,05** persen dibandingkan dengan tahun 2023 (*Audited*) dengan nilai Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian sebesar **Rp 20.123.003.436.833,-**.

Secara persentase komposisi Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian Tahun 2024 (*Audited*) dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 23. Komposisi PNPB Konsolidasian Tahun 2024 (*Audited*)



B.2.1.3 Pendapatan Hibah

Berbeda dengan komponen pendapatan lain yang mengalami kenaikan, Pendapatan Hibah Konsolidasian tahun 2024 justru mengalami penurunan sebesar **Rp170.624.438.875,-** atau sebesar **55** persen dibandingkan dengan Pendapatan Hibah tahun 2023. Pendapatan Hibah tahun 2024 sebesar **Rp137.312.676.399,-** yang tersaji pada LKPK-TW Provinsi Jawa Tengah ini seluruhnya

merupakan Pendapatan Hibah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp83.054.223.971,- Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri sebesar Rp53.617.343.625,- Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp366,708,609,- dan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan sebesar Rp274.400.194,-.

B.2. 2 BELANJA PEMERINTAH DAN TRANSFER KONSOLIDASIAN

Belanja Pemerintah dan Transfer Konsolidasian tahun 2024 (Audited) sebesar Rp157.631.273.972.459,- terdiri dari Belanja Pemerintah sebesar Rp141.488.872.457.364,- dan Belanja Transfer Rp16.142.401.515.095,-. Belanja konsolidasian tahun 2024 (Audited) ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp10.288.018.738.783,- atau sebesar 6,53 persen jika dibandingkan dengan belanja pemerintah dan transfer konsolidasian tahun 2023 (Audited) sebesar Rp 147.343.255.233.676,-.

Dalam Belanja Transfer masih terdapat unsur Belanja Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah sebesar Rp499.325.648.263,-. hal ini dikarenakan eliminasi atas akun resiprokal dan skala resiprokal tidak seluruhnya dapat mengeliminasi perbedaan pencatatan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah dengan Belanja Transfer Pemerintah Pusat.

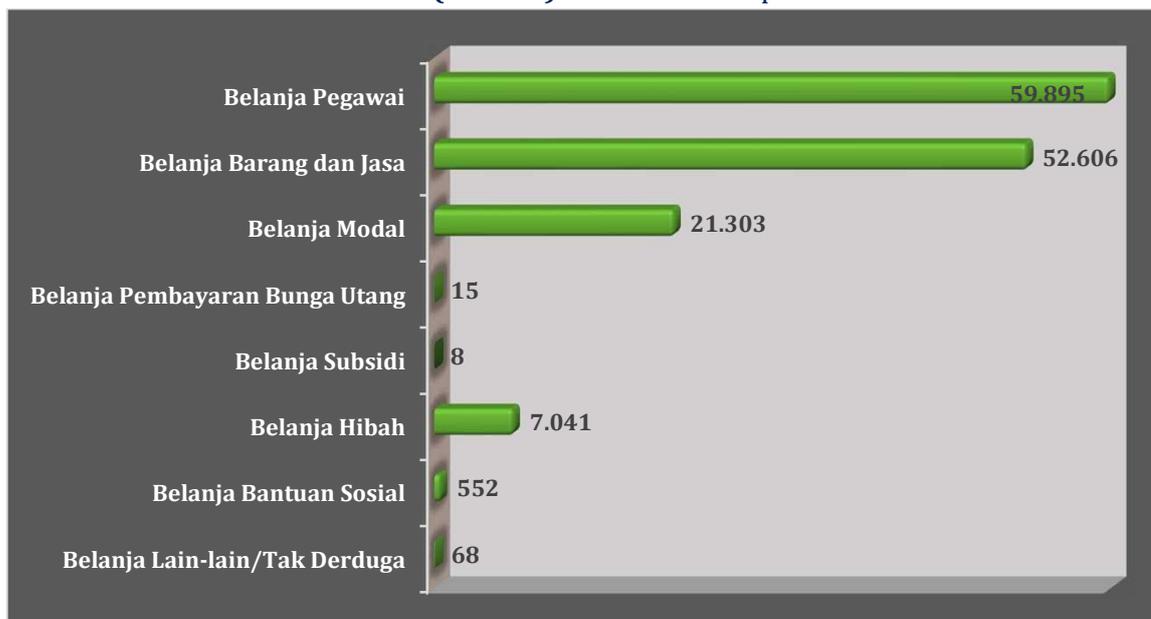
Grafik 24. Perbandingan Belanja Pemerintah Konsolidasian Tahun 2024 (Audited) dan Tahun 2023 (Audited)



B.2.2.1 Belanja Pemerintah

Belanja Pemerintah Konsolidasian Tahun 2024 (Audited) Terdiri Dari Belanja Pegawai Konsolidasian sebesar Rp59.895.095.410.626,-, Belanja Barang Konsolidasian sebesar Rp52.606.462.400.624,-, Belanja Modal Konsolidasian Rp21.302.829.432.761,-, Belanja Pembayaran Kewajiban Utang sebesar Rp14.788.929.517,-, Belanja Subsidi sebesar Rp8.472.385.961,-, Belanja Hibah sebesar Rp7.041.433.789.940,-, Belanja Bantuan Sosial Konsolidasian Rp551.872.621.526,-, dan Belanja Lain-Lain sebesar Rp67.917.486.409,-.

Grafik 25. Komposisi Belanja Pemerintah Konsolidasian berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2024 (Audited) dalam miliar rupiah



Belanja Pegawai Konsolidasian tahun 2024 (Audited) mengalami kenaikan sebesar Rp6.280.645.305.608,- atau sebesar 10,49 persen jika dibandingkan dengan Belanja Pegawai Konsolidasian tahun 2023 (Audited) Rp 53.614.450.105.018,-.

Belanja Barang dan Jasa Konsolidasian tahun 2024 (Audited) mengalami kenaikan sebesar Rp5.091.845.754.418,- atau sebesar 9,68 persen jika dibandingkan dengan Belanja Barang Konsolidasian tahun 2023 (Audited) sebesar Rp 47.514.616.646.206,-.

Belanja Modal Konsolidasian tahun 2024 (Audited) mengalami penurunan sebesar Rp1.687.029.762.744,- atau 7,92 persen jika dibandingkan dengan Belanja Modal Konsolidasian tahun 2023 (Audited) sebesar Rp22.989.859.195.505,-.

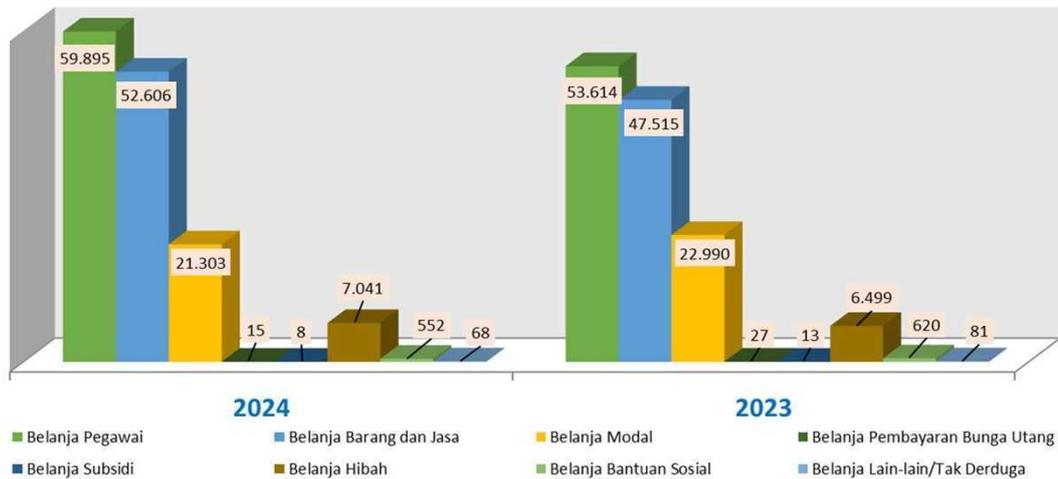
Demikian pula dengan **Belanja Pembayaran Bunga Utang Konsolidasian** tahun 2024 (Audited) mengalami penurunan sebesar Rp12.686.028.711,- atau 85,78 persen jika dibandingkan dengan tahun 2023 (Audited) sebesar Rp27.474.958.228,-. Pembayaran bunga utang ini seluruhnya merupakan belanja pada Pemerintah Daerah. APBN dan APBD sebagai piranti kebijakan pemerintah memiliki fungsi stabilisasi yang digunakan untuk penyediaan berbagai jenis subsidi baik berupa subsidi harga barang-barang kebutuhan pokok (*price subsidies*), maupun subsidi ke objek sasaran (*targeted subsidies*). Alokasi kewajiban Pembayaran Kewajiban Utang dilakukan Pemerintah dalam memenuhi kewajiban Pembayaran Kewajiban Utang secara tepat waktu seperti pemanfaatan dan pengelolaan utang akan dilakukan secara bijaksana, agar beban pembayaran bunga cicilan pokok utang di masa-masa mendatang tetap dalam batas kemampuan ekonomi.

Belanja Subsidi Konsolidasian tahun 2024 (Audited) mengalami penurunan sebesar Rp4.812.577.187,- atau 56,8 persen dibandingkan tahun 2023 (Audited) yang tercatat sebesar Rp13.284.963.148,-.

Belanja Hibah Konsolidasian tahun 2024 (*Audited*) meningkat sebesar Rp542.177.272.377,- atau 7,7 persen dibandingkan di tahun 2023 (*Audited*) sebesar Rp6.499.256.517.563,-.

Dari tahun ke tahun terjadi penurunan pada **Belanja Bantuan Sosial Konsolidasian** tahun 2024 dan **Belanja Lain-Lain Konsolidasian** tahun 2024 (*Audited*). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 26. Perbandingan Belanja Pemerintah Konsolidasian Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2024 (*Audited*) dan Tahun 2023 (*Audited*)



Secara persentase, Belanja Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam kurun waktu tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Belanja Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2024 (*Audited*) dan Tahun 2023 (*Audited*) (dalam miliar Rupiah)

Belanja Pemerintah	Konsolidasi			
	2024 (<i>Audited</i>)	%	2023(<i>Audited</i>)	%
1. Belanja Pegawai	59.895	42,33	53.614	40,82
2. Belanja Barang dan Jasa	52.606	37,18	47.515	36,17
3. Belanja Modal	21.303	15,06	22.990	17,50
4. Pembayaran Bunga Utang	15	0,01	27	0,021
5. Subsidi	8	0,005	13	0,010
6. Hibah	7.041	4,98	6.499	4,95
7. Bantuan Sosial	552	0,39	620	0,47
8. Belanja lain-lain	68	0,05	81	0,06
Total	141.489	100	131.359	100

Berdasarkan tabel diatas belanja pemerintah konsolidasian masih didominasi oleh belanja operasional yakni belanja pegawai konsolidasian dan belanja barang konsolidasian. Besarnya kontribusi belanja operasional menunjukkan bahwa pemerintah masih membelanjakan APBN/D untuk pengeluaran-pengeluaran yang bersifat mengikat. Namun demikian belanja modal juga

memiliki porsi yang cukup besar di tahun 2024 dan 2023 yaitu masing-masing sebesar 15,06 persen dan 17,5 persen.

B.2.2.2 Belanja Transfer

Belanja transfer harus dieliminasi dengan pendapatan pemerintah yang menerima transfer tersebut. Dalam laporan realisasi anggaran konsolidasian pemerintah pusat dan pemerintah daerah, belanja transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan pendapatan transfer pemerintah daerah. Namun demikian, masih terdapat perbedaan antara angka belanja transfer pemerintah pusat dengan pendapatan transfer pemerintah daerah yang dikarenakan antara lain:

- Perbedaan pengakuan salah satu diantaranya adalah pendapatan BOS yang tidak dicatat oleh pemerintah daerah dikarenakan penyaluran yang tidak melalui RKUD.
- Terdapat kemungkinan pencatatan belanja transfer pada entitas yang menyalurkan yang belum dapat diakui sebagai pendapatan transfer pada periode yang sama. Hal ini disebabkan adanya perbedaan waktu pencatatan belanja transfer dengan pendapatan transfer.
- Adanya penyesuaian kompensasi penyaluran sebelumnya.

Eliminasi akun resiprokal dan skala resiprokal belanja transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer pemerintah daerah pada LRA konsolidasian ditunjukkan dengan neraca saldo buku besar kas eliminasi (lampiran 25).

Belanja Transfer yang tersaji dalam LKPK-TW Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 (*Audited*) sebesar Rp16.142.401.515.095,- ini merupakan hasil eliminasi akun resiprokal dan skala resiprokal yang tidak dapat sepenuhnya saling mengeliminasi. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pencatatan akun dan perbedaan *cut off* pencatatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Rincian Belanja Transfer dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Rincian Belanja Transfer Tahun 2024 (*Audited*)
(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Tahun 2024
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	540.248.534.240
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	476.369.176.193
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	63.879.358.047
Transfer Bantuan Keuangan	15.102.827.332.592
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	316.479.028.000
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	14.786.348.304.592
Transfer Pemerintah Pusat Ke Daerah Dan Dana Desa	499.325.648.263
Dana Alokasi Umum	21.667.915.938
Dana Alokasi Khusus Fisik	108.892.188.325
Dana Desa	368.765.544.000

B.2.3 Surplus (Defisit) Anggaran

Pada 2024 (*Audited*) terjadi defisit konsolidasian sebesar Rp5.203.309.467.932,- menunjukkan pendapatan dan hibah konsolidasian lebih rendah dibandingkan dengan belanja pemerintah konsolidasian. Defisit konsolidasian tahun ini lebih rendah dibandingkan defisit konsolidasian tahun 2023 (*Audited*) sebesar Rp7.117.603.329.726,-.

B.2.4 Pembiayaan

Dalam dalam paragraf 62 Kerangka Konseptual, pembiayaan (*financing*) didefinisikan sebagai “Setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah”.

Pembiayaan pada tahun 2024 (*Audited*) tercatat sebesar Rp6.535.427.584.576,- lebih kecil apabila dibandingkan dengan pembiayaan tahun 2023 (*Audited*) yang mencapai Rp7.636.145.133.350,-. Pembiayaan ini seluruhnya bersumber dari pemerintah daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp7.147.570.030.969,- dan dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp612.142.446.393,-.

Penerimaan Pembiayaan tahun 2024 diperoleh dari penggunaan SiLPA sebesar Rp6.191.741.200.744,-, Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp951.110.991.205,- serta penerimaan Kembali piutang sebesar Rp4.717.839.020,-.

Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri dan pemberian pinjaman daerah kepada perusahaan daerah.

Rincian pembiayaan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 10. Pembiayaan Tahun 2024 (*Audited*) dan Tahun 2023 (*Audited*)
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Penerimaan Pembiayaan	7.147.570.030.969	8.573.443.679.594
Penggunaan SiLPA	6.191.741.200.744	8.024.819.635.520
Pencairan Dana Cadangan	951.110.991.205	336.397.334.000
Pinjaman Dalam Negeri	-	171.242.614.060
Penerimaan Kembali Piutang	4.717.839.020	40.984.096.014
Pengeluaran Pembiayaan	612.142.446.393	937.298.546.244
Pembentukan Dana Cadangan	77.151.989.603	321.821.354.356
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	207.749.418.474	303.293.192.924

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	324.436.038.316	309.083.998.964
Pemberian Pinjaman Daerah	2.805.000.000	3.100.000.000
Total Pembiayaan	6.535.427.584.576	7.636.145.133.350

B.2.5 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA/SiKPA, adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN selama 1 (satu) periode pelaporan.

Melalui pembiayaan sebagaimana diatas, pada tahun 2024 (*Audited*) tercatat SiLPA sebesar Rp1.332.118.116.644,-. Nilai ini lebih besar apabila dibandingkan dengan SiLPA tahun 2023 (*Audited*) yang mencapai Rp518.541.803.624,-.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TAHUN 2024 (AUDITED)

C.1 IKHTISAR LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) Konsolidasian merupakan gabungan dari LO pemerintah pusat dan pemerintah daerah. LO Konsolidasian mencakup konsolidasi pendapatan dan beban LO dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, pos luar biasa dan surplus/defisit LO Konsolidasian. Surplus/defisit LO Konsolidasian tahun 2024 (*Audited*) sebesar Rp7.710.186.175.196,- yang tergambar pada tabel berikut:

Tabel 11. LO Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2024 (*Audited*) dan 2023 (*Audited*)
(dalam miliar rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan (Penurunan)
Kegiatan Operasional			
Pendapatan Operasional	168.890	220.911	(52.021)
Beban Operasional	157.713	144.753	12.960
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	11.177	76.158	(64.981)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/Defisit Non Operasional	-3.438	-2.331	(1.107)
Pos Luar Biasa			
Pos Luar Biasa	-30	-47	(17)
Surplus/Defisit LO	7.710	73.781	(66.071)

C.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL

C.2.1 KEGIATAN OPERASIONAL

Pada tahun 2024 (*Audited*), surplus LO Konsolidasian dari kegiatan operasional mencapai Rp11.177.330.113.965,-. Nilai ini menunjukkan penurunan sebesar Rp64.980.850.253.207,-

dibandingkan tahun 2023 (*Audited*) sebesar Rp 76.158.180.367.172,-. Penurunan sangat signifikan ini terjadi karena perubahan kebijakan penyesuaian pendapatan lainnya yaitu Pendapatan Penyesuaian Droning Dana Transfer tahun 2023 (*Audited*) sebesar Rp66.577.367.930.209,- yang pada tahun 2024 ini ditiadakan. Pendapatan Penyesuaian Droning Dana Transfer dimaksudkan sebagai penyeimbang belanja transfer yang tercatat di Laporan Keuangan tingkat kanwil. Dengan perlakuan yang sama yaitu dengan mengeluarkan Pendapatan Penyesuaian Droning Dana Transfer maka diperoleh surplus dari kegiatan operasional tahun 2023 (*Audited*) sebesar Rp9.580.812.436.963,- yang berarti terjadi kenaikan surplus dari kegiatan operasional sebesar Rp1.596.517.677.002,- dibandingkan tahun 2023 (*Audited*).

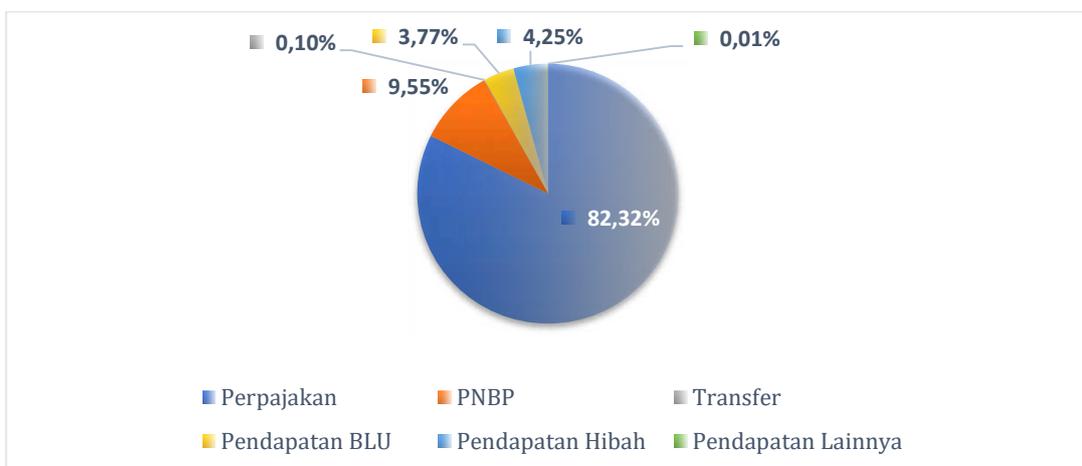
C.2.1.1 PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan Operasional Konsolidasian meliputi Pendapatan Perpajakan, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pendapatan Transfer, Pendapatan BLU, Pendapatan Hibah, Dan Pendapatan Lainnya.

Pendapatan Operasional Konsolidasian per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp168.889.978.442.942,-, terdiri dari Pendapatan Perpajakan Konsolidasian sebesar Rp139.021.923.845.433,- PNBP Konsolidasian sebesar Rp16.133.421.265.015,-, Pendapatan Transfer Konsolidasian sebesar Rp175.028.434.010,- Pendapatan BLU Konsolidasian sebesar Rp6.366.662.288.948,-, Pendapatan Hibah sebesar Rp7.174.889.725.658,- dan Pendapatan Lainnya sebesar Rp18.052.883.878,-.

Dilihat dari komposisi Pendapatan Operasional tahun 2024 (*Audited*) masih didominasi Pendapatan Perpajakan Konsolidasian tahun 2024 (*Audited*) sebesar 82,32 persen dari total Pendapatan LO Konsolidasian.

Grafik 27. Komposisi Pendapatan Operasional Tahun 2024 (*Audited*)



Pendapatan Operasional Konsolidasian tahun 2024 (*Audited*) menunjukkan penurunan sebesar Rp52.021.241.474.295,- atau 23,55 persen dibandingkan tahun 2023 (*Audited*) sebesar Rp220.911.219.917.237,-. Perbandingan Pendapatan Operasional tahun 2024 (*Audited*) dan 2023 (*Audited*) ditunjukkan tabel berikut:

Tabel 12. Pendapatan Operasional Tingkat Wilayah Tahun 2024 (Audited) dan 2023 (Audited)
(dalam miliar Rupiah)

PENDAPATAN OPERASIONAL	2024	2023	naik (turun)	%
Perpajakan	139.022	129.202	9.819	7,60%
PNBP	16.133	7.798	8.335	106,89%
Transfer	175	69	106	154,26%
Pendapatan BLU	6.367	13.340	(6.973)	-52,27%
Pendapatan Hibah	7.175	3.848	3.327	86,45%
Pendapatan Lainnya	18	66.654	(66.636)	-99,97%
Total	168.890	220.911	-52.021	-23,55%

C.2.1.2. BEBAN OPERASIONAL DAN TRANSFER

Beban Operasional dan Transfer per 31 Desember 2024 (Audited) sebesar Rp157.712.648.328.977,-, tahun 2023 (Audited) sebesar Rp144.753.039.550.065,-. Tahun 2024 Beban Operasional dan Transfer mengalami kenaikan sebesar Rp26.040.597.439.888,- atau 17,99 persen. Berikut ini tabel Beban Operasional dan Transfer tahun 2024 (Audited) dan 2023 (Audited):

Tabel 13. Beban Operasional Tingkat Wilayah Tahun 2024 (Audited) dan 2023 (Audited)
(dalam miliar Rupiah)

BEBAN OPERASIONAL	2024	2023	naik (turun)	%
A. BEBAN OPERASIONAL	141.795	128.640	13.155	10,23%
Beban Pegawai	61.608	55.090	6.518	11,83%
Beban Persediaan	2.470	2.557	-88	-3,43%
Beban Barang dan Jasa	48.309	43.449	4.860	11,19%
Beban Bunga	19	27	-8	-28,05%
Beban Hibah	8.637	7.034	1.602	22,78%
Beban Bantuan Sosial	670	657	13	1,99%
Beban Subsidi	9	15	-6	-41,67%
Beban Lain-Lain/Beban Tidak Terduga	19	36	-16	-45,70%
Beban Akrua Lainnya	20.055	19.775	279	1,41%
B. BEBAN TRANSFER	15.917	16.113	-196	-1,21%
Transfer Pempus Ke Daerah Dan Dana Desa	8.386	8.557	-171	-2,00%
Beban Transfer Pemda	7.531	7.556	-25	-0,33%
Total	157.713	144.753	26.041	17,99%

C.2.2 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan non operasional tahun 2024 (Audited) ini terdiri dari surplus pempus selisih kurs belum terealisasi, defisit pempus pelepasan aset non lancar, surplus pempus dari kegiatan non operasional lainnya, defisit pemda penjualan aset non lancar, defisit pemda penyelesaian kewajiban jangka panjang dengan total defisit sebesar Rp3.437.573.595.645-.

C.2.3 SURPLUS (DEFISIT) LO

Pada laporan operasional tahun 2024 (*Audited*) tercatat surplus sebesar Rp7.710.186.175.196,-. Nilai ini menunjukkan penurunan sebesar Rp66.070.640.808.577,- dibandingkan tahun 2023 (*Audited*) yang menghasilkan surplus sebesar Rp73.780.826.983.773,-. Penurunan sangat signifikan ini terjadi karena perubahan kebijakan penyesuaian pendapatan lainnya yaitu Pendapatan Penyesuaian Dropped Dana Transfer tahun 2023 (*Audited*) sebesar Rp66.577.367.930.209,- yang pada tahun 2024 ini ditiadakan. Pendapatan Penyesuaian Dropped Dana Transfer dimaksudkan sebagai penyeimbang belanja transfer yang tercatat di Laporan Keuangan tingkat kanwil. Dengan perlakuan yang sama yaitu dengan mengeluarkan Pendapatan Penyesuaian Dropped Dana Transfer maka diperoleh surplus laporan operasional tahun 2023 (*Audited*) sebesar Rp7.203.459.053.564,- yang berarti terjadi kenaikan surplus sebesar Rp506.727.121.632,- dibandingkan tahun 2023 (*Audited*).

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA KONSOLIDASIAN PER 31 DESEMBER 2024 (*Audited*)

D.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM

Neraca konsolidasian tingkat wilayah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2024 (*Audited*) dan 31 Desember 2023 (*Audited*) terdiri dari aset konsolidasian sebesar Rp612.592.793.072.450,- dan Rp599.121.491.196.697,-, kewajiban konsolidasian sebesar Rp3.846.001.454.305,- dan Rp3.370.399.575.502,- serta ekuitas konsolidasian sebesar Rp608.746.791.618.145,- dan Rp595.751.091.621.195,-. Posisi keuangan sebagaimana dimaksud, diilustrasikan dalam grafik berikut:

Grafik 28. Posisi Keuangan Konsolidasian tahun 2024 (*Audited*) dan Tahun 2023(*Audited*) (dalam miliar rupiah)



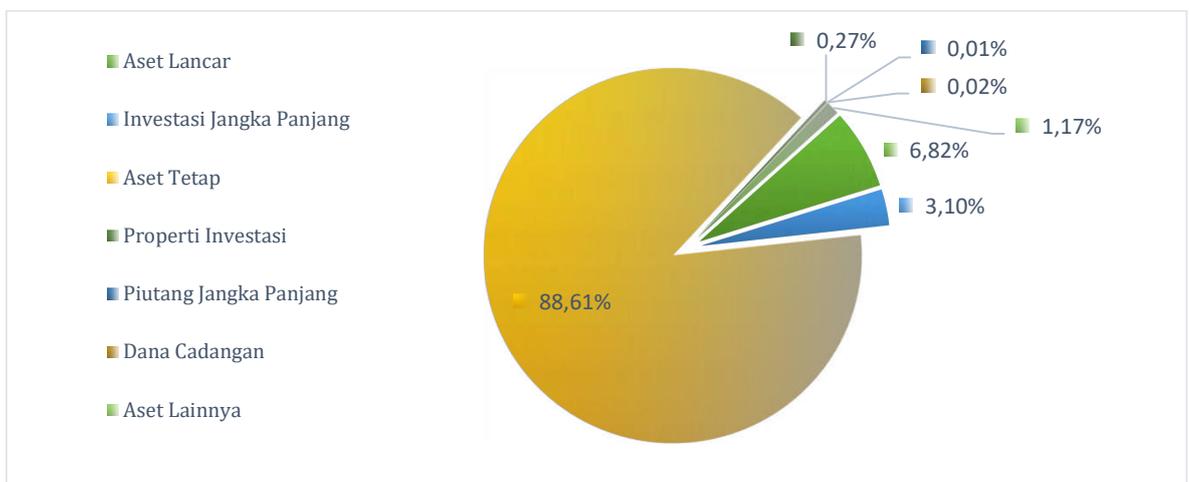
D.2. PENJELASAN PER POS NERACA PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

D.2.1. ASET KONSOLIDASIAN

Aset Konsolidasian terdiri dari Aset Lancar Konsolidasian, Investasi Jangka Panjang Konsolidasian, Aset Tetap Konsolidasian, Piutang Jangka Panjang Konsolidasian, Properti Investasi, Dana Cadangan Konsolidasian Dan Aset Lainnya Konsolidasian. Aset Konsolidasian per 31 Desember 2024 (Audited) adalah sebesar Rp612.592.793.072.450,-.

Komposisi Aset Konsolidasian didominasi oleh Aset Tetap Konsolidasian, yaitu senilai Rp542.845.362.836.841,- atau sebesar 88,61 persen dari total Aset Konsolidasian. Struktur Aset Konsolidasian per 31 Desember 2024 (Audited) ditunjukkan pada grafik berikut ini:

Grafik 29. Struktur Aset Konsolidasian per 31 Desember 2024 (Audited)
 Dalam miliar rupiah



Selanjutnya, perbandingan perubahan struktur aset konsolidasian per tanggal 31 Desember 2024 (Audited) dan 2023 (Audited) dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

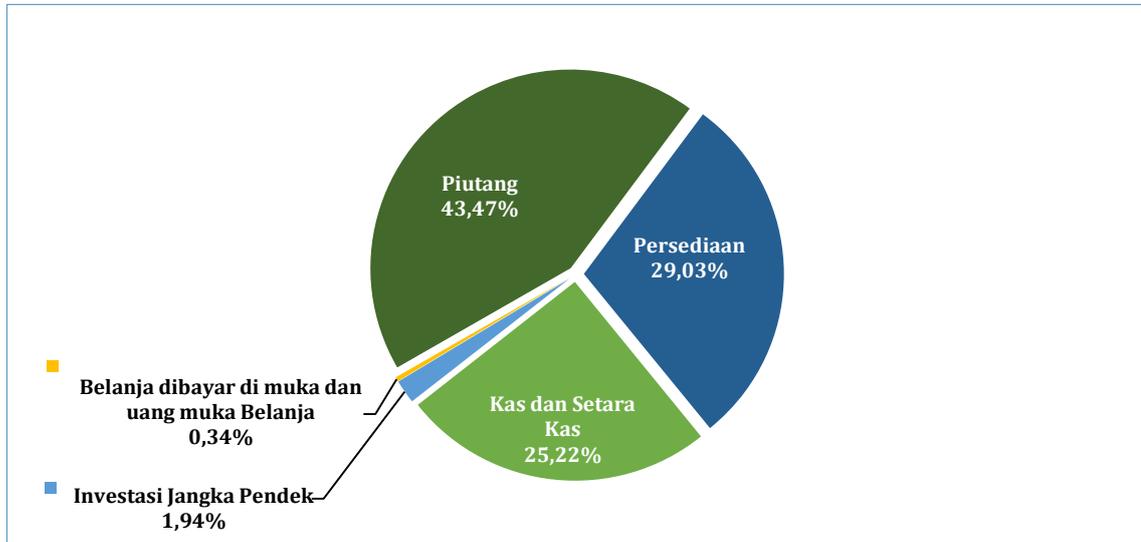
Tabel 14. Perbandingan Aset Konsolidasian per 31 Desember 2024 (Audited) dan 31 Desember 2023 (Audited)
 dalam miliar rupiah

ASET KONSOLIDASIAN	2023	2023	naik (turun)	%
Aset Lancar	41.800	39.938	1.862	4,45%
Investasi Jangka Panjang	18.961	18.448	513	2,71%
Aset Tetap	542.845	528.810	14.036	2,59%
Properti Investasi	1.679	1.530	149	9,74%
Piutang Jangka Panjang	42	44	(2)	-5,57%
Dana Cadangan	127	1.003	(876)	-686,92%
Aset Lainnya	7.138	9.349	(2.211)	-30,97%
Total	612.593	599.121	13.471	2,20%

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan untuk segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar terdiri

dari Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Investasi Jangka Pendek Lainnya, Belanja Dibayar Di Muka dan Uang Muka Belanja, Piutang dan Persediaan.

Grafik 30. Struktur Aset Lancar Konsolidasian per 31 Desember 2024 (Audited)



Aset Lancar Konsolidasian per 31 Desember 2024 (Audited) sebesar Rp41.800.491.395.824,- yang terdiri dari Kas Dan Setara Kas Konsolidasian sebesar Rp10.541.154.747.248,- Investasi Jangka Pendek Konsolidasian sebesar Rp811.361.520.000,- Belanja Di Bayar Di Muka dan Uang Muka Belanja sebesar Rp143.413.460.620,- Piutang Konsolidasian sebesar Rp18.171.798.777.482,-, dan Persediaan Konsolidasian sebesar Rp12.132.762.890.474,-.

Aset Lancar Konsolidasian per 31 Desember 2024 (Audited) mengalami peningkatan sebesar Rp1.862.022.099.970- atau sebesar 5 persen dibandingkan Aset Lancar Konsolidasian per 31 Desember 2023 (Audited) sebesar yang berjumlah Rp39.938.469.295.854,-.

Investasi Jangka Panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

Investasi Jangka Panjang Konsolidasian per 31 Desember 2024 (Audited) sebesar Rp18.960.830.425.674,- meningkat 3 persen dibanding tahun 2023 (Audited) yang tercatat Rp18.447.756.140.767,-. Investasi Jangka Panjang Konsolidasian per 31 Desember 2024 (Audited) ini terdiri dari Investasi Non Permanen senilai Rp22.058.443.930,- dan Investasi Permanen pada pemerintah daerah senilai Rp18.938.771.981.744,-. Nilai investasi ini seluruhnya merupakan inventasi pada pemerintah daerah yang didominasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah senilai Rp18.531.839.746.953,-.

Aset Tetap Konsolidasian meliputi Tanah, Peralatan Dan Mesin, Gedung Dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan serta Akumulasi Penyusutan. Aset Tetap Konsolidasian per 31 Desember 2024 (Audited) sebesar

Rp542.845.362.836.841,- dan 31 Desember 2023 (*Audited*) adalah sebesar Rp528.809.534.127.909,-. Nilai Aset Tetap Konsolidasian per 31 Desember 2024 (*Audited*) mengalami kenaikan sebesar Rp14.035.828.708.931,- atau 2,59 persen dari nilai Aset Tetap Konsolidasian per 31 Desember 2023 (*Audited*).

Rincian Aset Tetap Konsolidasian tahun 2024 (*Audited*) dan 2023 (*Audited*) adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Rincian Aset Tetap Tahun 2024 (*Audited*) dan 2023 (*Audited*)
(dalam miliar Rupiah)

ASET TETAP KONSOLIDASIAN	2024	2023	naik (turun)	%
Tanah	335.229	330.261	4.968	1,48%
Peralatan dan Mesin	80.153	73.953	6.200	7,74%
Gedung dan Bangunan	100.647	93.766	6.882	6,84%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	194.881	181.913	12.968	7,13%
Aset Tetap Lainnya	6.352	6.346	5	0,09%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	11.338	11.682	(344)	-3,03%
Konsesi Jasa	6.558	6.564	(5)	-0,08%
Akumulasi Penyusutan	-192.314	-175.675	(16.639)	8,65%
Total	542.845	528.810	14.036	2,59%

Tanah Konsolidasian per 31 desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp335.229.498.440.742,- merupakan penggabungan tanah Pemerintah Pusat sebesar Rp251.411.684.377.982,00,- dan tanah Pemerintah Daerah sebesar Rp83.817.814.062.760,-. Tanah Konsolidasian per 31 Desember 2024 (*Audited*) meningkat sebesar Rp4.968.012.115.047,- atau 1,48 persen dibanding dengan Tanah Konsolidasian per 31 Desember 2023 (*Audited*) yang tercatat sebesar Rp330.261.486.325.695,-.

Peralatan dan Mesin Konsolidasian per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp80.152.663.742.705,- merupakan penggabungan peralatan dan mesin pada neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp35.044.874.703.675,- dan Pemerintah Daerah sebesar Rp45.107.789.039.030,-. Peralatan dan Mesin Konsolidasian per 31 Desember 2024 (*Audited*) meningkat sebesar Rp6.199.914.089.326,- atau 7,74 persen dibanding dengan peralatan dan mesin konsolidasian per 31 Desember 2023 (*Audited*) yang tercatat sebesar Rp73.952.749.653.379,-.

Gedung dan Bangunan Konsolidasian per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp100.647.167.121.578,- merupakan penggabungan Gedung Dan Bangunan pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp 28.847.046.095.081,- dan Pemerintah Daerah sebesar Rp71.800.121.026.497,-. Gedung dan Bangunan Konsolidasian per 31 Desember 2024 (*Audited*) meningkat sebesar Rp6.881.543.086.211,- atau 6,84 persen dibanding dengan Gedung dan Bangunan Konsolidasian per 31 Desember 2023 (*Audited*) yang tercatat sebesar Rp93.765.624.035.367,-.

Jalan, Irigasi, Dan Jaringan Konsolidasian per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp194.880.953.129.217,- merupakan penggabungan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp96.440.205.862.289,- dan Pemerintah Daerah sebesar Rp98.440.747.266.928,-. Jalan, Irigasi dan Jaringan Konsolidasian per 31 Desember 2024 (*Audited*) meningkat 7,13 persen atau sebesar Rp12.968.427.728.622,- dibandingkan Jalan, Irigasi dan Jaringan Konsolidasian per 31 Desember 2023 (*Audited*) yang tercatat sebesar Rp181.912.525.400.595,-.

Aset Tetap Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp6.351.891.250.459,- merupakan penggabungan Aset Tetap Lainnya pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp489.457.044.106,- dan Pemerintah Daerah sebesar Rp 5.862.434.206.353,-. Aset Tetap Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2024 (*Audited*) meningkat sebesar Rp5.457.177.791,- atau 0,09 persen dibanding dengan aset tetap lainnya konsolidasian per 31 Desember 2023 (*Audited*) yang tercatat sebesar Rp6.346.434.072.668,-.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Konsolidasian per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp11.338.497.702.504,- merupakan penggabungan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp10.101.333.041.310,- dan dari Pemerintah Daerah sebesar Rp1.237.164.661.194,-. Konstruksi Dalam Pengerjaan Konsolidasian per 31 Desember 2024 (*Audited*) mengalami penurunan sebesar Rp343.771.271.389,- atau 3,03 persen dibanding dengan Konstruksi Dalam Pengerjaan Konsolidasian per 31 Desember 2023 (*Audited*) yang tercatat sebesar Rp11.682.268.973.893,-.

Konsesi Jasa Konsolidasian per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp6.558.370.337.438,-. Penyajian konsesi jasa ini mulai tersaji pada neraca tahun 2022 yang merupakan penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintahan nomor 16 tentang perjanjian konsesi jasa – pemberi konsesi (PSAP 16) pada penyusunan Laporan Keuangan tahun 2022 tingkat Kementerian Negara/Lembaga dan tingkat pemerintah pusat. Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa. Saat ini nilai yang tersaji pada neraca konsolidasian tahun 2024 (*Audited*) menurun 0,08 persen yaitu sebesar Rp5.137.257.789,- dibandingkan tahun 2023 (*Audited*) yang tercatat sebesar Rp6.563.507.595.227,-.

Akumulasi Penyusutan Konsolidasian per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar minus Rp192.313.678.887.803,-. Akumulasi Penyusutan Konsolidasian per 31 Desember 2024 (*Audited*) mengalami peningkatan sebesar Rp16.638.616.958.888,- atau 8,65 persen dibanding Akumulasi Penyusutan Konsolidasian per 31 Desember 2023 (*Audited*) yang tercatat sebesar minus Rp175.675.061.928.915,-.

Properti Investasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2021 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor

17 Properti Investasi Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk: a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau b) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti Investasi Konsolidasian baru tersaji di tahun 2022 per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp1.678.653.839.878,-. Hal ini sejalan dengan PSAP Nomor 17 Properti Investasi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun 2022.

Seiring dengan hasil identifikasi aset yang memenuhi kriteria pencatatan sebagai Properti Investasi, Properti Investasi tahun 2024 (*Audited*) meningkat 9,74 persen atau sebesar Rp149.035.370.867,-. Nilai Properti Investasi yang tersaji dalam laporan ini seluruhnya berasal dari Pemerintah Pusat. Seiring dengan implementasi aplikasi SIPD yang telah diwajibkan untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mulai tahun 2024, seluruh Pemerintah Daerah di wilayah Jawa Tengah telah menyajikan properti investasi pada LKPD tahun 2024 (*Audited*) dengan total nilai properti investasi sebesar Rp2.879.675.127.977,- dan akumulasi penyusutan Rp174.450.534.343,-. Namun demikian sampai laporan ini disusun belum dapat dikonsolidasikan dengan Nilai Properti Investasi Pemerintah Pusat dikarenakan saat penyusunan laporan tahun 2024 (*Audited*), *database* Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) belum dilakukan pemutakhiran atas klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur keuangan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang terbaru termasuk diantaranya Konsesi Jasa dan Properti Investasi.

Berikut ini data properti investasi yang tersaji pada LKPD tahun 2024 (*Audited*).

Tabel 16. Properti Investasi pada LKPD Tahun 2024 (*Audited*)
(dalam juta rupiah)

No	Pemerintah Daerah	Tanah	Gedung Bangunan	Akumulasi Penyusutan	Properti Investasi Netto
1	Provinsi Jawa Tengah	122.427	35.569	- 20.706	137.290
2	Kab. Banjarnegara	129.273	19.444	- 7.509	141.208
3	Kab. Banyumas	4.831	59	- 44	4.846
4	Kab. Batang	62.543	-	-	62.543
5	Kab. Blora	228.332	5.590	- 1.103	232.819
6	Kab. Boyolali	12.141	17.573	- 1.746	27.968
7	Kab. Brebes	83.643	13.783	- 538	96.888
8	Kab. Cilacap	38.222	7.039	- 1.505	43.756
9	Kab. Demak	48.049	274.154	- 42.119	280.085
10	Kab. Grobogan	132.417	-	-	132.417
11	Kab. Jepara	16.893	2.506	- 50	19.349
12	Kab. Karanganyar	41.090	10.952	- 1.756	50.287
13	Kab. Kebumen	134	-	-	134
14	Kab. Kendal	87.313	-	-	87.313

15	Kab. Klaten	2.825	438	- 261	3.002
16	Kab. Kudus	22.363	27.569	- 9.165	40.767
17	Kab. Magelang	14.046	2.798	- 1.675	15.169
18	Kab. Pati	6.272	-	-	6.272
19	Kabupaten Pekalongan	92.580	15.848	- 11.333	97.095
20	Kabupaten Pemalang	9.956	29.443	- 3.211	36.188
21	Kabupaten Purbalingga	46.115	23.950	- 4.144	65.921
22	Kabupaten Purworejo	49.527	1.752	- 408	50.871
23	Kabupaten Rembang	808	-	-	808
24	Kabupaten Semarang	204.221	21.079	- 9.268	216.032
25	Kabupaten Sragen	28.264	3.898	- 1.673	30.489
26	Kabupaten Sukoharjo	6.067	26.192	- 5.803	26.456
27	Kabupaten Tegal	30.209	12.336	- 987	41.558
28	Kabupaten Temanggung	74.456	4.642	- 272	78.825
29	Kabupaten Wonogiri	48.126	-	-	48.126
30	Kabupaten Wonosobo	62.379	14.623	- 4.629	72.373
31	Kota Magelang	57.937	12.549	- 5.633	64.853
32	Kota Pekalongan	139.206	19.021	- 1.838	156.389
33	Kota Salatiga	12.949	28.118	- 2.243	38.823
34	Kota Semarang	143.372	105.497	- 22.425	226.443
35	Kota Surakarta	29.400	52.355	- 12.405	69.350
36	Kota Tegal	2.509	-	-	2.509
TOTAL		2.090.899	788.776	- 174.451	2.705.225

Dana Cadangan Konsolidasian adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana Cadangan Konsolidasian per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar **Rp127.477.022.428,-** menurun sangat signifikan sebesar **Rp875.660.876.662,-** atau **87,29** persen dibandingkan Dana Cadangan Konsolidasian per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar **Rp1.003.137.899.090,-**. Dana cadangan ini seluruhnya merupakan dana cadangan pada Pemerintah Daerah yaitu pada Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Kota Magelang. Hal ini mengindikasikan penggunaan dana cadangan yang signifikan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah di sepanjang tahun 2024 seiring dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak.

Piutang Jangka Panjang Konsolidasian adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang Konsolidasian per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar **Rp41.527.632.253,-** dan 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar **Rp43.840.349.897,-**. Piutang Jangka Panjang ini merupakan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Aset Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp7.138.449.919.552,- terdiri dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, Dana Yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Lain-lain dan Akumulasi Amortisasi-Aset Lainnya. Aset Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2024 (*Audited*) mengalami penurunan sebesar Rp2.210.684.994.617,- atau sebesar 23,64 persen dibanding aset lainnya konsolidasian per 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp 9.349.134.914.169,-.

Dalam **Aset Lain-Lain** tahun 2024 (*Audited*) sebesar Rp6.939.970.754.192,- terdapat pencatatan mengenai saldo pokok pokok penerimaan Dana Bagi Hasil Non Tunai melalui fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF) di beberapa Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp8.346.173.020,-.

Treasury Deposit Facility merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023. Penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU secara non tunai melalui fasilitas TDF, besaran dan perhitungan remunerasi, dan penarikan dana TDF diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Kebijakan akuntansi pencatatan TDF merujuk pada Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah nomor 900.1.13.1/7481/Keuda mengenai Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF). Rincian *Treasury Deposit Facility* (TDF) pada Aset Lain-Lain Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di wilayah Jawa Tengah tahun 2024 (*Audited*) adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Treasury Deposit Facility (TDF) pada LKPD Tahun 2024 (*Audited*)
(dalam rupiah)

No	Pemerintah Daerah	Nilai TDF
1	Kab. Banjarnegara	1.840.320,-
2	Kab. Blora	92.512.000,-
3	Kab. Brebes	427.508.000,-
4	Kab. Cilacap	174.119.000,-
5	Kab. Jepara	169.863.700,-
6	Kab. Klaten	483.664.000,-
7	Kab. Pati	457.941.000,-
8	Kabupaten Pemalang	24.701.000,-
9	Kabupaten Semarang	74.766.000,-
10	Kabupaten Sukoharjo	363.985.000,-
11	Kota Pekalongan	574.971.000,-
12	Kota Semarang	5.272.358.000,-
13	Kota Surakarta	227.944.000,-
TOTAL		8.346.173.020,-

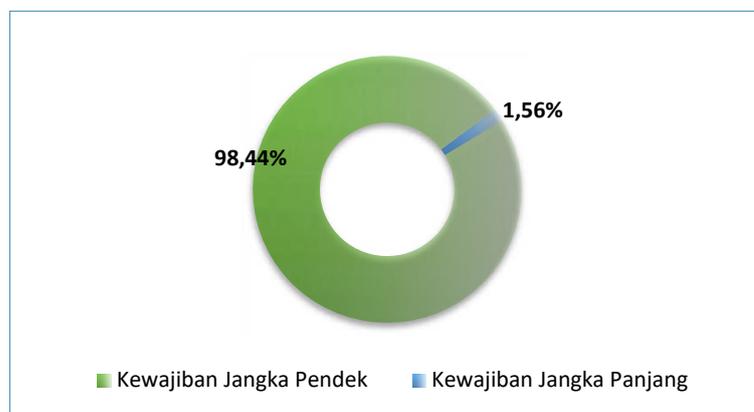
D.2.2 KEWAJIBAN KONSOLIDASIAN

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Konsolidasian per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp3.846.001.454.305,- dan 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp 3.370.399.575.502,-.

Kewajiban jangka pendek mendominasi kewajiban konsolidasian pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu sebesar 98,44 persen seperti ditunjukkan dalam grafik berikut:

Grafik 31. Struktur Kewajiban Konsolidasian Per 31 Desember 2024 (*Audited*)



Kewajiban Jangka Pendek Konsolidasian merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek Konsolidasian terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga Konsolidasian, Utang Kepada Pihak Ketiga Konsolidasian, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Konsolidasian, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya, Utang Biaya Pinjaman Konsolidasian, Pendapatan Diterima Dimuka Konsolidasian, Hibah Yang Belum Disahkan, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya Konsolidasian. Kewajiban Jangka Pendek Konsolidasian per 31 Desember 2024 (*Audited*) dan 31 Desember 2023 (*Audited*) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18. Perbandingan Kewajiban Jangka Pendek Konsolidasian Tahun 2024 (*Audited*) dan Tahun 2023 (*Audited*)
(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	1.212.806.960	2.682.814.176	(1.470.007.216)
Utang Kepada Pihak Ketiga	2.729.414.131.507	2.158.835.577.859	570.578.553.648
Utang Bunga	550.196.863	1.127.429.767	(577.232.904)

Utang Transfer	126.244.768.421	9.550.945.975	116.693.822.446
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	73.290.015.820	112.929.070.900	(39.639.055.080)
Utang Jangka Pendek Lainnya	324.182.031.290	457.261.890.423	(133.079.859.133)
Uang Muka dari KPPN	771.837.450	115.969.974	655.867.476
Utang Yang Belum Ditagihkan	3.216.475.000	0	3.216.475.000
Utang Lainnya	0	346.324.212.060	(346.324.212.060)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	392.942.941.875	0	392.942.941.875
Pendapatan Diterima Dimuka	134.305.849.830	0	134.305.849.830
Total Kewajiban Jangka Pendek	3.786.131.055.016	3.088.827.911.134	697.303.143.882
Konsolidasian			

Kewajiban Jangka Panjang Konsolidasian adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan melewati 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang Konsolidasian per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar **Rp59.870.399.289,-** dan 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar **Rp281.571.664.368,-** Kewajiban jangka panjang konsolidasian mengalami penurunan sangat signifikan sebesar **Rp222.325.910.754,-** atau **371,35** persen dibandingkan kewajiban jangka panjang konsolidasian per 31 Desember 2023 (*Audited*). Utang Jangka Panjang Konsolidasian ini merupakan Kewajiban Jangka Panjang Dalam Negeri pada Pemerintah Daerah meliputi Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan Dan Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Non Perbankan.

D.2.3 EKUITAS KONSOLIDASIAN

Ekuitas akhir per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar **Rp608.746.791.618.145,-**. Ekuitas tahun 2024 (*Audited*) meningkat **2,18** persen atau sebesar **Rp12.995.699.996.950,-** dibandingkan ekuitas tahun 2023 (*Audited*) yang tercatat sebesar **Rp595.751.091.621.195,-**.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PER 31 DESEMBER 2024 (*Audited*)

Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah menyajikan informasi yang berkaitan dengan saldo awal ekuitas, kenaikan/penurunan ekuitas dan saldo akhir ekuitas pada tahun berjalan yang nantinya akan disajikan di neraca. Saldo awal ekuitas berasal dari saldo akhir ekuitas pada Neraca Konsolidasi Tingkat wilayah tahun sebelumnya.

E.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas awal per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar **Rp596.518.186.575.945,-** meningkat **Rp9.468.215.936.652,-** jika dibandingkan ekuitas awal per per 31 Desember 2023 (*Audited*) yang tercatat sebesar **Rp587.049.970.639.293,-**

E.2. KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang bersumber dari dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan yang mendasar sebesar Rp 3.448.308.721.292,- terdiri dari :

1. Koreksi nilai persediaan sebesar Rp86.495.555.761,-,
2. Koreksi nilai aset tetap non revaluasi sebesar Rp2.649.338.039.019,-,
3. Koreksi atas Reklasifikasi Aset sebesar Rp126.660.745.874,-, dan
4. Koreksi Lain-lain sebesar Rp585.814.380.638-.

E.3. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi antar entitas per 31 Desember 2024 (Audited) sebesar Rp1.070.110.145.731,- merupakan transaksi antar entitas yang terjadi pada Pemerintah Pusat. Nilai ini meningkat sangat signifikan dibandingkan transaksi antar entitas per 31 Desember 2023 (Audited) sebesar minus Rp66.583.835.331.137,-.

E.4. EKUITAS AKHIR

Ekuitas akhir per 31 Desember 2024 (Audited) sebesar Rp608.746.791.618.16,-. Nilai ini berasal dari ekuitas awal Rp596.518.186.575.945,- dipengaruhi kenaikan/penurunan ekuitas sampai dengan 31 Desember 2024 (Audited) sebesar Rp12.228.605.042.219-.

Ekuitas akhir tahun 2024 (Audited) meningkat 2,19 persen atau sebesar Rp13.052.407.334.597,- dibandingkan ekuitas tahun 2023 (Audited) yang tercatat sebesar Rp595.694.384.283.567,-.



LAMPIRAN



LKPK & LSKP – TW Audited 2024
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 (AUDITED) DAN 2023 (AUDITED)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
A. Pendapatan		
I. Pendapatan Perpajakan	107.154.970.260.382	98.051.072.202.888
1. Pajak Dalam Negeri	104.406.171.581.309	95.835.311.463.417
2. Pajak Perdagangan Internasional	2.748.798.679.073	2.215.760.739.471
II. Pendapatan Negara Bukan Pajak	7.434.835.435.498	7.152.703.279.143
1. Penerimaan Sumber daya Alam	-	-
2. Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan	-	-
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	2.937.694.432.191	3.111.636.636.825
4. Pendapatan BLU	4.497.141.003.307	4.041.066.642.318
III. Pendapatan Hibah	-	-
Pendapatan Hibah	-	-
Jumlah Pendapatan (A.I+A.II+A.III)	114.589.805.695.880	105.203.775.482.031
B. Belanja		
I. Belanja Pemerintah Pusat	48.477.093.355.609	44.204.622.646.781
1. Belanja Pegawai	17.023.031.147.290	15.225.983.889.656
2. Belanja Barang	21.627.907.383.419	18.345.211.172.802
3. Belanja Modal	9.698.942.143.400	10.525.402.043.777
4. Pembayaran Bunga Utang	-	-
5. Subsidi	-	-
6. Hibah	-	-
7. Bantuan Sosial	127.212.681.500	108.025.540.546
8. Belanja Lain-lain	-	-
II. Transfer ke Daerah	69.825.032.337.206	66.673.989.390.209
1. Dana Bagi Hasil	2.736.195.079.000	3.361.445.973.000
2. Dana Alokasi Umum	39.459.461.142.815	36.649.522.220.203
3. Dana Alokasi Khusus	18.817.016.282.971	17.921.104.336.246
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	3.656.013.113.151	3.162.394.196.834
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	15.161.003.169.820	14.758.710.139.412
4. Dana Otonomi Khusus	-	-
5. Dana Keistimewaan DIY	-	-
6. Dana Desa	8.164.441.240.420	8.055.547.049.260
7. Insentif Fiskal	647.918.592.000	686.369.811.500
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	118.302.125.692.815	110.878.612.036.990
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	(3.712.319.996.935)	(5.674.836.554.959)
D. Pembiayaan	-	-
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-SILPA (SIKPA) (D-C)	(3.712.319.996.935)	(5.674.836.554.959)

**LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH**
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 (AUDITED) DAN 2023 (AUDITED)
(Dalam Rupiah)

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
KEGIATAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN OPERASIONAL	123.137.915.827.757	181.070.177.327.395
PENDAPATAN PERPAJAKAN	115.827.412.948.430	106.928.645.895.284
Pendapatan Pajak Penghasilan	24.513.001.002.899	21.716.865.086.965
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	30.261.000.766.981	27.599.023.503.384
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	203.265.044.244	203.789.728.786
Pendapatan Cukai	57.515.156.484.520	54.546.318.130.962
Pendapatan Pajak Lainnya	578.292.998.739	611.207.451.430
Pendapatan Bea Masuk	2.687.395.922.047	2.192.137.416.306
Pendapatan Bea Keluar	69.300.729.000	59.308.675.451
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	7.312.831.559.327	7.560.947.026.902
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	2.745.940.782.709	3.429.432.524.865
Pendapatan Badan Layanan Umum	4.566.890.776.618	4.131.514.502.037
PENDAPATAN HIBAH	(2.328.680.000)	3.216.475.000
Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri	(2.328.680.000)	3.216.475.000
PENDAPATAN PENYESUAIAN	-	66.577.367.930.209
Pendapatan Dropping Dana Transfer	-	66.577.367.930.209
BEBAN OPERASIONAL	117.737.587.536.861	109.354.901.949.679
Beban Pegawai	18.525.250.027.248	16.617.723.696.793
Beban Persediaan	2.444.109.037.689	2.536.477.050.082
Beban Barang dan Jasa	10.368.476.660.465	7.755.879.856.014
Beban Pemeliharaan	2.006.944.285.704	1.640.998.278.103
Beban Perjalanan Dinas	1.578.842.612.270	1.349.654.032.566
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	3.541.545.306.896	3.032.075.589.538
Beban Bantuan Sosial	205.027.951.887	109.848.877.405
Beban Transfer	69.745.881.926.764	66.577.367.930.209
Beban Penyusutan dan Amortisasi	8.819.757.640.578	9.576.886.792.705
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	501.752.087.360	157.989.846.264
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	5.400.328.290.896	71.715.275.377.716
KEGIATAN NON OPERASIONAL		
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	(3.128.695.189.429)	(2.153.084.262.651)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	31.546.513.219	32.425.795.730
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	3.160.241.702.648	2.185.510.058.381
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	27.538.149.870	377.405.991.879
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	63.511.280.574	391.337.027.137
Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	35.973.130.704	13.931.035.258
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(3.101.157.039.559)	(1.775.678.270.772)
POS LUAR BIASA	-	-
SURPLUS (DEFISIT) LO	2.299.171.251.337	69.939.597.106.944

NERACA PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 (AUDITED) DAN 2023 (AUDITED)
 (Dalam Rupiah)

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas		
Kas di Bendahara Pengeluaran	771.837.450	887.807.424
Kas di Bendahara Penerimaan	50.000	239.453.459
Kas Lainnya dan Setara Kas	1.873.669.708.181	1.135.611.436.864
Kas pada BLU	3.611.668.789.019	3.801.594.760.302
Jumlah Kas dan Setara Kas	5.486.110.384.650	4.210.267.943.531
Investasi Jangka Pendek BLU	811.350.000.000	777.817.614.000
Belanja dibayar di muka	16.509.868.864	52.873.662.998
Uang Muka Belanja	88.247.451.939	5.908.250
Pendapatan yang Masih harus Diterima	17.661.835.932	22.309.013.615
Piutang		
Piutang Perpajakan	13.807.829.763.706	13.231.421.158.027
Piutang Bukan Pajak	1.051.835.739.083	966.027.792.097
Piutang dari Kegiatan BLU	372.777.866.008	321.663.702.794
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(1.880.009.018.373)	(1.640.841.304.119)
Jumlah Piutang	13.352.434.350.424	10.220.472.074.610
Persediaan	10.237.584.181.736	9.447.749.842.599
Jumlah Aset Lancar	30.009.898.073.545	24.544.619.141.068
Investasi Jangka Panjang		-
Jumlah Investasi Jangka Panjang		-
Aset Tetap		
Tanah	251.411.684.377.982	250.215.095.812.763
Peralatan dan Mesin	35.044.874.703.675	31.773.232.310.030
Gedung dan Bangunan	28.847.046.095.081	26.216.576.098.014
Jalan, Irigasi dan Jaringan	96.440.205.862.289	89.762.524.490.360
Aset Tetap Lainnya	489.457.044.106	473.633.817.132
Konstruksi Dalam Pengerjaan	10.101.333.041.310	10.134.139.812.785
Aset Konsesi Jasa	6.558.370.337.438	6.563.507.595.227
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(81.416.053.834.614)	(73.836.299.565.981)
Jumlah Aset Tetap	347.476.917.627.267	338.303.540.216.774
Properti Investasi		
Properti Investasi	1.701.250.183.345	1.424.663.121.000
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(22.596.343.467)	(4.929.796.954)
Jumlah Properti Investasi	1.678.653.839.878	1.419.733.324.046
Piutang Jangka Panjang		
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	907.332.097	992.582.097
Piutang Jangka Panjang Lainnya	88.310.677	97.310.677
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya	(96.443.994)	(98.693.994)
Jumlah Piutang Jangka Panjang	899.198.780	985.613.780
Aset Lainnya		
Kemitraan Pihak Ketiga	5.373.335.000	5.373.335.000
Aset Tak Berwujud	1.013.044.122.541	843.246.777.557
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	564.608.907.801	468.566.012.668
Aset Lain-lain	2.806.955.893.357	4.163.255.779.484
Akum.Penyusutan Aset Lainnya	(1.280.039.578.760)	(1.333.027.685.352)
Akum.Amortisasi Aset Lainnya	(525.072.225.034)	(409.933.555.859)
Jumlah Aset Lainnya	2.584.870.454.905	11.078.803.940.854
JUMLAH ASET	381.751.239.194.375	374.244.745.631.900
KEWAJIBAN		
Kewajiban Jangka Pendek		
Utang Kepada Pihak Ketiga	1.225.594.655.886	896.265.552.296
Utang Transfer	222.974.818.242	9.550.945.975
Hibah Yang Belum Disahkan	3.216.475.000	-
Uang Muka dari KPPN	771.837.450	115.969.974
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	392.942.941.875	338.974.986.881
Pendapatan Diterima Dimuka	134.305.849.830	118.286.903.542
Utang Jangka Pendek Lainnya	7.208.782.228	5.716.590.411

LKPK DAN LSKP TINGKAT WILAYAH 2024 (AUDITED)

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	1.987.015.360.511	1.368.910.949.079
Kewajiban Jangka Panjang		
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		
JUMLAH KEWAJIBAN	1.987.015.360.511	1.368.910.949.079
EKUITAS		
Ekuitas	379.764.223.833.864	372.875.834.682.821
JUMLAH EKUITAS	379.764.223.833.864	372.875.834.682.821
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	381.751.239.194.375	374.244.745.631.900

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 (AUDITED) DAN 2023 (AUDITED)

(Dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023
EKUITAS AWAL	373.642.929.637.575	368.981.148.004.431
Penyesuaian Ekuitas Awal	-	-
EKUITAS AWAL SETELAH PENYESUAIAN	373.642.929.637.575	368.981.148.004.431
SURPLUS / (DEFISIT) LO	2.299.171.251.337	69.939.597.106.944
KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		
Penyesuaian Nilai Aset	-	-
Koreksi SILPA	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	86.403.535.497	16.418.187.842
Selisih Revaluasi Aset	-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	2.649.338.039.019	816.257.656.388
Koreksi Atas Reklasifikasi	126.660.745.874	8.989.642.876
Koreksi Lain-lain	(110.389.521.169)	(302.740.584.523)
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	2.752.012.799.221	538.924.902.583
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS KEUNTUNGAN / KERUGIAN YANG BELUM TEREALISASI REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE EKUITAS KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	1.070.110.145.731	(66.583.835.331.137)
	-	-
	-	-
	6.121.294.196.289	3.894.686.678.390
EKUITAS AKHIR	379.764.223.833.864	372.875.834.682.821

**LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH**
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 (AUDITED) DAN 2023 (AUDITED)

(Dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
I. Arus Kas Masuk		
1. Penerimaan Perpajakan		
a. Pendapatan Pajak Penghasilan	22.972.547.124.393	20.304.325.668.517
b. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	23.907.920.117.214	22.028.452.100.060
c. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	119.292.328.055	42.901.788.460
e. Pendapatan Cukai	56.831.048.806.960	52.845.748.082.000
f. Pendapatan Pajak Lainnya	575.363.204.687	613.883.824.380
g. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	2.748.798.679.073	2.215.760.739.471
Total Penerimaan Perpajakan	107.154.970.260.382	98.051.072.202.888
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak		
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	-	-
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	-	-
c. Pendapatan PNBP Lainnya	2.906.147.918.972	3.079.230.799.973
d. Pendapatan Badan Layanan Umum	4.497.141.003.307	4.041.066.642.318
Total Penerimaan Negara Bukan Pajak	7.403.288.922.279	7.120.297.442.291
3. Penerimaan Hibah	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)	114.558.259.182.661	105.171.369.645.179
II. Arus Kas Keluar		
1. Belanja Pegawai	17.023.031.147.290	15.225.983.889.656
2. Belanja Barang	21.627.907.383.419	18.345.211.172.802
3. Belanja Pembayaran Bunga Utang	-	-
4. Belanja Subsidi	-	-
5. Belanja hibah	-	-
6. Belanja Bantuan Sosial	127.212.681.500	108.025.540.546
7. Belanja Lain-lain	-	-
8. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak	1.420.832.715.000	1.787.380.395.000
9. Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	199.081.189.000	267.736.714.000
10. Transfer Dana Bagi Hasil Cukai	1.116.281.175.000	1.306.328.864.000
11. Dana Alokasi Umum	39.459.461.142.815	36.649.522.220.203
12. Transfer Dana Alokasi Khusus (Fisik)	3.656.013.113.151	3.162.394.196.834
13. Transfer Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan DID	647.918.592.000	686.369.811.500
14. Transfer Lainnya	15.161.003.169.820	14.758.710.139.412
15. Dana Desa	8.164.441.240.420	8.055.547.049.260
16. Hibah Kepada Daerah	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)	108.603.183.549.415	100.353.209.993.213
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II)	5.955.075.633.246	4.818.159.651.966
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
I. Arus Kas Masuk		
1. Pengelolaan dan Penjualan BMN	31.546.513.219	32.405.836.852
2. Penerimaan Kembali Investasi	-	-
3. Penjualan Aset Program Restrukturisasi	-	-
4. Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir	-	-
5. Penerimaan Investasi Pemerintah	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)	31.546.513.219	32.405.836.852
II. Arus Kas Keluar		
1. Belanja Modal	9.698.942.143.400	10.525.402.043.777
2. Pengeluaran Program Restrukturisasi	-	-
3. Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional	-	-
4. Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	-	-
5. Penyertaan Modal Negara	-	-
6. Pengeluaran Dukungan Infrastruktur	-	-
7. Pengeluaran Investasi Pemerintah	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)	9.698.942.143.400	10.525.402.043.777
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B.I - B.II)	(9.667.395.630.181)	(10.492.996.206.925)
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
I. Arus Kas Masuk		
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	-	-
2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	-	-

LKPK DAN LSKP TINGKAT WILAYAH 2024 (AUDITED)

3. Penerimaan Dari Penjadwalan Kembali Pokok Utang Luar Negeri	-	-
4. Penerimaan Dari Penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri	-	-
5. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	-	-
6. Penerimaan Pembiayaan Lain	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)	-	-
II. Arus Kas Keluar	-	-
1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	-	-
2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	-	-
3. Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri Melalui Penjadwalan Kembali	-	-
4. Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari Subsidiary Loan Agreement	-	-
5. Pengeluaran Pembiayaan Lain	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (C.I - C.II)	-	-
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
1. Perhitungan Pihak Ketiga (Netto)	-	-
2. Transito (Netto)	79.986.511.370	461.337.070.283
3. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Netto)	-	-
4. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Netto)	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (D)	79.986.511.370	461.337.070.283
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN	(3.632.333.485.565)	(5.213.499.484.676)
Penggunaan SAL	-	-
Penyesuaian Pembukuan	8.553.806.863	(67.110.149.914.475)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN	(3.623.779.678.702)	(72.323.649.399.151)
SALDO AWAL KAS	3.206.254.956.180	2.434.451.334.609
SALDO AKHIR KAS	(417.524.722.522)	(69.889.198.064.542)
Kas Lainnya & Setara Kas Selain Hibah yg Sudah Disahkan	-	-
Kas BLU yg Belum Disahkan/Lainnya	-	-
Kas/Dana yg Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya)	-	-
Kas Transito (Kiriman Uang)	-	-
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	(417.524.722.522)	(69.889.198.064.542)

**LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 (AUDITED) DAN 2023 (AUDITED)

(Dalam Rupiah)

KODE	AKUN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH	TAHUN 2024	TAHUN 2023
TRANSAKSI YANG MEMPENGARUHI KEKAYAAN BERSIH :			
1	Pendapatan	114.557.998.150.161	216.049.981.682.169
11	Pajak	106.789.407.278.910	98.046.252.348.207
12	Kontribusi Sosial	-	-
13	Hibah	-	-
14	Pendapatan Lainnya	7.768.590.871.251	118.003.729.333.962
2	Beban	103.068.271.921.514	100.353.209.993.213
21	Kompensasi Pegawai	17.023.031.147.290	16.530.198.785.943
22	Penggunaan Barang dan Jasa	15.513.930.012.819	12.108.938.216.963
23	Konsumsi Aset Tetap	-	-
24	Bunga	-	-
25	Subsidi	-	-
26	Hibah	69.825.032.337.206	66.673.989.390.209
27	Manfaat Sosial	127.212.681.500	108.025.540.546
28	Beban Lainnya	579.065.742.699	4.932.058.059.552
GOB	Saldo Operasi Bruto (1-2+23+NOBz)	11.489.726.228.647	115.696.771.688.956
NOB	Saldo Operasi Neto (1-2+NOBz)	11.489.726.228.647	115.696.771.688.956
TRANSAKSI ASET NON KEUANGAN			
31	Akuisisi Aset Non Keuangan Neto	15.202.046.225.582	10.492.996.206.925
311	Aset Tetap	9.582.811.859.761	10.011.705.596.377
312	Perubahan Persediaan	5.534.911.627.901	-
313	Barang Berharga	-	-
314	Aset Non Produksi	84.322.737.920	481.290.610.548
NLB	Saldo Pinjaman / Pinjaman Neto	(3.712.319.996.935)	105.203.775.482.031
TRANSAKSI ASET KEUANGAN DAN KEWAJIBAN (PEMBIAYAAN)			
32	Akuisisi Aset Keuangan Neto	(3.712.319.996.935)	105.203.775.482.031
321	Akuisisi Aset Keuangan Dalam Negeri Neto	(3.712.319.996.935)	105.203.775.482.031
322	Akuisisi Aset Keuangan Luar Negeri Neto	-	-
33	Keterjadian Kewajiban Neto	-	-
331	Keterjadian Kewajiban Dalam Negeri Neto	-	-
332	Keterjadian Kewajiban Luar Negeri Neto	-	-
Pemeriksaan Vertikal : Perbedaan antara Saldo Neto Peminjaman/ Pinjaman dengan Pembiayaan (1-2-31=32-33-NLB=0)		-	-

Keterangan:

Pada cetakan face SPAN SIKRI MP tidak menyajikan face LSKPP. Nilai-nilai pada LO LSKPP periode Tahun 2024 *Audited* dan Tahun 2023 *Audited* ini disusun dengan menggunakan angka-angka dari GFS Table hasil SPAN SIKRI MP yaitu tabel 1, tabel 2 dan tabel 3

NERACA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 (AUDITED) DAN 2023 (AUDITED)

(Dalam Rupiah)

KODE	AKUN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH	TAHUN 2024	TAHUN 2023
6	KEKAYAAN BERSIH	379.764.223.833.864	374.516.774.680.934
61	ASET NON KEUANGAN	361.413.417.195.985	355.108.659.985.221
611	ASET TETAP	99.764.148.636.267	95.866.075.406.844
6111	Gedung dan Bangunan	90.910.458.138.135	84.695.798.923.895
6112	Mesin dan Peralatan	7.712.275.592.300	7.485.497.187.249
6113	Aset Tetap Lainnya	1.141.414.905.832	3.684.779.295.700
612	Persediaan	10.237.584.181.736	9.007.716.495.050
613	Barang Berharga	-	-
614	Aset Non Produksi	251.411.684.377.982	250.234.868.083.327
6141	Tanah	251.411.684.377.982	250.215.095.812.763
6142	Sumber Daya Energi dan Mineral	-	-
6143	Aset yang timbul secara alamiah lainnya	-	-
6144	Aset Non Produksi tidak berwujud	-	19.772.270.564
62	Aset Keuangan (621+622+623)	20.337.821.998.390	20.777.025.644.792
6202	Uang dan Deposito (6212+6222)	6.862.069.292.451	5.406.899.470.717
6203	Surat Berharga Utang (6213+6223)	-	789.067.614.000
6204	Pinjaman (6214+6224)	88.310.677	-
6205	Ekuitas dan Saham Dana Investasi (6215+6225)	-	-
6206	Asuransi, Pensiun dan Skema Jaminan yang terstandarisasi (6216+6226)	-	-
6207	Derivatif Keuangan dan Opsi Saham Pegawai (6217+6227)	-	-
6208	Piutang Lainnya (6218+6228)	13.475.664.395.262	14.581.058.560.075
621	Dalam Negeri	20.337.821.998.390	20.777.025.644.792
6212	Uang dan Deposito dalam mata uang domestik	6.862.069.292.451	5.406.899.470.717
6213	Surat Berharga Utang dalam Negeri	-	789.067.614.000
6214	Pinjaman Dalam Negeri	88.310.677	-
6215	Ekuitas dan Saham Dana Investasi Dalam Negeri	-	-
6216	Asuransi, Pensiun dan Skema Jaminan yang terstandarisasi dalam negeri	-	-
6217	Derivatif Keuangan dan Opsi Saham Pegawai Dalam Negeri	-	-
6218	Piutang Lainnya Dalam Negeri	13.475.664.395.262	14.581.058.560.075
622	Luar Negeri	-	-
6222	Uang dan Deposito dalam mata uang Asing	-	-
6223	Surat Berharga Utang Luar Negeri	-	-
6224	Pinjaman Luar Negeri	-	-
6225	Ekuitas dan Saham Dana Investasi Luar Negeri	-	-
6226	Asuransi, Pensiun dan Skema Jaminan yang terstandarisasi Luar Negeri	-	-
6227	Derivatif Keuangan dan Opsi Saham Pegawai Luar Negeri	-	-
6228	Piutang Lainnya Luar Negeri	-	-
623	Monetary gold and SDRs	-	-
63	Kewajiban (631 +632)	1.987.015.360.511	1.368.910.949.079
6302	Uang dan Deposito (6312+6322)	-	-
6303	Surat Berharga Utang (6313+63123)	-	-
6304	Pinjaman (6314+6324)	-	-
6305	Ekuitas Saham Dana Investasi (6315+6325)	-	-
6306	Asuransi, Pensiun dan Skema Jaminan yang terstandarisasi (6316+6326)	-	-
6307	Derivatif Keuangan dan Opsi Saham Pegawai (6317+6327)	-	-
6308	Utang Lainnya (6318+6328)	1.987.015.360.511	1.368.910.949.079
631	Domestik	1.987.015.360.511	1.368.910.949.079
6312	Uang dan Deposito Dalam Negeri	-	-

LKPK DAN LSKP TINGKAT WILAYAH 2024 (AUDITED)

6313	Surat Berharga Utang Dalam Negeri	-	-
6314	Pinjaman Dalam Negeri	-	-
6315	Ekuitas Saham Dana Investasi Dalam Negeri	-	-
6316	Asuransi, Pensiun dan Skema Jaminan yang terstandarisasi Dalam Negeri	-	-
6317	Derivatif Keuangan dan Opsi Saham Pegawai Dalam Negeri	-	-
6318	Utang Lainnya Dalam Negeri	1.987.015.360.511	1.368.910.949.079
632	Luar Negeri	-	-
6322	Uang dan Deposito dalam mata uang Asing	-	-
6323	Surat Berharga Utang Luar Negeri	-	-
6324	Pinjaman Luar Negeri	-	-
6325	Ekuitas dan Saham Dana Investasi Luar Negeri	-	-
6326	Asuransi, Pensiun dan Skema Jaminan yang terstandarisasi Luar Negeri	-	-
6327	Derivatif Keuangan dan Opsi Saham Pegawai Luar Negeri	-	-
6328	Utang Lainnya Luar Negeri	-	-

Keterangan:

Pada cetakan face SPAN SIKRI MP tidak menyajikan face LSKPP. Nilai-nilai pada Neraca LSKPP periode Tahun 2024 *Audited* dan Tahun 2023 *Audited* ini disusun dengan menggunakan angka-angka dari GFS Table hasil SPAN SIKRI MP yaitu tabel 6.

**LAPORAN ARUS EKONOMI LAINNYA STATISTIK KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 (AUDITED) DAN 2023 (AUDITED)**

Sampai saat ini Laporan Arus Ekonomi Lainnya belum dapat dihasilkan oleh SIKRI MP

**LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN KAS STATISTIK KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT**

TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 (AUDITED) DAN 2023 (AUDITED)

(Dalam Rupiah)

KODE	AKUN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH	TAHUN 2024	TAHUN 2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
1	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	114.557.998.150.161	216.049.981.682.169
11	Pajak	106.789.407.278.910	98.046.252.348.207
12	Kontribusi Sosial	-	-
13	Hibah	-	-
14	Penerimaan Lainnya	7.768.590.871.251	118.003.729.333.962
2	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	103.068.271.921.514	100.353.209.993.213
21	Kompensasi Pegawai	17.023.031.147.290	16.530.198.785.943
22	Pembelian Barang dan Jasa	15.513.930.012.819	12.108.938.216.963
23	Konsumsi Aset Tetap	-	-
24	Bunga	-	-
25	Subsidi	-	-
26	Hibah	69.825.032.337.206	66.673.989.390.209
27	Manfaat Sosial	127.212.681.500	108.025.540.546
28	Pembayaran Lainnya	579.065.742.699	4.932.058.059.552
CI0	Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi (C1 - C2)	11.489.726.228.647	115.696.771.688.956
ARUS KAS DARI INVESTASI ASET NON KEUANGAN			
31.1	Pembelian Aset Non Keuangan	15.233.853.771.301	10.525.402.043.777
311.1	Aset Tetap	9.614.619.405.480	10.044.111.433.229
312.1	Persediaan untuk Tujuan Strategis	5.534.911.627.901	-
313.1	Barang Berharga	-	-
314.1	Aset Non Produksi	84.322.737.920	481.290.610.548
31.2	Penjualan Aset Non Keuangan	31.807.545.719	32.405.836.852
311.2	Aset Tetap	31.807.545.719	32.405.836.852
312.2	Persediaan untuk Tujuan Strategis	-	-
313.2	Barang Berharga	-	-
314.2	Aset Non Produksi	-	-
31	Arus Kas Keluar Neto : Investasi pada Aset Non Keuangan (C31.1 - C31.2)	15.202.046.225.582	10.492.996.206.925
CSD	Surplus / Defisit Kas (C1 - C2 - C31)	(3.712.319.996.935)	105.203.775.482.031
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN			
32x	Akuisisi Aset Keuangan Neto selain Kas	(3.712.319.996.935)	105.203.775.482.031
321x	Domestik	(3.712.319.996.935)	105.203.775.482.031
322x	Luar Negeri	-	-
33	Keterjadian Kewajiban Neto	-	-
331	Domestik	-	-
332	Luar Negeri	-	-
NFB	Arus Kas Neto dari Aktivitas Pembiayaan (-C32x+C33)	3.712.319.996.935	105.203.775.482.031
NCB	Perubahan Kas Neto (CSD-C32+C33)	-	-

Keterangan:

Pada cetakan face SPAN SIKRI MP tidak menyajikan face LSKPP. Nilai-nilai pada Laporan Sumber dan Penggunaan Kas LSKPP periode Tahun 2024 *Audited* dan Tahun 2023 *Audited* ini disusun dengan menggunakan angka-angka dari GFS Table hasil SPAN SIKRI MP yaitu tabel 1, tabel 2 dan tabel 3.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 (AUDITED) DAN 2023 (AUDITED)**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
A. Pendapatan Pemerintah Daerah		
I. Pendapatan Asli Daerah	36.997.398.974.803	34.693.829.585.588
1. Pajak Daerah	22.445.036.866.427	21.743.639.148.955
2. Retribusi Daerah	10.302.070.678.214	1.039.516.599.675
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.646.758.281.959	1.502.509.857.053
4. Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah	2.603.533.148.203	10.408.163.979.905
II. Pendapatan Transfer	70.027.114.540.903	66.290.263.415.199
1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil	61.214.098.270.727	57.548.346.554.439
2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	8.812.362.799.176	8.741.916.860.760
3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya/Provinsi	653.471.000	-
4. Transfer Bantuan Keuangan	-	-
III. Lain-lain Pendapatan yang Sah	139.351.981.884	322.063.907.807
1. Pendapatan Hibah	137.312.676.399	307.937.115.274
2. Dana Darurat - LRA	500.000.000	14.011.666.486
3. Pendapatan Lainnya	1.539.305.485	115.126.047
Jumlah Pendapatan (A.I + A.II + A.III)	107.163.865.497.590	101.306.156.908.594
B. Belanja Negara		
I. Belanja Operasi	81.339.974.325.985	74.609.459.941.625
1. Belanja Pegawai	42.872.064.263.336	38.388.466.215.362
2. Belanja Barang dan Jasa	30.978.555.017.205	29.169.405.473.404
3. Belanja Bunga	14.788.929.517	27.474.958.228
4. Subsidi	8.472.385.961	13.284.963.148
5. Hibah	7.041.433.789.940	6.499.256.517.563
6. Bantuan Sosial	424.659.940.026	511.571.813.920
II. Belanja Modal	11.603.887.289.361	12.464.457.151.728
1. Belanja Modal Tanah	91.642.162.500	149.729.994.053
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.172.990.661.774	3.039.212.582.220
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.985.060.152.118	3.787.165.130.836
4. Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan	4.090.435.445.533	4.082.738.903.357
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	421.758.656.113	513.826.288.069
6. Belanja Modal Kontruksi dalam Pengerjaan	5.432.060.270	-
7. Belanja Modal Aset Lainnya	13.571.828.148	55.448.597.492
8. Belanja Modal BLUD	822.996.322.905	836.335.655.701
III. Belanja Tak Terduga	67.917.486.409	80.931.679.023
Belanja Tak Terduga	67.917.486.409	80.931.679.023
Jumlah Belanja (B.I + B.II + B.III)	93.011.779.101.755	87.154.848.772.376
C. Transfer		
I. Transfer/Bagi Hasil Pendapatan	540.248.534.240	477.717.356.751
1. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	476.369.176.193	406.089.620.720
2. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	63.879.358.047	71.627.736.031
II. Transfer Bantuan Keuangan	15.102.827.332.592	15.116.357.554.234
1. Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	316.479.028.000	1.761.543.149.292
2. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	14.786.348.304.592	13.354.814.404.942
3. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-
4. Transfer Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota	-	-
Jumlah Transfer Pemerintah Daerah	15.643.075.866.832	15.594.074.910.985
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH (B + C)	108.654.854.968.587	102.748.923.683.361
D. Surplus (Defisit) Anggaran (A- B - C)	(1.490.989.470.997)	(1.442.766.774.767)
E. Pembiayaan		
I. Penerimaan Pembiayaan	7.147.570.030.969	
1. Penggunaan SiLPA	6.191.741.200.744	
2. Pencairan Dana Cadangan	951.110.991.205	

3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	
4.	Pinjaman Dalam Negeri	-	
5.	Penerimaan Kembali Piutang	4.717.839.020	
6.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	
7.	Pinjaman Luar Negeri	-	
8.	Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya	-	
II.	Pengeluaran Pembiayaan	612.142.446.393	937.298.546.244
1.	Pembentukan Dana Cadangan	77.151.989.603	321.821.354.357
2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	207.749.418.474	303.293.192.924
3.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	324.436.038.316	309.083.998.963
4.	Pemberian Pinjaman Daerah	2.805.000.000	3.100.000.000
5.	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	-	-
6.	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	-	-
7.	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Pembiayaan (E.I + E.II)	6.535.427.584.576	7.636.145.133.350
E.	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (D+E)	5.044.438.113.579	6.193.378.358.583

**LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH DAERAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 (AUDITED) DAN 2023 (AUDITED)**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
KEGIATAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN		
PENDAPATAN ASLI DAERAH	38.411.142.234.387	36.043.015.542.364
Pendapatan Pajak Daerah-LO	23.194.510.897.003	22.273.826.920.712
Pendapatan Retribusi Daerah-LO	10.479.612.796.645	1.055.088.592.067
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	2.038.586.247.379	2.188.238.497.250
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah-LO	2.698.432.293.360	10.525.861.532.335
PENDAPATAN TRANSFER	61.410.135.918.522	57.969.269.281.676
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	60.762.214.359.766	57.282.899.470.176
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	647.921.558.756	686.369.811.500
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO	-	-
Bantuan Keuangan Daerah-LO	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	7.290.711.352.400	3.849.201.061.933
Pendapatan Hibah	7.177.218.405.658	3.844.922.544.174
Dana Darurat	-	-
Pendapatan Lainnya	113.492.946.742	4.278.517.759
JUMLAH PENDAPATAN	107.111.989.505.309	97.861.485.885.973
BEBAN		
BEBAN OPERASIONAL	93.803.575.831.005	85.862.533.092.683
Beban Pegawai	43.082.366.690.819	38.471.949.092.926
Beban Barang dan Jasa	30.838.813.560.325	29.690.991.365.985
Beban Bunga	19.362.539.598	26.910.993.282
Beban Subsidi	8.733.546.326	14.973.092.968
Beban Hibah	8.636.508.671.099	7.034.176.325.885
Beban Bantuan Sosial	465.042.793.696	547.131.995.493
Beban Penyusutan dan Amortisasi	10.177.599.534.003	9.651.537.659.136
Beban Penyisihan Piutang	555.661.803.796	388.884.078.370
Beban Lain-lain	19.486.691.343	35.978.488.638
BEBAN TRANSFER	7.531.411.851.235	7.556.047.803.834
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	505.104.881.659	575.027.535.882
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	64.388.817.403	54.597.514.724
Beban Transfer Bantuan Keuangan Daerah ke Pemda Lainnya	-	740.000.000
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	4.982.197.970.173	6.925.682.753.228
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.979.720.182.000	-
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus dan DID	-	-
JUMLAH BEBAN	101.334.987.682.240	93.418.580.896.517
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	5.777.001.823.069	4.442.904.989.456
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		
SURPLUS NON OPERASIONAL	385.514.372.767	598.749.014.236
Surplus penjualan aset non lancar	183.925.420.173	55.564.623.589
Surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang	11.227.070.000	175.360.426
Surplus dari kegiatan non operasional lainnya	190.361.882.594	543.009.030.221
DEFISIT NON OPERASIONAL	721.930.928.853	1.153.849.682.603
Defisit penjualan aset non lancar	368.389.968.192	471.731.275.524
Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang	-	1.189.457.359
Defisit dari kegiatan non operasional lainnya	353.540.960.661	680.928.949.720
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(336.416.556.086)	(555.100.668.367)
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	5.440.585.266.983	3.887.804.321.089
POS LUAR BIASA		
PENDAPATAN LUAR BIASA	-	200.000
BEBAN LUAR BIASA	29.570.343.124	46.574.644.260
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	(29.570.343.124)	(46.574.444.260)
SURPLUS (DEFISIT) LO	5.411.014.923.859	3.841.229.876.829

NERACA PEMERINTAH DAERAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 (AUDITED) DAN 2023 (AUDITED)
 (Dalam Rupiah)

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
ASET		
ASET LANCAR	11.887.323.372.100	12.264.161.015.573
Kas dan Setara Kas	5.055.044.362.598	6.198.944.392.031
Piutang Pendapatan	7.237.048.437.013	6.269.279.672.994
Piutang Lainnya	66.092.312.713	35.366.976.472
Penyisihan Piutang	(2.386.907.585.672)	(2.015.205.184.359)
Beban Dibayar Dimuka	20.855.616.711	18.876.603.227
Investasi Jangka Pendek	11.520.000	11.520.000
Persediaan	1.895.178.708.738	1.756.887.035.208
INVESTASI JANGKA PANJANG	18.960.830.425.674	18.447.756.140.767
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	22.058.443.930	181.562.769.784
Investasi Jangka Panjang Permanen	18.938.771.981.744	18.266.193.370.983
ASET TETAP	195.368.445.209.574	187.507.123.757.579
Tanah	83.817.814.062.760	80.046.390.512.932
Peralatan dan Mesin	45.107.789.039.030	42.179.517.343.349
Gedung dan Bangunan	71.800.121.026.497	67.549.047.937.353
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	98.440.747.266.928	92.150.000.910.235
Aset Tetap Lainnya	5.862.434.206.353	5.872.800.255.536
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.237.164.661.194	1.548.129.161.108
Akumulasi Penyusutan	(110.897.625.053.189)	(101.838.762.362.934)
DANA CADANGAN	127.477.022.428	1.003.137.899.090
ASET LAINNYA	4.594.207.898.120	5.654.566.751.788
Tagihan Jangka Panjang	40.628.433.473	42.912.501.117
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	288.434.995.163	757.740.239.996
Aset Tidak Berwujud	132.129.608.649	134.232.462.207
Aset Lain-lain	4.133.014.860.835	4.719.681.548.468
JUMLAH ASET	230.938.283.927.896	224.876.745.564.797
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.895.845.744.326	1.719.916.962.055
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.212.806.960	2.682.814.176
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	73.290.015.820	112.929.070.900
Utang Bunga	550.196.863	1.127.429.767
Pendapatan Diterima Dimuka	184.523.767.508	188.586.701.636
Utang Belanja	1.503.819.475.621	1.262.570.025.563
Utang Jangka Pendek Lainnya	132.449.481.554	152.020.920.013
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	59.870.399.289	281.571.664.368
Utang Dalam Negeri	59.870.399.289	281.571.664.368
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	1.955.716.143.615	2.001.488.626.423
EKUITAS	228.982.567.784.281	222.875.256.938.374
JUMLAH EKUITAS	228.982.567.784.281	222.875.256.938.374
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	230.938.283.927.896	224.876.745.564.797

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PEMERINTAH DAERAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 (AUDITED) DAN 2023 (AUDITED)**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
EKUITAS AWAL	222.875.256.938.370	218.068.822.634.862
Surplus/Defisit-LO	5.411.014.923.859	3.841.229.876.829
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	696.295.922.071	908.497.089.055
Koreksi Nilai Persediaan (BAS level 4)	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	92.020.264	13.864.012.885
Selisih Revaluasi Aset Tetap	696.203.901.807	(1.525.787.049)
Koreksi Lainnya	-	896.158.863.219
JUMLAH EKUITAS AKHIR	228.982.567.784.300	222.818.549.600.746

LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH DAERAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 (AUDITED) DAN 2023 (AUDITED)

(Dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pajak Daerah	(22.445.036.866.427)	(21.743.639.148.955)
Penerimaan Retribusi Daerah	(10.302.070.678.214)	(1.039.516.599.675)
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(1.646.758.281.959)	(1.502.509.857.053)
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	(2.603.533.148.203)	(10.408.163.979.905)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	(2.832.889.525.521)	(3.067.035.972.247)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	(246.619.669.745)	(173.815.768.006)
Penerimaan Dana Alokasi Umum	(39.426.464.980.815)	(36.644.960.339.955)
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	(18.708.124.094.646)	(17.662.534.474.231)
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	-
Penerimaan Dana Penyesuaian	-	-
Penerimaan Hibah	(137.312.676.399)	(307.937.115.274)
Penerimaan Dana Darurat	(500.000.000)	(14.011.666.486)
Penerimaan Lainnya	(1.539.305.485)	(115.126.047)
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	(98.350.849.227.414)	(92.564.240.047.834)
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	42.872.064.263.336	38.388.466.215.362
Pembayaran Barang	30.978.555.017.205	29.169.405.473.404
Pembayaran Bunga	14.788.929.517	27.474.958.228
Pembayaran Subsidi	8.472.385.961	13.284.963.148
Pembayaran Beban Hibah	7.041.433.789.940	6.499.256.517.563
Pembayaran Beban Bantuan Sosial	424.659.940.026	511.571.813.920
Pembayaran Tak Terduga	67.917.486.409	80.931.679.023
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	476.369.176.193	406.089.620.720
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	63.879.358.047	71.627.736.031
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	63.879.358.047	71.627.736.031
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	82.012.019.704.681	75.239.736.713.430
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(180.362.868.932.095)	(167.803.976.761.264)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Pencairan Dana Cadangan	(951.110.991.205)	(336.397.334.000)
Penjualan atas Tanah	-	-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	-
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	-
Penjualan Aset Lainnya	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	(951.110.991.205)	(336.397.334.000)
Arus Keluar Kas		
Pembentukan Dana Cadangan	77.151.989.603	321.821.354.357
Perolehan Tanah	91.642.162.500	149.729.994.053
Perolehan Peralatan dan Mesin	3.172.990.661.774	3.039.212.582.220
Perolehan Gedung dan Bangunan	2.985.060.152.118	3.787.165.130.836
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.090.435.445.533	4.082.738.903.357
Perolehan Aset Tetap Lainnya	421.758.656.113	513.826.288.069

Perolehan Aset Lainnya	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	207.749.418.474	295.593.192.924
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	11.046.788.486.115	12.190.087.445.816
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(11.997.899.477.320)	(12.526.484.779.816)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Masuk Kas		
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	(60.000.000.000)
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	(111.242.614.059)
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	(2.654.773.814)	(38.380.950.704)
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	(2.654.773.814)	(209.623.564.763)
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	324.436.038.316	195.679.994.563
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	113.404.004.400
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.805.000.000	2.100.000.000
Jumlah Arus Keluar Kas	327.241.038.316	312.183.998.963
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(329.895.812.130)	(521.807.563.726)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Masuk Kas	-	-
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
Arus Keluar Kas	-	-
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	-	-
Kenaikan/Penurunan Kas	(192.690.664.221.545)	(180.852.269.104.806)
Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Saldo Akhir Kas	(192.690.664.221.545)	(180.852.269.104.806)

**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PEMERINTAH DAERAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 (AUDITED) DAN 2023 (AUDITED)**

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	TAHUN 2024	TAHUN 2023
1	Saldo Anggaran Lebih Awal		
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		
3	Sub Total (1+2)		
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)		
5	Sub Total (3+4)		
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		
7	Lain-lain		
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir		

Keterangan:

Belum dapat menyajikan nilai LPSAL dikarenakan pada kertas kerja LKPKD versi 25.0 tidak tersedia untuk perekaman data dimaksud.

**LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 (AUDITED) DAN 2023 (AUDITED)

(Dalam Rupiah)

KODE	AKUN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH	TAHUN 2024	TAHUN 2023
TRANSAKSI YANG MEMPENGARUHI KEKAYAAN BERSIH			
1	Pendapatan	114.433.734.869.366	108.167.562.219.296
11	Pajak	22.445.036.866.427	21.743.639.148.955
12	Kontribusi Sosial	-	-
13	Hibah	77.490.766.589.828	73.486.549.449.912
14	Pendapatan Lainnya	14.497.931.413.111	12.937.373.620.429
2	Beban	104.354.828.998.816	97.201.647.348.354
21	Kompensasi Pegawai	41.615.607.869.261	38.388.466.215.362
22	Penggunaan Barang dan Jasa	31.161.515.975.477	28.592.184.084.917
23	Konsumsi Aset Tetap	-	-
24	Bunga	14.788.929.517	27.474.958.228
25	Subsidi	8.472.385.961	13.284.963.148
26	Hibah	25.031.015.085.696	25.444.175.139.225
27	Manfaat Sosial	424.659.940.026	511.571.813.920
28	Beban Lainnya	6.098.768.812.878	4.224.490.173.554
GOB	Saldo Operasi Bruto (1-2+23+NOBz)	10.078.905.870.550	10.965.914.870.942
NOB	Saldo Operasi Neto (1-2+NOBz)	10.078.905.870.550	10.965.914.870.942
TRANSAKSI ASET NON KEUANGAN			
31	Akuisisi Aset Non Keuangan Neto	11.569.895.341.547	12.408.681.645.709
311	Aset Tetap	11.479.337.942.367	12.258.951.651.656
312	Perubahan Persediaan	-	-
313	Barang Berharga	-	-
314	Aset Non Produksi	90.557.399.180	149.729.994.053
NLB	Saldo Peminjaman / Pinjaman Neto (1-2+NOBz-31)	(1.490.989.470.997)	(1.442.766.774.767)
TRANSAKSI ASET KEUANGAN DAN KEWAJIBAN (PEMBIAYAAN)			
32	Akuisisi Aset Keuangan Neto	(1.815.425.509.313)	(1.580.608.159.671)
321	Akuisisi Aset Keuangan Dalam Negeri Neto	(1.815.425.509.313)	(1.580.608.159.671)
322	Akuisisi Aset Keuangan Luar Negeri Neto	-	-
33	Keterjadian Kewajiban Neto	(324.436.038.316)	(137.841.384.904)
331	Keterjadian Kewajiban Dalam Negeri Neto	(324.436.038.316)	(137.841.384.904)
332	Keterjadian Kewajiban Luar Negeri Neto	-	-
Pemeriksaan Vertikal: Perbedaan antara Saldo Neto Peminjaman / Pinjaman dengan Pembiayaan (1-2-31=32-33-NLB=0)			-

Keterangan:

Pada cetakan face SPAN SIKRI MP tidak menyajikan face LSKPDK. Nilai-nilai pada LO LSKPDK periode Tahun 2024 Audited dan Tahun 2023 Audited ini disusun dengan menggunakan angka-angka dari GFS Table hasil SPAN SIKRI MP yaitu tabel 1, tabel 2 dan tabel 3.

**NERACA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 (AUDITED) DAN 2023 (AUDITED)**

(Dalam Rupiah)

KODE	AKUN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH	TAHUN 2023	TAHUN 2022
6	KEKAYAAN BERSIH	228.982.567.784.281	224.890.462.122.733
61	Aset Non Keuangan	201.528.768.387.796	194.117.924.803.462
611	Aset Tetap	115.588.519.917.331	112.086.937.907.582
6111	Gedung dan Bangunan	95.241.885.304.265	91.119.509.856.005
6112	Peralatan dan Mesin	10.446.311.636.195	10.277.258.391.276
6113	Aset Tetap Lainnya	9.900.322.976.871	10.499.004.918.471
6114	Sistem Persenjataan	-	191.164.741.830
612	Persediaan	1.895.178.708.738	1.756.887.035.208
613	Barang Berharga	-	-
614	Aset Non Produksi	84.045.069.761.726	80.274.099.860.672
6141	Tanah	83.817.814.062.760	80.046.390.512.932
6142	Aset Bawah Tanah	-	-
6143	Aset Yang Terjadi dengan secara alamiah lainnya	-	-
6144	Aset Non Produksi Tak Berwujud	227.255.698.966	227.709.347.740
62	Aset Keuangan	29.816.289.554.227	32.985.362.149.190
6202	Uang dan Deposito	5.182.521.385.026	7.202.082.291.121
6203	Surat Berharga Selain Saham	22.069.963.930	181.574.289.784
6204	Pinjaman	-	-
6205	Ekuitas dan Saham D I	18.938.771.981.744	18.266.193.370.983
6206	Asuransi,Pensiun dan Skema Jaminan yang Standarisasi	-	-
6207	Derivatif Keuangan	-	-
6208	Piutang Lainnya	5.672.926.223.527	7.335.512.197.302
621	Aset Keuangan Dalam Negeri	29.816.289.554.227	32.985.362.149.190
6212	Uang dan Deposito	5.182.521.385.026	7.202.082.291.121
6213	Surat Berharga Selain Saham	22.069.963.930	181.574.289.784
6214	Pinjaman	-	-
6215	Ekuitas dan Saham D I	18.938.771.981.744	18.266.193.370.983
6216	Asuransi,Pensiun dan Skema Jaminan yang Standarisasi	-	-
6217	Derivatif Keuangan	-	-
6218	Piutang Lainnya	5.672.926.223.527	7.335.512.197.302
622	Aset Keuangan Luar Negeri	-	-
6222	Uang dan Deposito	-	-
6223	Surat Berharga Selain Saham	-	-
6224	Pinjaman	-	-
6225	Ekuitas dan Saham D I	-	-
6226	Asuransi,Pensiun dan Skema Jaminan yang Standarisasi	-	-
6227	Derivatif Keuangan	-	-
6228	Piutang Lainnya	-	-
63	Kewajiban	2.362.490.157.742	2.212.824.829.919
6302	Uang dan Deposito	-	-
6303	Surat Berharga Utang	-	471.888.929
6304	Pinjaman	133.160.415.109	394.028.846.339
6305	Ekuitas dan Saham D I	-	-
6306	Asuransi,Pensiun dan Skema Jaminan yang Standarisasi	-	-

LKPK DAN LSKP TINGKAT WILAYAH 2024 (AUDITED)

6307	Derivatif Keuangan	-	-
6308	Piutang Lainnya	2.229.329.742.633	1.818.324.094.651
631	Kewajiban Dalam Negeri	2.362.490.157.742	2.212.824.829.919
6312	Uang dan Deposito	-	-
6313	Surat Berharga Utang	-	471.888.929
6314	Pinjaman Dalam Negeri	133.160.415.109	394.028.846.339
6315	Ekuitas dan Saham D I	-	-
6316	Asuransi,Pensiun dan Skema Jaminan yang Standarisasi	-	-
6317	Derivatif Keuangan	-	-
6318	Piutang Lainnya	2.229.329.742.633	1.818.324.094.651
632	Kewajiban Luar Negeri	-	-
6322	Surat Berharga Utang	-	-
6323	Pinjaman	-	-
6324	Utang Lainnya	-	-
6325	Ekuitas dan Saham D I	-	-
6326	Asuransi,Pensiun dan Skema Jaminan yang Standarisasi	-	-
6327	Derivatif Keuangan	-	-
6328	Piutang Lainnya	-	-

Keterangan:

Pada cetakan face SPAN SIKRI MP tidak menyajikan face LSKPDK. Nilai-nilai pada Neraca LSKPDK periode Tahun 2024 Audited dan Tahun 2023 Audited ini disusun dengan menggunakan angka-angka dari GFS Table hasil SPAN SIKRI MP yaitu tabel 6.

**LAPORAN ARUS EKONOMI LAINNYA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 (AUDITED) DAN 2023 (AUDITED)**

Sampai saat ini Laporan Arus Ekonomi Lainnya belum dapat dihasilkan oleh SIKRI MP

**LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN KAS STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 (AUDITED) DAN 2023 (AUDITED)

(Dalam Rupiah)

KODE	AKUN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH	TAHUN 2024	TAHUN 2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
1	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	114.433.734.869.366	108.167.562.219.296
11	Pajak	22.445.036.866.427	21.743.639.148.955
12	Kontribusi Sosial	-	-
13	Hibah	77.490.766.589.828	73.486.549.449.912
14	Penerimaan Lainnya	14.497.931.413.111	12.937.373.620.429
2	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	104.354.828.998.816	97.201.647.348.354
21	Kompensasi Pegawai	41.615.607.869.261	38.388.466.215.362
22	Pembelian Barang dan Jasa	31.161.515.975.477	28.592.184.084.917
23	Konsumsi Aset tetap	-	-
24	Bunga	14.788.929.517	27.474.958.228
25	Subsidi	8.472.385.961	13.284.963.148
26	Hibah	25.031.015.085.696	25.444.175.139.225
27	Manfaat Sosial	424.659.940.026	511.571.813.920
28	Pembayaran Lainnya	6.098.768.812.878	4.224.490.173.554
CIO	Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi (C1 - C2)	10.078.905.870.550	10.965.914.870.942
31.1	Pembelian Aset Non Keuangan	17.064.897.434.704	12.464.457.151.728
311.1	Aset Tetap	11.512.245.126.861	12.314.727.157.675
312.1	Persediaan untuk Tujuan Strategis	5.461.010.145.343	-
313.1	Barang Berharga	-	-
314.1	Aset Non Produksi	91.642.162.500	149.729.994.053
31.2	Penjualan Aset Non Keuangan	5.495.002.093.157	55.775.506.019
311.2	Aset Tetap	32.907.184.494	55.775.506.019
312.2	Persediaan untuk Tujuan Strategis	5.461.010.145.343	-
313.2	Barang Berharga	-	-
314.2	Aset Non Produksi	1.084.763.320	-
31	Arus Kas Keluar Neto : Investasi pada Aset Non Keuangan (C31.1 - C31.2)	11.569.895.341.547	12.408.681.645.709
CSD	Surplus / Defisit Kas (C1 - C2 - C31)	(1.490.989.470.997)	(1.442.766.774.767)
32x	Akuisisi Aset Keuangan Neto selain Kas	(1.815.425.509.313)	(1.580.608.159.671)
321x	Domestik	(1.815.425.509.313)	(1.580.608.159.671)
322x	Luar Negeri	-	-
33	Keterjadian Kewajiban Neto	(324.436.038.316)	(137.841.384.904)
331	Domestik	(324.436.038.316)	(137.841.384.904)
332	Luar Negeri	-	-
NFB	Arus Kas Neto dari Aktivitas Pembiayaan (-C32x+C33)	1.490.989.470.997	1.442.766.774.767
NCB	Perubahan Kas Neto (CSD-C32+C33)	-	-

Keterangan:

Pada cetakan face SPAN SIKRI MP tidak menyajikan face LSKPDK. Nilai-nilai pada Laporan Sumber dan Penggunaan Kas LSKPDK periode Tahun 2024 Audited dan Tahun 2023 Audited ini disusun dengan menggunakan angka-angka dari GFS Table hasil SPAN SIKRI MP yaitu tabel 1, tabel 2 dan tabel 3.

Kebijakan Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah

PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH DAERAH KONSOLIDASI	PERLAKUAN	KONSOLIDASI
A. Pendapatan Negara dan Hibah	A. Pendapatan Asli Daerah		A. Pendapatan dan Hibah
I. Penerimaan Perpajakan			I. Pendapatan Perpajakan
1. Pajak Dalam Negeri	1. Pendapatan Pajak Daerah	Dijumlahkan	1.Pajak Dalam Negeri
2. Pajak Perdagangan Internasional		Menggunakan angka dari LKPP.TW	2.Pajak Perdagangan Internasional
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak			II. Pendapatan Bukan Pajak
1. Penerimaan Sumber daya Alam		Menggunakan angka dari LKPP.TW	1. Pendapatan Sumber Daya Alam
	2. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Menggunakan angka dari LKPKD.TW	2. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
2. Pendapatan BLU	3. Pendapatan BLUD		3. Pendapatan BLU/BLUD
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	4. Pendapatan Retribusi Daerah	Dijumlahkan	4. Pendapatan Bukan Pajak Lainnya
	5. Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang Sah	Menggunakan angka dari LKPKD.TW	a. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
	B. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Menggunakan angka dari LKPKD.TW	
	a. Pendapatan Hibah	Menyesuaikan dengan Jumlah Setelah Eliminasi dalam Konsolidasian LKPKD-TW	b. Pendapatan Hibah
	b. Dana Darurat	Menggunakan angka dari LKPKD.TW	c. Dana Darurat
	c. Pendapatan Lainnya	Menyesuaikan dengan Jumlah Setelah Eliminasi dalam Konsolidasian LKPKD-TW	d. Pendapatan Lainnya
	C. Pendapatan Transfer		
	1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	Dieliminasi dengan Transfer Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah	
	a. Dana Bagi Hasil Pajak		
	b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA		
	c. Dana Alokasi Umum		
	d. Dana Alokasi Khusus		
	2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		
	a.Dana Otonomi Khusus		
	b.Dana Penyesuaian		
	c.Dana Keistimewaan		
	2. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Menyesuaikan dengan Jumlah Setelah Eliminasi	
	a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak		

	b. Pendapatan Bagi Hasil lainnya	dalam Konsolidasian LKPKD-TW	
	4) Bantuan Keuangan a. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	Menyesuaikan dengan Jumlah Setelah Eliminasi dalam Konsolidasian LKPKD-TW	
	b. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		
B. Belanja Pemerintah Pusat	D. Belanja Pemerintah Daerah		B. Belanja Pemerintah
1. Belanja Pegawai	1. Belanja Pegawai	Dijumlahkan	1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang	2. Belanja Barang		2. Belanja Barang
3. Belanja Modal	3. Belanja Modal		3. Belanja Modal
	4. Pembayaran Bunga Utang		4. Pembayaran Bunga Utang
	5. Subsidi		5. Subsidi
	6. Hibah		6. Hibah
4. Bantuan Sosial	7. Bantuan Sosial		7. Bantuan Sosial
	8. Belanja Tak Terduga	Menggunakan angka dari LKPKD-TW	8. Belanja Tak Terduga
C. Transferke Daerah		Dieliminasi dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Konsolidasi	
1. Dana Perimbangan			
Dana Alokasi Umum			
a. Dana Bagi Hasil			
b. Dana Alokasi Umum			
Dana Alokasi Khusus			
a. Dana Alokasi Khusus Fisik			
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik			
2. Dana Intensif Daerah			
3. Dana Keistimewaan DIY			
4. Dana Otonomi Khusus	E. Transfer		C. Transfer
	1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan	Menyesuaikan dengan Jumlah Setelah Eliminasi dalam Konsolidasian LKPKD-TW	
	a. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		
	b. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		
	2. Transfer Bantuan Keuangan		
	a. Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	Menyesuaikan dengan Jumlah Setelah Eliminasi dalam Konsolidasian LKPKD-TW	
	b. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	Menyesuaikan dengan Jumlah Setelah Eliminasi dalam Konsolidasian LKPKD-TW	
	c. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		1. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
	3. Transfer Dana Otonomi Khusus	Menggunakan angka dari LKPKD-TW	2. Dana Otonomi Khusus
D. SURPLUS/DEFISIT-LRA	F. SURPLUS/DEFISIT-LRA		E. SURPLUS/DEFISIT-LRA
	G. Pembiayaan		F. PEMBIAYAAN

LKPK DAN LSKP TINGKAT WILAYAH 2024 (AUDITED)

	I. Penerimaan Pembiayaan		I. Penerimaan Pembiayaan
	1. Penggunaan SILPA	Menggunakan angka dari LKPKD -TW	1. Penggunaan SILPA
	2. Pencairan Dana Cadangan		2. Pencairan Dana Cadangan
	3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
	4. Pinjaman Dalam Negeri		4. Pinjaman Dalam Negeri
	5. Penerimaan Kembali Piutang		5. Penerimaan Kembali Piutang
	6. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		6. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya
	7. Penerimaan Pinjaman Luar Negeri		7. Penerimaan Pinjaman Luar Negeri
	8. Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya		8. Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya
	II. Pengeluaran Pembiayaan		I. Pengeluaran Pembiayaan
	1. Pembentukan Dana Cadangan	Menggunakan angka dari LKPKD -TW	1. Pembentukan Dana Cadangan
	2. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		2. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
	3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
	4. Pemberian Pinjaman Daerah		4. Pemberian Pinjaman Daerah
	5. Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya		5. Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya
	6. Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri		6. Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
	7. Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya		7. Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya
E. SILPA /SIKPA	H. SILPA/SIKPA		J. SILPA/SIKPA

Kebijakan Penyusunan Laporan Operasional Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah

PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH DAERAH	PERLAKUAN	KONSOLIDASI
Kegiatan Operasional	Kegiatan Operasional	Dijumlahkan	Kegiatan Operasional
Pendapatan Operasional	Pendapatan Operasi	Dijumlahkan	Pendapatan Operasional
Pendapatan Perpajakan	Pendapatan Asli Daerah	Dijumlahkan	Pendapatan Perpajakan
Pajak Dalam Negeri	Pendapatan Pajak Daerah	Dijumlahkan	Pajak Dalam Negeri
Pajak Perdagangan Internasional		Dari LKPP-TW	Pajak Perdagangan Internasional
Jumlah Pendapatan Perpajakan		Dijumlahkan	Jumlah Pendapatan Perpajakan
Pendapatan Negara Bukan Pajak		Dijumlahkan	Pendapatan Negara Bukan Pajak
Pendapatan Sumber Daya Alam		Dari LKPP-TW	Pendapatan Sumber Daya Alam
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	Dari LKPPDK-TW	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		Dari LKPP-TW	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
Pendapatan BLU	Pendapatan BLUD	Dijumlahkan	Pendapatan BLU/BLUD
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	Pendapatan Retribusi Daerah	Dijumlahkan	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Menggunakan angka dari LKPPDK-TW	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
	Lain-lain Pendaptan Asli Daerah yang Sah	Menggunakan angka dari LKPPDK-TW	Lain-lain Pendaptan Asli Daerah yang Sah
	Pendapatan Hibah	Menyesuaikan dengan Jumlah Setelah Eliminasi dalam Konsolidasian - TW	a. Pendapatan Hibah
	Dana Darurat	Menggunakan angka dari LKPPDK-TW	b. Dana Darurat
	Pendapatan Lainnya	Menyesuaikan dengan Jumlah Setelah Eliminasi dalam Konsolidasian - TW	c. Pendapatan Lainnya
Penyesuaian Pendapatan		Dijumlahkan	Penyesuaian Pendapatan
Reklasifikasi dari Utang Pajak yang Belum Disetor		Dari LKPP-TW	Reklasifikasi dari Utang Pajak yang Belum Disetor
	Pendapatan Transfer	Dijumlahkan	Pendapatan Transfer
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Dieliminasi dengan Transfer Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Menyesuaikan dengan Jumlah	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

	Bantuan Keuangan Daerah	Setelah Eliminasi dalam LKPKD-TW	Bantuan Keuangan Daerah
	Jumlah Pendapatan Transfer	Dari LKPKD-TW	Jumlah Pendapatan Transfer
Jumlah Pendapatan Operasional	Jumlah Pendapatan Operasional	Dijumlahkan	Jumlah Pendapatan Operasional
BEBAN	BEBAN	Dijumlahkan	BEBAN
Beban Operasional	Beban Operasi	Dijumlahkan	Beban Operasi
Beban Pegawai	Beban Pegawai	Dijumlahkan	Beban Pegawai
Beban Persediaan	Beban Persediaan	Dijumlahkan	Beban Persediaan
Beban Barang dan Jasa	Beban Barang dan Jasa	Dijumlahkan	Beban Barang dan Jasa
Beban Pemeliharaan		Dari LKPP-TW	Beban Pemeliharaan
Beban Perjalanan Dinas		Dari LKPP-TW	Beban Perjalanan Dinas
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat		Dari LKPP-TW	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
	Beban Bunga	Dari LKPKD-TW	Beban Bunga
	Beban Subsidi		Beban Subsidi
	Beban Hibah		Beban Hibah
Beban Bantuan Sosial	Beban Bantuan Sosial	Dijumlahkan	Beban Bantuan Sosial
Beban Penyusutan dan Amortisasi	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Dijumlahkan	Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Beban Penyisihan Piutang	Dijumlahkan	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Transfer ke Daerah			
1.Dana Perimbangan		Dieliminasi dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Konsolidasian	
Dana Alokasi Umum			
a.Dana Bagi Hasil			
b.Dana Alokasi Umum			
Dana Alokasi Khusus			
a.Dana Alokasi Khusus Fisik			
b.Dana Alokasi Khusus Non Fisik			
2.Dana Intensif Daerah			
3.Dana Keistimewaan DIY			
4.Dana Otonomi Khusus			
	BEBAN TRANSFER		BEBAN TRANSFER
	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	Menyesuaikan dengan Jumlah Setelah Eliminasi dalam Konsolidasian LKPKD-TW	
	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		
	Beban Transfer Bantuan Keuangan Daerah ke Pemerintah Daerah Lainnya		
	Beban Transfer Bantuan Keuangan Daerah ke Pemerintah Desa	Dari LKPKD-TW	Beban Transfer Bantuan Keuangan Daerah ke Pemerintah Desa
	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	Dari LKPKD-TW	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	Dari LKPKD-TW	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus
Jumlah Beban Transfer	Jumlah Beban Transfer	Dari LKPKD-TW	Jumlah Beban Transfer
	Beban Lain-lain	Dari LKPKD-TW	Beban Lain-lain
Jumlah Beban Operasional	Jumlah Beban Operasional	Dijumlahkan	Jumlah Beban Operasional
Jumlah Beban	Jumlah Beban	Dijumlahkan	Jumlah Beban
Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Operasional	Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Operasional	Dijumlahkan	Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Operasional
Kegiatan Non Operasional	Kegiatan Non Operasional	Dijumlahkan	Kegiatan Non Operasional

Surplus / (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	Surplus / (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	Dijumlahkan	Surplus / (Defisit) Pelepasan Aset No Lancar
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Dijumlahkan	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Pemerintah Pusat dan Daerah
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	Dijumlahkan	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Pemerintah Pusat dan Daerah
	Defisit Investasi Permanen	Dijumlahkan	Defisit Investasi Permanen
Jumlah Surplus / (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	Jumlah Surplus / (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	Dijumlahkan	Jumlah Surplus / (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar
	Surplus / (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Dari LKPKD-TW	Surplus / (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Dari LKPKD-TW	Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Pusat dan Daerah
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Dari LKPKD-TW	Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Pusat dan Daerah
	Jumlah Surplus / (Defisit) Pelepasan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Dari LKPKD-TW	Jumlah Surplus / (Defisit) Pelepasan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Surplus / (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Surplus / (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Dijumlahkan	Surplus / (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Dijumlahkan	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Jumlah Surplus / (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Jumlah Surplus / (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Dijumlahkan	Jumlah Surplus / (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Pos Luar Biasa	Pos Luar Biasa	Dijumlahkan	Pos Luar Biasa
Pendapatan Luar Biasa	PENDAPATAN LUAR BIASA	Dijumlahkan	PENDAPATAN LUAR BIASA
Pendapatan Luar Biasa	Pendapatan Luar Biasa	Dijumlahkan	Pendapatan Luar Biasa
Beban Luar Biasa	BEBAN LUAR BIASA	Dijumlahkan	
Beban Luar Biasa	Beban Luar Biasa	Dijumlahkan	Beban Luar Biasa
Surplus / (Defisit) Dari Pos Luar Biasa	Surplus / (Defisit) Dari Pos Luar Biasa	Dijumlahkan	Surplus / (Defisit) Dari Pos Luar Biasa
SURPLUS / (DEFISIT) LO	SURPLUS / (DEFISIT) LO	Dijumlahkan	SURPLUS / (DEFISIT) LO

**Kebijakan Penyusunan Neraca
Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah**

PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH DAERAH	PERLAKUAN	KONSOLIDASI
ASET	ASET		ASET
Aset Lancar	Aset Lancar		Aset Lancar
Kas dan Setara Kas			Kas dan Setara Kas
Rekening Kas di KPPN	Kas di Kas Daerah	Dijumlahkan	Rekening Kas di KPPN dan Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Pengeluaran	Kas di Bendahara Pengeluaran	Dijumlahkan	Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan	Kas di Bendahara Penerimaan	Dijumlahkan	Kas di Bendahara Penerimaan
Kas Lainnya dan Setara Kas	Kas Lainnya	Dijumlahkan	Kas Lainnya dan Setara Kas
	Setara Kas		
Kas pada BLU	Kas di BLUD	Dijumlahkan	Kas pada BLU / BLUD
Piutang	Piutang Pendapatan		Piutang
Investasi Jangka Pendek – Badan Layanan Umum	Investasi Jangka Pendek-BLUD	Dijumlahkan	Investasi Jangka Pendek BLU/BLUD
Piutang Pajak	Piutang Pajak Daerah	Dijumlahkan	Piutang Pajak
Piutang Bukan Pajak	Piutang Retribusi	Dijumlahkan	Piutang Bukan Pajak
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Piutang Bukan Pajak
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		Piutang Bukan Pajak
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	Dari LKPKD - TW	Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan
	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya	Dieliminasi pada Konsolidasi LKPKD - TW	
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Dari LKPKD - TW	
	Piutang Pendapatan Lainnya	Dari LKPKD - TW	
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	Dijumlahkan	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	Dijumlahkan	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
	Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN dan perusahaan daerah	Dari LKPKD - TW	Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN dan perusahaan daerah
Uang Muka Belanja	Uang Muka	Dijumlahkan	Uang Muka Belanja
Beban Dibayar Dimuka	Beban Dibayar Dimuka	Dijumlahkan	Beban Dibayar Dimuka
Piutang dari Kegiatan BLU		Dijumlahkan	Piutang dari Kegiatan BLU
Piutang Lain-lain	Piutang Lainnya	Dijumlahkan	Piutang Lain-lain
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek		Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek
	Investasi Jangka Pendek	DARI LKPKD-TW	Investasi Jangka Pendek
Persediaan	Persediaan	Dijumlahkan	Persediaan
Jumlah Aset Lancar	Jumlah Aset Lancar		Jumlah Aset Lancar
Investasi Jangka Panjang	Investasi Jangka Panjang	DARI LKPKD-TW	Investasi Jangka Panjang
	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		Investasi Non Permanen
	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	DARI LKPKD-TW	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
	Investasi Dalam Obligasi	DARI LKPKD-TW	Investasi Dalam Obligasi
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	DARI LKPKD-TW	Investasi dalam Proyek Pembangunan

	Dana Bergulir	DARI LKPKD-TW	Dana Bergulir
	Deposito Jangka Panjang	DARI LKPKD-TW	Deposito Jangka Panjang
	Investasi Non Permanen Lainnya	DARI LKPKD-TW	Investasi Non Permanen Lainnya
Jumlah Investasi Non Permanen			
Investasi Permanen	Investasi Permanen		Investasi Permanen
	Penyertaan Modal pada BUMD	Dari LKPKD-TW	Penyertaan Modal pada BUMD
Investasi Permanen BLU		Dari LKPKD-TW	Investasi Permanen BLU
	Investasi Permanen Lainnya	Dari LKPKD-TW	Investasi Permanen Lainnya
Jumlah Investasi Jangka Panjang	Jumlah Investasi Jangka Panjang	Dari LKPKD-TW	Jumlah Investasi Jangka Panjang
Aset Tetap	Aset Tetap		Aset Tetap
Tanah	Tanah	Dijumlahkan	Tanah
Peralatan dan Mesin	Peralatan dan Mesin	Dijumlahkan	Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan	Gedung dan Bangunan	Dijumlahkan	Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Dijumlahkan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya	Aset Tetap Lainnya	Dijumlahkan	Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Dijumlahkan	Konstruksi Dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Dijumlahkan	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Dijumlahkan	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Dijumlahkan	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Dijumlahkan	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
Jumlah Aset Tetap	Jumlah Aset Tetap		Jumlah Aset Tetap
	Dana Cadangan	Dari LKPKD-TW	Dana Cadangan
	Jumlah Dana Cadangan		Jumlah Dana Cadangan
Piutang Jangka Panjang	Piutang Jangka Panjang		Piutang Jangka Panjang
Kemitraan Pihak Ketiga	Kemitraan Pihak Ketiga	Dijumlahkan	Kemitraan Pihak Ketiga
Piutang Tagihan Penjualan	Piutang Tagihan Penjualan	Dijumlahkan	Piutang Tagihan Penjualan
Piutang Tuntutan Ganti Rugi	Piutang Tuntutan Ganti Rugi	Dijumlahkan	Piutang Tuntutan Ganti Rugi
Piutang Jangka Panjang Lainnya	Piutang Jangka Panjang Lainnya	Dijumlahkan	Piutang Jangka Panjang Lainnya
Penyisihan Piutang Tak Tertagih -Piutang Jangka Panjang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih -Piutang Jangka Panjang	Dijumlahkan	Penyisihan Piutang Tak Tertagih -Piutang Jangka Panjang
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Dijumlahkan	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
Jumlah Piutang Jangka Panjang	Jumlah Piutang Jangka Panjang		Jumlah Piutang Jangka Panjang
Aset Lainnya	Aset Lainnya		Aset Lainnya
Aset Tak Berwujud	Aset Tak Berwujud	Dijumlahkan	Aset Tak Berwujud
Dana Kelolaan Badan Layanan Umum		Dari LKPP-TW	Dana Kelolaan Badan Layanan Umum
Aset Lain-lain	Aset Lain-lain	Dijumlahkan	Aset Lain-lain
Amortisasi Aset Tak Berwujud	Amortisasi Aset Tak Berwujud	Dijumlahkan	Amortisasi Aset Tak Berwujud
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	Dijumlahkan	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Jumlah Aset Lainnya	Jumlah Aset Lainnya		Jumlah Aset Lainnya

LKPK DAN LSKP TINGKAT WILAYAH 2024 (AUDITED)

JUMLAH ASET	JUMLAH ASET		JUMLAH ASET
KEWAJIBAN	KEWAJIBAN		KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Pendek		Kewajiban Jangka Pendek
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Dari LKPDK-TW	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang Kepada Pihak Ketiga		Dari LKPP-TW	Utang Kepada Pihak Ketiga
	Utang Bunga	Dari LKPDK-TW	Utang Bunga
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Dari LKPDK-TW	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Pendapatan Diterima Dimuka	Pendapatan Diterima Dimuka	Dijumlahkan	Pendapatan Diterima Dimuka
	Utang Belanja / Beban	Dari LKPDK-TW	Utang Belanja / Beban
Utang Jangka Pendek Lainnya	Utang Jangka Pendek Lainnya	Dijumlahkan	Utang Jangka Pendek Lainnya
	Utang Kelebihan Pembayaran PAD	Dari LKPDK-TW	Utang Kelebihan Pembayaran PAD
	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	Dieliminasi pada Konsolidasi LKPDK-TW	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer
	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain Pendapatan yang Sah	Dari LKPDK-TW	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain Pendapatan yang Sah
	Utang Transfer Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	Dari LKPDK-TW	Utang Transfer Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
	Utang Jangka Pendek Lainnya	Dari LKPDK-TW	Utang Jangka Pendek Lainnya
Hibah yang Belum Disahkan		Dari LKPP-TW	Hibah yang Belum Disahkan
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
	Kewajiban Jangka Panjang		Kewajiban Jangka Panjang
	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri		Utang Jangka Panjang Dalam Negeri
	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	Dari LKPDK-TW	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
	Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
	Utang Dalam Negeri - Obligasi		Utang Dalam Negeri - Obligasi
	Utang Pemerintah Pusat		Utang Pemerintah Pusat
	Utang Pemerintah Daerah Lainnya		Utang Pemerintah Daerah Lainnya
	Utang Dalam Negeri Lainnya		Utang Dalam Negeri Lainnya
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
	Utang Jangka Panjang Lainnya		Utang Jangka Panjang Lainnya
	Utang Jangka Panjang Lainnya		Utang Jangka Panjang Lainnya
	Jumlah Utang Jangka Panjang Lainnya		Jumlah Utang Jangka Panjang Lainnya
JUMLAH KEWAJIBAN	JUMLAH KEWAJIBAN		JUMLAH KEWAJIBAN
EKUITAS	EKUITAS	Dijumlahkan	EKUITAS

**Kebijakan Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas
Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah**

PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH DAERAH	PERLAKUAN	KONSOLIDASI
EKUITAS AWAL	EKUITAS AWAL	Dijumlahkan	EKUITAS AWAL
SURPLUS / DEFISIT LO	SURPLUS / DEFISIT LO	Dijumlahkan	SURPLUS / DEFISIT LO
KOREKSI YANG MENAMBAHI /MENGURANGI	DAMPAK KOMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN KESALAHAN MENDASAR	Dijumlahkan	KOREKSI YANG MENAMBAHI /MENGURANGI
Koreksi Nilai Persediaan	Koreksi Nilai Persediaan	Dijumlahkan	Koreksi Nilai Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap	Selisih Revaluasi Aset Tetap	Dijumlahkan	Selisih Revaluasi Aset Tetap
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		Dari LKPP-TW	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
Lain-lain	Lain-lain	Dijumlahkan	Lain-lain
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS			TRANSAKSI ANTAR ENTITAS
Ditagihkan Ke Entitas Lain	Koreksi Nilai Persediaan	Dari LKPP-TW	Ditagihkan Ke Entitas Lain
Diterima Dari Entitas Lain	Selisih Revaluasi Aset Tetap	Dari LKPP-TW	Diterima Dari Entitas Lain
Transfer Keluar		Dari LKPP-TW	Transfer Keluar
Transfer Masuk	Lain-lain	Dari LKPP-TW	Transfer Masuk
Pengesahan Hibah Langsung	Koreksi Nilai Persediaan	Dari LKPP-TW	Pengesahan Hibah Langsung
REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE EKUITAS		Dari LKPP-TW	REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE EKUITAS
Uang Muka dari KPPN		Dari LKPP-TW	Uang Muka dari KPPN
KENAIKAN /PENURUNAN EKUITAS	KENAIKAN /PENURUNAN EKUITAS	Dijumlahkan	KENAIKAN /PENURUNAN EKUITAS
EKUITAS AKHIR	EKUITAS AKHIR	Dijumlahkan	EKUITAS AKHIR

NERACA SALDO BUKU BESAR AKRUAL ELIMINASI/KONSOLIDASI TAHUN 2024 AUDITED

AKUN	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
1130500- Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	0	-96.730.049.821	-96.730.049.821
215111- Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar	0	96.730.049.821	96.730.049.821
611111- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	0	-1.079.348.229.000	-1.079.348.229.000
611112- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	0	-84.861.361.000	-84.861.361.000
611211- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	0	-36.009.487.000	-36.009.487.000
611212- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	0	-185.881.960.000	-185.881.960.000
612111- Belanja Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	0	-121.123.642.000	-121.123.642.000
612211- Belanja Dana Bagi Hasil Gas Bumi	0	-11.923.213.000	-11.923.213.000
612311- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap	0	-292.875.000	-292.875.000
612312- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	0	-211.000	-211.000
612412- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Tetap	0	-1.769.138.000	-1.769.138.000
612512- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	0	-18.502.865.000	-18.502.865.000
612611- Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan	0	-42.709.327.000	-42.709.327.000
612711- Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	0	-1.000.000.000	-1.000.000.000
613111- Belanja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0	-1.090.027.953.000	-1.090.027.953.000
621111- Transfer Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya	0	-34.510.180.244.000	-34.510.180.244.000
621121- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian PPPK Daerah	0	-842.195.339.815	-842.195.339.815
621122- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	-150.600.000.000	-150.600.000.000
621123- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan	0	-1.774.054.553.000	-1.774.054.553.000
621124- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Kesehatan	0	-721.760.324.000	-721.760.324.000
621125- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pekerjaan Umum	0	-509.207.491.000	-509.207.491.000
621126- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah	0	-951.463.191.000	-951.463.191.000
631212- Belanja Dana Alokasi Khusus Penugasan	0	-3.433.526.219.648	-3.433.526.219.648
643111- Insentif Fiskal	0	-647.918.592.000	-647.918.592.000
654111- Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	0	-6.672.589.451.544	-6.672.589.451.544
654112- Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	0	-5.694.689.800	-5.694.689.800

LKPK DAN LSKP TINGKAT WILAYAH 2024 (AUDITED)

654211- Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	0	-166.449.723.000	-166.449.723.000
654311- Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0	-5.956.415.356.180	-5.956.415.356.180
654711- Belanja Dana Bantuan Operasional Kesehatan	0	-1.104.364.496.339	-1.104.364.496.339
654712- Belanja Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	0	-369.947.471.332	-369.947.471.332
654812- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	0	-18.741.813.355	-18.741.813.355
654821- Dana Pelayanan Kepariwisata	0	-12.609.624.075	-12.609.624.075
654911- Belanja Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)	0	-578.524.403.100	-578.524.403.100
654912- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	0	-162.326.917.500	-162.326.917.500
654921- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	0	-15.464.787.470	-15.464.787.470
655211- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0	-1.535.416.891	-1.535.416.891
655311- Dana Fasilitasi Penanaman Modal	0	-18.470.141.484	-18.470.141.484
655411- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	-37.800.176.797	-37.800.176.797
655511- Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	0	-24.636.205.794	-24.636.205.794
8142100- Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO	0	11.311.604.022	11.311.604.022
8210100- Bagi Hasil Pajak - LO	0	2.476.128.990.000	2.476.128.990.000
8210200- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	0	170.487.833.037	170.487.833.037
8210300- Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	0	39.459.461.142.815	39.459.461.142.815
8210400- Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	0	18.481.125.781.508	18.481.125.781.508
8220400- Dana Insentif Daerah (DID)	0	647.918.592.000	647.918.592.000
8330100- Pendapatan Lainnya - LO	0	113.492.946.742	113.492.946.742
Jumlah	0	0	0

NERACA SALDO BUKU BESAR KAS ELIMINASI/KONSOLIDASI TAHUN 2024 AUDITED

AKUN	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
4141900- Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0	9.788.940.577	9.788.940.577
4210100- Bagi Hasil Pajak - LRA	0	2.537.113.890.000	2.537.113.890.000
4210200- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	0	199.081.189.000	199.081.189.000
4210300- Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	0	39.426.464.980.815	39.426.464.980.815
4210400- Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	0	18.708.124.094.646	18.708.124.094.646
4220400- Dana Insentif Daerah	0	647.918.592.000	647.918.592.000
4220500- Dana Desa	0	7.795.675.696.420	7.795.675.696.420
4330100- Pendapatan Lainnya - LRA	0	1.539.305.485	1.539.305.485
611111- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	0	-1.104.714.881.000	-1.104.714.881.000
611112- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	0	-87.659.684.000	-87.659.684.000
611211- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	0	-36.904.294.000	-36.904.294.000
611212- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	0	-191.553.835.000	-191.553.835.000
611213- Belanja Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi	0	-1.000	-1.000
611214- Belanja Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/Kota	0	-20.000	-20.000
612111- Belanja Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	0	-122.178.697.000	-122.178.697.000
612211- Belanja Dana Bagi Hasil Gas Bumi	0	-12.012.866.000	-12.012.866.000
612311- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap	0	-374.463.000	-374.463.000
612312- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	0	-317.000	-317.000
612411- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah	0	-18.223.000	-18.223.000
612412- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Tetap	0	-2.121.297.000	-2.121.297.000
612512- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	0	-18.665.998.000	-18.665.998.000
612513- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	0	-1.000	-1.000
612611- Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan	0	-42.709.327.000	-42.709.327.000
612711- Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	0	-1.000.000.000	-1.000.000.000
613111- Belanja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0	-1.116.281.175.000	-1.116.281.175.000
621111- Transfer Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya	0	-34.510.180.244.000	-34.510.180.244.000
621121- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian PPPK Daerah	0	-842.195.339.815	-842.195.339.815
621122- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Pembangunan Sarana dan	0	-150.600.000.000	-150.600.000.000

LKPK DAN LSKP TINGKAT WILAYAH 2024 (AUDITED)

Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
621123- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan	0	-1.774.054.553.000	-1.774.054.553.000
621124- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Kesehatan	0	-721.760.324.000	-721.760.324.000
621125- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pekerjaan Umum	0	-509.207.491.000	-509.207.491.000
621126- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah	0	-929.795.275.062	-929.795.275.062
631212- Belanja Dana Alokasi Khusus Penugasan	0	-3.547.120.924.826	-3.547.120.924.826
643111- Insentif Fiskal	0	-647.918.592.000	-647.918.592.000
654111- Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	0	-6.672.589.451.544	-6.672.589.451.544
654112- Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	0	-5.694.689.800	-5.694.689.800
654211- Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	0	-166.449.723.000	-166.449.723.000
654311- Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0	-5.938.263.389.418	-5.938.263.389.418
654711- Belanja Dana Bantuan Operasional Kesehatan	0	-1.117.475.835.004	-1.117.475.835.004
654712- Belanja Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	0	-384.886.029.000	-384.886.029.000
654812- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	0	-19.342.239.000	-19.342.239.000
654821- Dana Pelayanan Kepariwisata	0	-13.108.825.000	-13.108.825.000
654911- Belanja Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)	0	-578.408.728.561	-578.408.728.561
654912- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	0	-158.433.043.493	-158.433.043.493
654921- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	0	-16.050.000.000	-16.050.000.000
655211- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0	-2.030.000.000	-2.030.000.000
655311- Dana Fasilitasi Penanaman Modal	0	-20.364.444.000	-20.364.444.000
655411- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	-40.239.450.000	-40.239.450.000
655511- Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	0	-27.667.322.000	-27.667.322.000
662111- Belanja Dana Desa	0	-7.795.675.696.420	-7.795.675.696.420
Jumlah	0	0	0



**LKPK & LSKP TINGKAT WILAYAH
AUDITED 2024**